

KESIAPAN INDUSTRI AGRO SEBAGAI INDUSTRI ANDALAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BEBAS

Seiring dengan terus menurunnya nilai ekspor pertanian primer Indonesia, maka perlu didorong ekspor produk industri agro yang memiliki nilai tambah cukup tinggi. Dalam situasi dan kondisi era perdagangan bebas saat ini maka perlu dimanfaatkan secara optimal agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar produk negara lain. Dalam hal ini perlu adanya kebijakan pemerintah yang memihak untuk meningkatkan produksi dan penjualan, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Adalah BUMN bidang perkebunan sebagai salah satu pelaku industri agro yang dekade ini tengah mengalami penurunan terus menerus, baik dalam produksi maupun produktivitas, yang disebabkan oleh inefisiensi.

Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan cara membentuk holding perkebunan, sehingga antar BUMN dapat saling bersinergi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Adanya holding juga diharapkan memperkuat jalur hilirisasi dan pembangunan ekonomi daerah melalui aktifitas pertukaran sumber daya dan kesempatan bersinergi antar perusahaan.

Penguatan hilirisasi semacam itu pada gilirannya akan mampu membentuk kemandirian keuangan seiring dengan meningkatnya pendapatan.

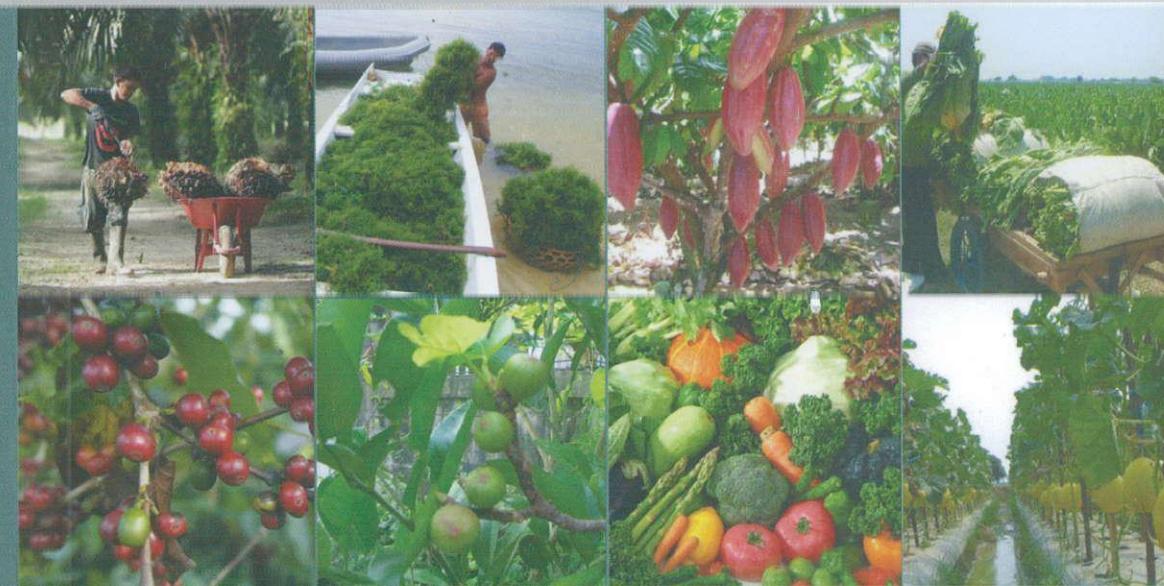
Adapun strategi untuk meningkatkan daya saing dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas komoditi itu sendiri dengan berbagai efisiensi dan kelembagaan terkait.

Buku ini memaparkan permasalahan menjadi 3 bagian, yakni **pertama** menyoroti industri agro dilihat dari pendekatan komoditi primernya, **kedua** membahas studi kasus perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia di era perdagangan bebas, khususnya era MEA 2015, dan **ketiga** difokuskan bahasan untuk masalah daya saing agro.

KESIAPAN INDUSTRI AGRO SEBAGAI INDUSTRI ANDALAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BEBAS

KESIAPAN INDUSTRI AGRO SEBAGAI ANDALAN INDONESIA

Penyunting : Dr. Amzul Rifin, SP, MA.



Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
dan PT. Dian Rakyat
2016

BUKU TIDAK DIPERJUAL BELIKAN

ISBN 978-602-60366-7-4

9 786026 036674

Penyunting : Dr. Amzul Rifin, SP, MA.

Penyunting:

Dr Amzul Rifin, SP, MA

**KESIAPAN INDUSTRI AGRO
SEBAGAI INDUSTRI ANDALAN INDONESIA
DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BEBAS**

Diterbitkan Oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan DIAN RAKYAT
2016

Judul:

Kesiapan Industri Agro sebagai Industri Andalan Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Bebas

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Jumlah Halaman Isi: 198 hal

Ukuran Bersih Buku: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-60366-7-4

Cetakan Pertama, 2016

Penulis:

Eka Budiyanti

Venti Eka Satya

Suhartono

Rafika Sari

Sahat Aditua Fadhlitya Silalahi

Editor:

Dr. Amzul Rifin, SP, MA

Desain Sampul:

Bambang RS

Tata Letak:

Ilham Akbar, Fajar Dwiyanto

Board Editor:

Pitan Daslani

Diterbitkan Oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2016

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

PT. DIAN RAKYAT Anggota IKAPI No. 161/DKI/66

Jl. Rawagirang no. 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

Telp. (021) 4604444/4606666 Fax. (021) 4609115

www.dianrakyat.co.id

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**Pasal 72**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga buku Buku Tim bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik ini dapat diselesaikan penulis menyambut baik diterbitkannya buku yang berjudul "Kesiapan Industri Agro Sebagai Industri Andalan Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Bebas" ini yang merupakan hasil pemikiran ilmiah para peneliti yang tergabung dalam Pusat Penelitian-Badan Keahlian Dewan Setjen DPR RI.

Buku ini terdiri atas lima artikel yang terbagi kedalam dua bagian. Bagian pertama menyoroti tentang industri agro dilihat dari perspektif komoditi primernya. Bagian ini terdiri dari tiga tulisan, yang pertama membahas mengenai Analisis Daya Saing *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia, tulisan kedua mengenai Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Indonesia di Era Perdagangan Bebas, serta mengenai Peluang dan Tantangan Perkembangan Industri Argo dalam Perdagangan Bebas MEA 2105. Pada bagian kedua, pendekatan yang diambil adalah bagaimana meningkatkan daya saing produk industri agro dilihat dari aspek kelembagaannya. Pada bagian ini terdiri dari dua tulisan yaitu mengenai Implementasi Pengembangan Kawasan Industri dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Agro Indonesia (Contoh Kasus Sei Mangke di Sumut dan Maloy di Kaltim), serta mengenai Pembentukan *Holding* BUMN Perkebunan sebagai Strategi Peningkatan Kinerja *Holding* BUMN Perkebunan. Selanjutnya pada bagian akhir disajikan Epilog yang merangkum seluruh tulisan tersebut.

Segala sumbangan pemikiran para penulis yang tertuang dalam buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembentukan undang-undang, pengawasan dan tugas-tugas kedewanan lainnya yang terkait dengan industri agro. Buku ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian pihak-pihak yang membutuhkannya baik di lingkungan peneliti, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, maupun masyarakat bangsa dan negara Indonesia.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang ikut berkontribusi sehingga terwujudnya buku ini. Harapan saya semoga karya ilmiah seperti ini akan terus berlanjut dimasa yang akan datang dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik lagi.

Jakarta, September 2016
Kepala Pusat Penelitian BKD

Dr. Indra Pahlevi

PROLOG

Peran sektor pertanian primer dalam perekonomian Indonesia terus mengalami penurunan, hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menurun dari 13,93 persen pada tahun 2010 menjadi 13,18 persen pada tahun 2014 (BPS, 2016). Namun di sisi lain, industri pengolahan yang berbasis bahan baku pertanian (industri agro) mengalami peningkatan kontribusinya dari 8,03 persen pada tahun 2010 menjadi 8,36 persen pada tahun 2014 (BPS, 2016). Industri agro termasuk industri makanan minuman, pengolahan tembakau, kayu, dan karet.

Sektor pertanian primer juga merupakan penyumbang devisa bagi Indonesia dengan menjadi andalan produk ekspor Indonesia antara lain kelapa sawit, kakao, karet, teh, produk perikanan, dan lainnya. Namun tren yang sama terjadi, ekspor produk pertanian primer Indonesia mengalami penurunan. Sebagai contoh, ekspor produk CPO (*crude palm oil*) pada tahun 2010 sebesar US\$ 7,6 miliar sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 45 persen menjadi US\$ 4,2 miliar sedangkan produk olahan minyak sawit (*refined palm oil*) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari US\$ 5,8 miliar pada tahun 2010 menjadi US\$ 13,2 miliar pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 128 persen (UN Comtrade, 2016). Hal ini juga terjadi di komoditi kakao, dimana ekspor biji kakao mengalami penurunan 84 persen pada periode 2010 dan 2014. Sedangkan produk olahannya mengalami peningkatan seperti pasta coklat yang meningkat sebesar 254

persen, butter coklat meningkat sebesar 179 persen dan bubuk coklat meningkat sebesar 1 persen (UN Comtrade, 2016).

Penurunan nilai ekspor produk pertanian primer dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah menurunnya harga produk tersebut di pasaran dunia. Harga CPO di Rotterdam menurun dari US\$ 898 per ton pada tahun 2010 menjadi US\$ 818 per ton pada tahun 2014 (PT Smart, 2016). Sedangkan harga biji kakao menurun dari US\$ 3130 per ton pada tahun 2010 menjadi US\$ 3063 per ton pada tahun 2014 (IMF, 2016). Penyebab kedua adalah kebijakan pemerintah yang mendukung adanya hilirisasi produk pertanian. Salah satunya adalah kebijakan bea keluar yaitu dengan mengenakan bea keluar pada biji kakao yang diberlakukan sejak April 2010. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjamin ketersediaan bahan baku biji kakao untuk industri pengolahan kakao di dalam negeri. Hal ini mengakibatkan turunnya ekspor biji kakao dan meningkatnya kapasitas produksi industri pengolahan kakao di dalam negeri.

Penurunan peranan sektor pertanian primer dapat digantikan oleh meningkatnya peran sektor industri agro baik dalam kontribusinya terhadap PDB maupun terhadap nilai ekspor. Sehingga penulisan buku dengan judul **Kesiapan Industri Agro sebagai Industri Andalan Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Bebas** sangat relevan dalam menghadapi persaingan di masa yang akan datang yang semakin kompetitif terutama untuk produk industri agro.

Buku ini terdiri lima bab dan dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah industri agro dilihat dari pendekatan komoditi primernya. Pada bagian ini terdiri dari tiga tulisan yaitu

tulisan pertama mengenai Analisis Daya Saing *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia, tulisan kedua mengenai Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Indonesia di Era Perdagangan Bebas serta tulisan ketiga mengenai Peluang dan Tantangan Perkembangan Industri Argo dalam Perdagangan Bebas MEA 2015.

Pada bagian kedua, pendekatan yang diambil adalah bagaimana meningkatkan daya saing produk industri agro dilihat dari aspek kelembagaannya. Pada bagian ini terdiri dari dua tulisan yaitu tulisan keempat mengenai Implementasi Pengembangan Kawasan Industri dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Agro Indonesia (Contoh Kasus Sei Mangke di Sumut dan Maloy di Kaltim), dan tulisan kelima mengenai Pembentukan Holding BUMN Perkebunan sebagai Strategi Peningkatan Kinerja *Holding* BUMN Perkebunan. Pada bagian akhir disajikan Epilog yang merangkum seluruh tulisan tersebut.

Editor meyakini bahwa kajian yang ditulis dalam buku ini akan memberikan sumbangan pemikiran yang penting bagi perkembangan industri agro Indonesia di masa yang akan datang. Besar harapannya, tulisan ini juga dapat memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan dan pihak legislatif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan bagaimana meningkatkan daya saing industri agro di Indonesia.

Jakarta, September 2016

Penyunting

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Prolog	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Bagan	xiii
Daftar Grafik	xiv
Daftar Gambar	xv

ASPEK KOMODITI PRIMER

ANALISIS DAYA SAING CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA

Eka Budiyanti

I. Pendahuluan	1
II. Perkembangan CPO Indonesia	4
III. Konsep Daya Saing	11
IV. Hasil dan Analisis Daya Saing CPO Indonesia	13
V. Penutup	17
Daftar Pustaka	19

PERDAGANGAN MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA DI ERA PERDAGANGAN BEBAS SAWIT INDONESIA

Venti Eka Satya

I. Pendahuluan	23
II. Perdagangan Bebas	26
III. Sawit dan Produk Turunannya Sebagai Produk Agro Unggulan Indonesia	36
IV. Prospek Perdagangan Kelapa Sawit di Era Perdagangan Bebas Dunia	43
V. Penutup	50
Daftar Pustaka	54

PELUANG DAN TANTANGAN PERKEMBANGAN INDUSTRI ARGO DALAM PERDAGANGAN BEBAS MEA 2105

Suhartono

I.	Latar Belakang	57
II.	Liberalisasi Perdagangan	61
III.	Industrialisasi Berbasis Agro	67
IV.	Daya Saing Agro Industri Menghadapi Liberalisasi Perdagangan	74
V.	Bukan Sekedar Pabrik Tapi Industri	80
VI.	Penutup	85
	Daftar Pustaka	87

ASPEK KELEMBAGAAN

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING INDUSTRI AGRO INDONESIA (CONTOH KASUS SEI MANGKE DI SUMUT DAN MALOY DI KALTIM)

Rafika Sari

I.	Pendahuluan	89
II.	Pengembangan Kawasan Industri	95
III.	Kondisidana Permasalahan Pengembangan Kawasan	102
IV.	Manfaat Ekonomi Pengembangan Kawasan Industri	121
V.	Penutup	128
	Daftar Pustaka	130

PEMBENTUKAN HOLDING BUMN PERKEBUNAN SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN KINERJA HOLDING BUMN PERKEBUNAN

Sahat Aditua Fandhiya Silalahi

I.	Pendahuluan	133
II.	Jenis Holding dan Pertimbangan Pembentukan	135
III.	Roadmap Pengembangan BUMN	140
IV.	Strategi Holding BUMN Perkebunan	145

V. Potensi Permasalahan Holding BUMN Perkebunan	153
VI. Penutup	155
Daftar Pustaka	158

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kinerja Ekspor Industri Agro ASEAN Tahun 2004-2014	2
Tabel 2. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit di Indonesia dan Malaysia Tahun 2011-2015	5
Tabel 3. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit di Enam Provinsi Terbesar di Indonesia Tahun 2011-2015	6
Tabel 4. Indeks RCA CPO Indonesia dan Malaysia	15
Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Menurut Provinsi dan Status Pengusahaan	37
Tabel 2. Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Provinsi dan Jenis Perkebunan	42
Tabel 1. Produksi dan Rangking Industri Agro Indonesia Tahun 2014	91
Tabel 2. Peringkat dan Nilai GCI Indeks Pada Negara di Asia Tenggara Tahun 2015-2016 dan 2016-2017	92
Tabel 3. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015	122
Tabel 4. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015	123
Tabel 5. Pengangguran, Penduduk Miskin, dan Laju PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur ...	124
Tabel 6. Tingkat Pengangguran dan Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	125
Tabel 1. Daya Saing Produk Berbasis Agro	
Tabel 1. Perbandingan antara holding operasional dan holding investasi.....	136
Tabel 2. Lima Belas Sektor dalam <i>Roadmap</i> Sektoral BUMN	144
Tabel 3. Wilayah Kerja dan Komoditas/Produk dari PT Perkebunan Nusantara I-XIV	147
Tabel 4. Peningkatan Nilai Tambah dari Produk PT Perkebunan Nusantara	152

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.Pohon Industri Turunan Kelapa Sawit (CPO) 40

DAFTAR GRAFIK

Grafik. 1. Perkembangan Jumlah *Free Trade Agreement* di Dunia ... 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Produksi CPO Indonesia dan Malaysia Tahun 2011-2015 (dalam juta ton)	7
Gambar 2. Perkembangan Produktivitas CPO Indonesia Tahun 2011-2015 (dalam ton/Ha)	8
Gambar 3. Sentra Produksi Kelapa Sawit per Provinsi di Indonesia Rata-rata Tahun 2011-2015	9
Gambar 4. Nilai Ekspor CPO dan Total Ekspor Indonesia Tahun 2011-2015 (dalam Miliar USD)	11
Gambar 1. Peringkat Daya Saing Negara ASEAN Tahun 2015	59
Gambar 1. Persentasi PDB Indonesia Menurut Sektor Tahun 1990, 2000, 2010, dan 2014	90
Gambar 2. Persentasi Jumlah Kawasan Industri di Indonesia	93
Gambar 3. <i>The Global Competitiveness</i>	96
Gambar 4. Persentasi PDB Provinsi Sumut Menurut Sektor Tahun 2000-2014	98
Gambar5. Persentasi PDB Provinsi Kaltim Menurut Sektor Tahun 2010-2014	101
Gambar 6. Luas Areal dan Produksi CPO Menurut Status Pengusahaan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 dan 2015	104
Gambar 7. Luas Areal dan Produksi CPO Menurut Status Pengusahaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dan 2015	105
Gambar 8. Konsep Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung	115
Gambar 9. Pengembangan Dermaga CPO di Pelabuhan Belawan ...	117
Gambar 1 <i>Roadmap</i> Badan Usaha Milik Negara	142

ASPEK KOMODITI PRIMER

(5) *agro based products*, (6) perikanan, (7) elektronik, (8) e-ASEAN, (9) kesehatan, (10) *air travel*, (11) pariwisata, dan (12) jasa logistik.³

Bagi Indonesia, terpilihnya industri agro sebagai salah satu sektor industri prioritas MEA sangat menguntungkan karena Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sangat besar dalam sektor industri agro. Pada ajang MEA, seluruh produk-produk dari hasil industri agro Indonesia akan bersaing dengan produk-produk industri agro negara ASEAN lainnya.

Sektor industri agro merupakan salah satu sektor penggerak utama perekonomian di ASEAN. Hal ini ditunjukkan oleh pangsa ekspor intra-ASEAN dari total ekspor ASEAN selama tahun 2014 sebesar 24,8 persen. Meningkat 2,8 persen jika dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 22 persen. Pangsa ekspor industri agro intra-ASEAN terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar 26 persen (Tabel 1).

Tabel 1. Kinerja Ekspor Industri Agro ASEAN Tahun 2004-2014

(dalam Juta USD)

Tahun	Ekspor Intra-ASEAN	Ekspor Extra-ASEAN	Total Ekspor
2004	6.378,2	22.584,8	28.963,1
2006	8.429,2	26.998,0	35.427,3
2008	15.412,0	56.212,5	71.624,6
2010	17.247,0	51.967,1	69.214,1
2012	25.412,8	72.312,9	97.725,7
2014	24.710,9	75.078,1	99.789,0

Sumber: ASEAN Integration Report 2015.

³ Nursin Tuarita, "Langkah strategis kebijakan Indonesia dalam menghadapi implementasi AEC 2015 periode 2004-2009", Skripsi, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Politik, UPN Veteran Jakarta, 2010.

Salah satu komoditas yang menjadi potensi industri agro terbesar di Indonesia adalah kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki peran strategis karena bernilai ekonomis yang sangat tinggi. Produk kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan produk pangan, produk nonpangan, dan produk samping atau limbah. Selain itu, kelapa sawit juga merupakan salah satu komoditas pertanian andalan ekspor nonmigas, serta sebagai sumber pendapatan negara. Kelapa sawit juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2016, potensi kelapa sawit di Indonesia sangat besar karena memiliki luas tanam kelapa sawit mencapai 11,3 juta Ha di tahun 2015. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, ekspor kelapa sawit sampai Desember 2015 mencapai 2,16 juta ton atau setara dengan nilai USD258,83 juta.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang menghasilkan minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) dimana selama ini telah menjadi andalan komoditas ekspor Indonesia.⁵ Produksi CPO Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Pada tahun 2015 mencapai 32,5 juta ton.

Selain Indonesia, negara pesaing di ASEAN yang juga memiliki potensi CPO cukup besar adalah Malaysia. Tingkat produksi CPO Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, pada tahun 2015 Indonesia mampu

⁴ "Peran Strategis Kelapa Sawit", (<http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-213-peran-strategis-kelapa-sawit.html>), diakses 28 September 2016).

⁵ Rashid Anggit Y.A.D., Ni Made Suyastiri Y.P., dan Antik Suprihanti, Analisis Daya Saing *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia di Pasar Internasional, *SEPA*, 9 (1), September 2012, hal. 125.

menghasilkan 31,28 juta ton atau sekitar 50 persen dari total produksi CPO dunia sebesar 62,6 juta ton, sementara Malaysia hanya 31,88 persen dari total produksi CPO dunia.

Dengan adanya MEA, tentunya hal ini akan menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia di era perdagangan bebas seperti sekarang ini. Oleh karena itu, Indonesia harus terus meningkatkan daya saingnya agar tidak tergerus oleh arus perdagangan bebas. Daya saing produk dari suatu negara sangat bergantung pada kemampuan negara yang bersangkutan untuk berinovasi dan mengembangkan produk yang dimiliki.⁶ Karenanya menjadi penting untuk melakukan analisis mengenai daya saing CPO Indonesia serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk CPO Indonesia.

II. PERKEMBANGAN CPO INDONESIA

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 13,52 persen pada tahun 2015 dimana sektor pertanian menempati urutan ketiga setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Pada saat terjadi krisis ekonomi, sektor pertanian merupakan sektor yang cukup kuat terhadap guncangan yang terjadi.

Salah satu subsektor yang memiliki potensi cukup besar adalah subsektor perkebunan. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDB pada triwulan pertama tahun 2015 tercatat mencapai 3,06

⁶ Nopirin, *Ekonomi Internasional*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007, dalam Ni Nyoman Ayu Puri Astrini, Analisis Daya Saing Komoditi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia Tahun 2001-2012, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 4(1), Januari 2014, hal. 13.

persen. Angka ini merupakan ke dua terbesar setelah subsektor tanaman pangan (4,26 Persen) pada sektor pertanian.

Selama kurun waktu tahun 2011-2015, peningkatan luas areal kelapa sawit terbesar terjadi pada tahun 2013 dengan laju pertumbuhan sebesar 9,32 persen. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Berbeda dengan Indonesia, perkembangan luas areal kelapa sawit di Malaysia tidak terlalu besar. Sejak tahun 2011-2015, luas areal kelapa sawit di Malaysia hanya meningkat 12,86 persen, sedangkan di Indonesia mencapai 25,66 persen. Terbatasnya lahan kelapa sawit yang dimiliki Malaysia menyebabkan Malaysia menyewa beberapa lahan kelapa sawit Indonesia (Tabel 2).

Tabel 2. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit di Indonesia dan

Malaysia Tahun 2011-2015

(dalam Ha)

Tahun	Indonesia	Malaysia
2011	8.992.824	5.000.109
2012	9.572.715	5.076.929
2013	10.465.020	5.229.739
2014	10.754.801	5.392.235
2015	11.300.370	5.642.943

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia, 2015.

Pada tahun 2015, luas areal kelapa sawit terbesar di Indonesia terdapat pada Provinsi Riau yaitu 2.398.328 Ha. Untuk terbesar ke dua terdapat di Provinsi Sumatera Utara mencapai 1.444.688 Ha, yang kemudian diikuti dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi

dengan luas areal masing-masing sebesar 1.214.206 Ha; 1.161.043 Ha; 1.003.570 Ha; dan 719.189 Ha (Tabel 3).

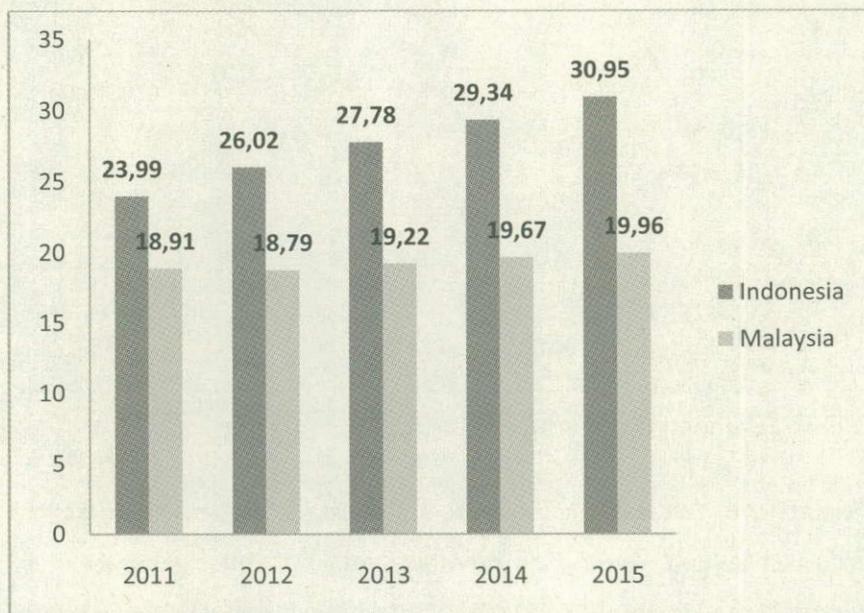
Tabel 3. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit di Enam Provinsi Terbesar di Indonesia Tahun 2011-2015
(dalam Ha)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Riau	1.919.028	2.139.824	2.193.721	2.296.849	2.398.328
Sumatera Utara	1.163.982	1.222.909	1.214.206	1.161.043	1.003.570

Indonesia. Pertumbuhan rata-rata CPO Malaysia selama 5 tahun terakhir hanya mencapai 3,35 persen per tahun. Dengan tingkat produksi CPO yang cukup tinggi maka Indonesia menjadi salah satu negara penghasil CPO terbesar, tidak hanya di ASEAN akan tetapi juga di dunia (Gambar 1).

Gambar 1. Perkembangan Produksi CPO Indonesia dan Malaysia

Tahun 2011-2015 (dalam juta ton)



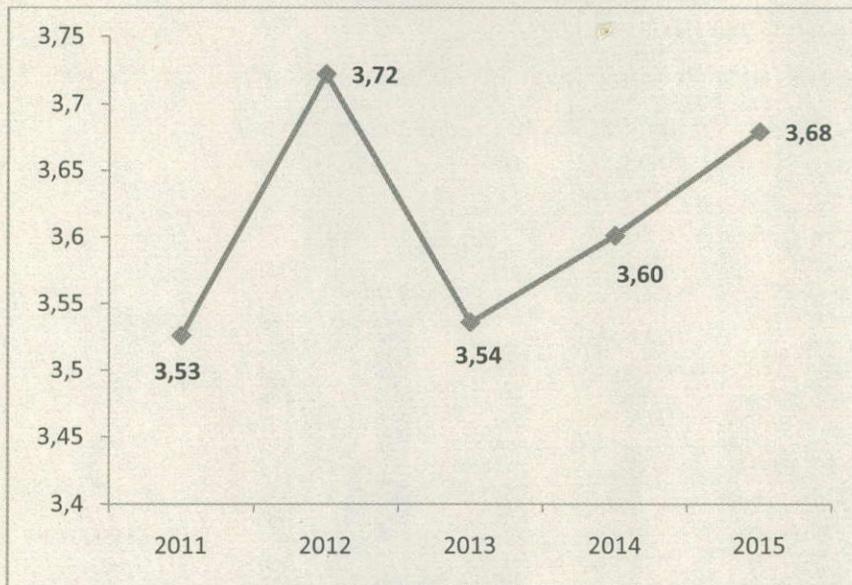
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Lembaga Minyak Sawit Malaysia, 2015.

Sementara itu, perkembangan produktivitas CPO di Indonesia selama tahun 2011-2015 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Selama periode tersebut rata-rata pertumbuhan produktivitas kelapa sawit Indonesia mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,52 persen per tahun. Selama kurun waktu tahun 2011-2015, produktivitas

tertinggi dicapai pada tahun 2012 sebesar 3,72 ton/Ha dan terendah tahun 2011 sebesar 3,53 ton/Ha (Gambar 2).

Gambar 2. Perkembangan Produktivitas CPO Indonesia

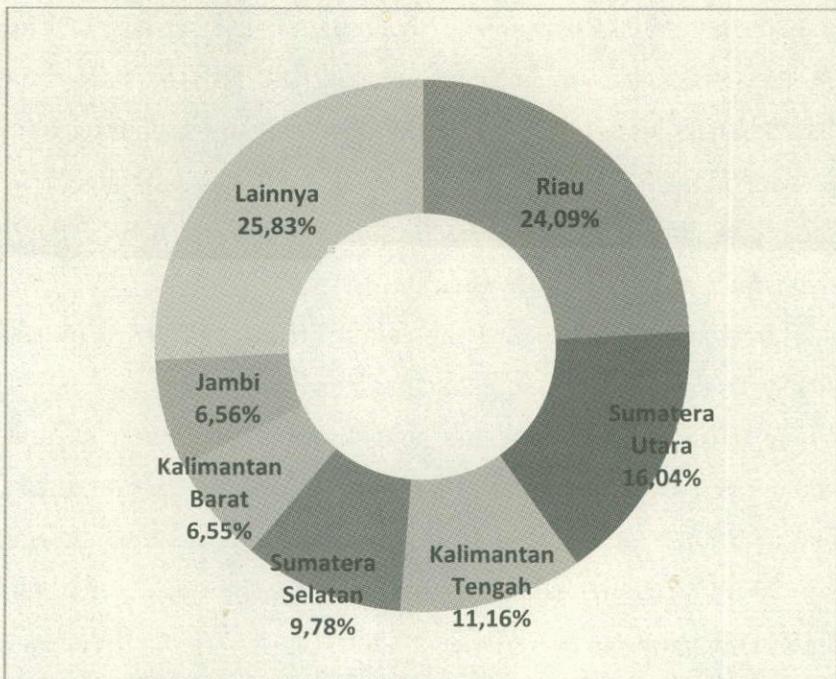
Tahun 2011-2015 (dalam ton/Ha)



Sumber: Kementerian Pertanian 2015.

Terdapat 6 (enam) provinsi di Indonesia yang menjadi sentra produksi kelapa sawit yang memberikan kontribusi sebesar 74,17 persen terhadap total produksi kelapa sawit Indonesia. Secara rata-rata, selama periode tahun 2011-2015 kontribusi terbesar diberikan oleh Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara masing-masing sebesar 24,09 persen dan 16,04 persen. Kemudian selanjutnya diikuti oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kalimantan Barat dengan kontribusi masing-masing sebesar 11,16 persen; 9,78 persen; 6,56 persen; dan 6,55 persen (Gambar 3).

Gambar 3. Sentra Produksi Kelapa Sawit per Provinsi di Indcnesia
Rata-rata Tahun 2011-2015



Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2015.

Berdasarkan data PT. Smart Tbk., perkembangan harga kelapa sawit di tingkat produsen dalam wujud tandan buah segar (TBS) pada periode tahun 2011-2015 cenderung menurun. Harga produsen pada tahun 2011 sebesar Rp1.612.900 per ton, sementara di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp1.297.200 per ton atau turun 19,57 persen dibandingkan tahun 2011. Rata-rata laju pertumbuhan

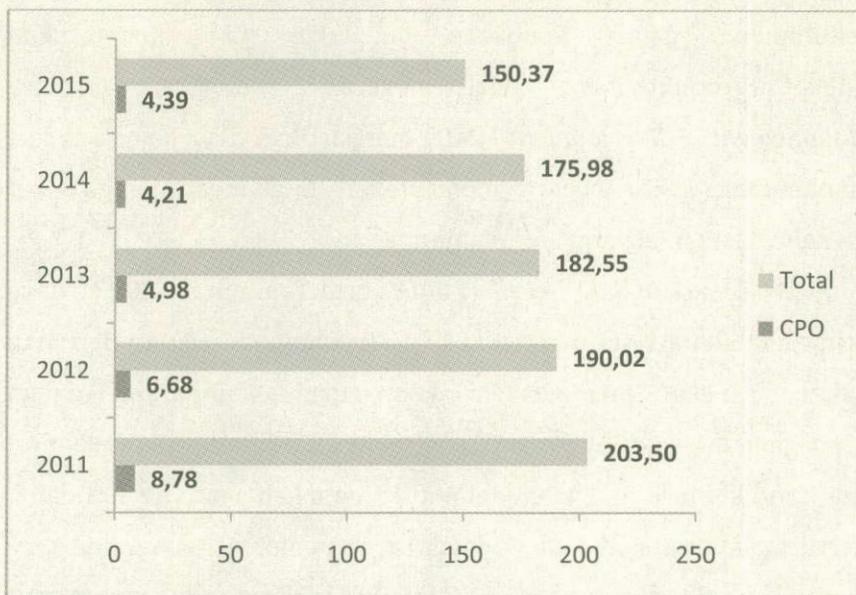
harga produsen selama periode tahun 2011-2015 sebesar minus 2,35 persen.

Dari segi konsumsi, secara umum konsumsi CPO di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dalam dua tahun terakhir ini. Pada tahun 2013 konsumsi minyak sawit hanya sebesar 1,51 juta ton, dan meningkat cukup tajam menjadi 8,80 juta ton pada tahun 2014 dan 8,31 juta ton pada tahun 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada produksi CPO dalam negeri dan pemakaian industri *refined, bleached and deodorized* (RBD) *Palm Oil* termasuk minyak goreng dan margarin.⁷

Dengan potensi lahan yang cukup besar, seharusnya industri CPO Indonesia bisa memanfaatkannya dengan maksimal sehingga Indonesia dapat menjadi negara pengekspor CPO terbesar di dunia. Dalam hal ekspor, nilai ekspor CPO Indonesia pada tahun 2011 sebesar USD8,78 miliar atau 4,31 persen dari total ekspor Indonesia. Dan hal ini terus mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2015 sehingga menjadi USD4,39 miliar atau 2,92 persen dari total ekspor Indonesia (Gambar 4).

⁷ Data Kementerian Pertanian dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Gambar 4. Nilai Ekspor CPO dan Total Ekspor Indonesia
Tahun 2011-2015 (dalam Miliar USD)



Sumber : Kementerian Perdagangan, 2015.

III. KONSEP DAYA SAING

Kemampuan individu, wilayah, ataupun suatu barang untuk menjadi lebih unggul dari yang lainnya merupakan salah satu konsep dari daya saing. Dalam konsep ekonomi wilayah atau regional, yang dimaksud dengan daya saing adalah kemampuan suatu wilayah untuk memproduksi lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.⁸ Menurut Porter, konsep daya saing yang paling mendekati adalah produktivitas. Produktivitas dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama dari suatu negara yaitu tingkat produksi yang tinggi dan

⁸ Willy Pratama, "Analisis Daya Saing Kedelai Indonesia", Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2015, hal. 12.

peningkatan standar atau kesejahteraan hidup masyarakat.⁹ *Global Competitiveness Report* mendefinisikan daya saing sebagai sekumpulan institusi, kebijakan, dan faktor yang mementukan tingkat produktivitas sebuah negara.¹⁰ Sedangkan *Institute Management of Development* (IMD) mengartikan daya saing sebagai kemampuan suatu negara menciptakan lingkungan yang dapat menghasilkan nilai yang berkelanjutan.

Berdasarkan Sahin *et al.* (2006) serta Tambunan (2003), daya saing sebuah negara merupakan suatu kemampuan negara bertahan dalam rangka memperoleh keunggulan komparatif dalam perdagangan serta investasi. Daya saing juga didefinisikan sebagai suatu indikator utama yang menentukan apakah suatu negara dapat bersaing satu sama lain atau tidak. Ukuran pemetaan daya saing yang digunakan di dalam kajian ini adalah *Revealed Comparative Advantage (RCA) Index*.¹¹

Indeks RCA menunjukkan perbandingan antara pangsa ekspor komoditas suatu negara terhadap pangsa ekspor komoditas tersebut dari seluruh dunia.¹² Metode RCA mengukur kinerja ekspor suatu komoditas dari suatu negara dengan mengevaluasi peranan ekspor komoditas tertentu dalam ekspor total suatu negara dibandingkan dengan pangsa komoditas tersebut dalam perdagangan dunia. Secara umum indeks RCA dirumuskan sebagai berikut:

⁹ Michael E. Porter, "The Competitive Advantage of Nations", *Harvard Business Review*, March-April 1990.

¹⁰ *Global Competitiveness Report* 2015-2016, hal. 5.

¹¹ Sahin *et al.*, 2006 dan Tambunan, 2003, dalam Reni K. Arianti dan Adrian D. Lubis, "Analisis Daya Saing dan Kesiapan Indonesia dalam Rangka Integrasi ASEAN: Studi Kasus Automotives, Rubber Based, dan Agro based Products", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5 (1), Juli 2011, hal. 3.

¹² Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001, hal. 92.

dimana

X_{ij} : nilai ekspor komoditas j dari negara i

X_{it} : nilai ekspor total (produk j) negara i

W_j: nilai ekspor komoditas j di dunia

W_t: nilai total eksport dunia

Nilai RCA > 1 menunjukkan bahwa pangsa komoditas j di dalam ekspor total negara i lebih besar dari pangsa rata-rata dari komoditas yang bersangkutan dalam ekspor semua negara (dunia). Hal ini berarti negara i memiliki keunggulan komparatif (memiliki daya saing kuat) sehingga relatif lebih berspesialisasi di kelompok komoditas yang bersangkutan.

Sedangkan nilai $RCA < 1$ menunjukkan bahwa pangsa komoditas j di dalam ekspor total negara i lebih kecil dari pangsa rata-rata dari komoditas yang bersangkutan dalam ekspor semua negara (dunia). Hal ini berarti negara i tidak memiliki keunggulan komparatif (memiliki daya saing lemah) sehingga tidak berspesialisasi di kelompok komoditas yang bersangkutan.

IV. HASIL DAN ANALISIS DAYA SAING CPO INDONESIA

Suatu negara atau wilayah akan memiliki keunggulan komparatif jika negara atau wilayah tersebut mampu memproduksi

dan mengekspor barang dan/atau jasa yang dihasilkan dengan biaya yang relatif lebih murah daripada negara atau wilayah tersebut mengimpor barang dan/atau jasa dari negara lain. Jika perbandingan antara nilai ekspor CPO dan nilai ekspor total CPO Indonesia lebih

sama memiliki pangsa pasar ekspor lebih besar daripada pangsa pasar ekspor CPO di dunia. Perbandingan daya saing ekspor CPO Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa pada tahun 2011-2015, daya saing rata-rata ekspor CPO Malaysia lebih rendah dari CPO Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan karena produksi CPO Malaysia lebih rendah jika dibandingkan Indonesia. Keterbatasan lahan kelapa sawit di Malaysia menjadi salah satu alasan kenapa produksi Malaysia lebih rendah dibandingkan Indonesia.

Tabel 4. Indeks RCA CPO Indonesia dan Malaysia

Tahun	Indonesia	Malaysia
2011	51,93	20,09
2012	47,77	26,71
2013	53,42	25,69
2014	48,18	29,52
2015	109,99	57,78
Rata-rata	62,26	31,96

Sumber: perhitungan penulis.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nauly¹⁵, dimana hasil penelitiannya menunjukkan Indonesia memiliki daya saing yang tinggi untuk kelompok produk dengan kode HS 15 (CPO dan PKO) dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya selama periode tahun 2004-2013. Sedangkan Malaysia menempati urutan ke dua di antara negara ASEAN lainnya.

¹⁵ Dahlia Nauly, Daya Saing Ekspor Produk Pertanian Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC, 26 Agustus 2015, hal. 315.

Penelitian Alatas¹⁶ di tahun 2015 juga melakukan analisa untuk mengetahui keunggulan komparatif CPO Indonesia ke pasaran dunia selama periode tahun 2003-2012. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai RCA CPO Indonesia lebih tinggi dari CPO di dunia internasional. Artinya, pangsa pasar CPO Indonesia lebih unggul dan mampu bersaing di pasaran dunia.

Hasil penelitian Astrini¹⁷ juga menunjukkan secara umum rata-rata indeks RCA komoditas CPO Indonesia selama tahun 2001-2012 lebih besar dari 1. Astrini membandingkan RCA CPO Indonesia dengan dua negara anggota OECD pengekspor CPO lainnya (Jepang dan Australia). Hasilnya menunjukkan bahwa CPO Indonesia memiliki daya saing yang lebih kuat dibandingkan Australia dan Jepang. Lemahnya daya saing CPO Australia disebabkan rendahnya produksi CPO yang dikarenakan kondisi iklim tidak mendukung tumbuhnya pohon kelapa sawit di Australia.¹⁸

Di tahun 2012, Hagi dkk. juga melakukan analisis mengenai daya saing ekspor minyak sawit Indonesia dan Malaysia di pasar internasional selama periode tahun 1995-2003. Dari hasil analisis RCA yang dilakukan menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki kinerja ekspor yang kuat dalam perdagangan minyak sawit dunia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks RCA

¹⁶ Andi Alatas, Trend Produksi dan Ekspor Minyak Sawit (CPO) Indonesia, *Jurnal Agraris*, 1(2), Juli 2015, hal. 122.

¹⁷ Ni Nyoman Ayu Puri Astrini, Analisis Daya Saing Komoditi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia Tahun 2001-2012, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1), Januari 2014, hal. 16.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 16-17.

ekspor minyak sawit Indonesia dan Malaysia bernilai lebih besar dari satu.¹⁹

V. PENUTUP

CPO sebagai salah satu produk unggulan ekspor Indonesia memiliki tingkat daya saing yang kuat di pasar internasional. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata indeks RCA CPO Indonesia memiliki nilai lebih dari 1. Rata-rata indeks RCA CPO Malaysia juga memiliki nilai lebih dari 1. Artinya, Malaysia juga memiliki pangsa pasar yang kuat di internasional, walaupun rata-rata indeks RCA CPO Malaysia lebih rendah dibandingkan dengan indeks RCA CPO Indonesia.

Dalam rangka liberalisasi perdagangan khususnya pasar bebas ASEAN (MEA) yang saat ini sudah berjalan, pemerintah perlu menerapkan strategi untuk terus meningkatkan daya saing CPO Indonesia, mengatasi hambatan perdagangan internasional, serta melindungi pasar domestik. Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan pemerintah antara lain meningkatkan investasi di subsektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk CPO maupun turunannya, meningkatkan volume ekspor CPO, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung industri CPO, mengembangkan sumber daya manusia pada industri CPO, dan penerapan program klaster industri.

Hendaknya pemerintah juga dapat bersinergi dengan berbagai pihak seperti produsen dan pengusaha untuk menerapkan strategi-

¹⁹ Hagi, Syaiful Hadi, dan Ermi Tety, "Analisis Daya Saing Ekspor Minyak Sawit Indonesia Dan Malaysia di Pasar Internasional", *Pekbis Jurnal*, 4(3), November 2012, hal. 190.

strategi tersebut. Dalam mengambil kebijakan perdagangan internasional, pemerintah perlu memerhatikan berbagai aspek karena hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Peran DPR sebagai legislator juga diperlukan untuk mendukung serta mengawasi kebijakan pemerintah. Diharapkan dalam era liberalisasi perdagangan seperti saat ini, CPO Indonesia dapat tetap unggul dan tingkat daya saingnya terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nopirin. *Ekonomi Internasional*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007, dalam Ni Nyoman Ayu Puri Astrini. "Analisis Daya Saing Komoditi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia Tahun 2001-2012". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(1), Januari 2014, hal. 13.
- Tambunan, Tulus. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003.

Artikel dalam jurnal dan working paper

- Alatas, Andi. "Trend Produksi dan Ekspor Minyak Sawit (CPO) Indonesia". *Jurnal Agraris*, 1(2), Juli 2015.
- Arianti, Reni K. dan Adrian D. Lubis. "Analisis Daya Saing dan Kesiapan Indonesia dalam Rangka Integrasi ASEAN: Studi Kasus Automotives, *Rubber Based*, dan *Agro Based Products*". *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(1), Juli 2011.
- Ermawati, Tuti dan Yeni Saptia. "Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia". *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 7(2), Desember 2013.
- Hagi, Hadi, S., dan Tety, E. "Analisis Daya Saing Ekspor Minyak Sawit Indonesia Dan Malaysia di Pasar Internasional", *Pekbis Jurnal*, 4(3), November 2012,
- Nauly, Dahlia. "Daya Saing Ekspor Produk Pertanian Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" 

Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka UTCC, 26 Agustus 2015.

Porter, Michael E. "The Competitive Advantage of Nations". *Harvard Business Review*, March-April 1990.

Y.A.D., Rashid A., Ni Made Suyastiri Y.P., dan Antik Suprihanti. "Analisis Daya Saing Crude Palm Oil (CPO) Indonesia di Pasar Internasional". *SEPA*, 9(1), September 2012.

Skripsi dan Tesis

Pratama, Willy. "Analisis Daya Saing Kedelai Indonesia". Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2015.

Tuarita, Nursin. "Langkah Strategis Kebijakan Indonesia dalam Menghadapi Implementasi AEC 2015 Periode 2004-2009". Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Politik, UPN Veteran Jakarta, 2010.

Laporan

Global Competitiveness Report 2015-2016.

Tulisan/Artikel dalam internet

Suroso, G. T. "Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomian Indonesia", (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/ artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi- asean-mea-dan-perekonomian-indonesia>, diakses 13 Juni 2016).

"Indonesia Membuat dalam Indeks Daya Saing Global 2014-2015 dari WEF". (<http://www.indonesia-investments.com/id/berita/ berita-hari-ini/indonesia-membuat-dalam-indeks-daya-saing->

global-2014-2015-dari-wef/item5983, diakses 3 Agustus 2016).

“Peran Strategis Kelapa Sawit”.
(<http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-213-peran-strategis-kelapa-sawit.html>, diakses 28 September 2016).

PERDAGANGAN MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA DI ERA

PERDAGANGAN BEBAS

Oleh: Venti Eka Satya

I. PENDAHULUAN

Sembilan cabang industri manufaktur di Tanah Air diprioritaskan untuk dikembangkan dan menjadi produk unggulan untuk bersaing dalam menghadapi Komunitas Ekonomi Asean (*Asean Economic Community/AEC*). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Anshari Bukhari menyatakan terdapat sembilan sektor industri yang akan terus dikembangkan dan menjadi

Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan lahan sawit terluas. Sekitar 51,6% dari 10,9 juta hektar lahan sawit di Indonesia dimiliki oleh perusahaan perkebunan swasta (besar), dan 41.5% dimiliki oleh perkebunan rakyat.

Minyak sawit merupakan minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Selain biaya produksi yang murah dan mudah, tingkat produksinya juga sangat stabil karena tanaman ini berproduksi sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Indonesia dan Malaysia saat ini merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Kedua negara ini menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia.

Kebutuhan dunia akan minyak sawit terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan kegunaanya yang sangat beragam. Minyak sawit dapat digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan juga bisa digunakan sebagai sumber *biofuel* atau *biodiesel*. Sebagian besar minyak sawit diproduksi di Asia, Afrika dan Amerika Selatan karena pohon kelapa sawit membutuhkan suhu hangat, sinar matahari, dan curah hujan tinggi untuk memaksimalkan produksinya.² Agar produk industri berbasis agro Indonesia, terutama minyak sawit, lebih berdaya saing, maka pemerintah harus memberi sentuhan atau keberpihakan dan intervensi terhadap industri tersebut. Keberpihakan itu di antaranya dengan memperkuat infrastruktur dan rekayasa mengingat saat ini mayoritas potensi pengembangan industri berbasis agro justru di luar Jawa.

² http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak_sawit/item166, diakses 10 Agustus 2016.

Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, minyak sawit memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Pertumbuhan produksi minyak ini cukup pesat jika dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya. Pada tahun 2004, nilai ekspor CPO Indonesia ke dunia sebesar USD 1,06 miliar atau 1,74% dari total ekspor Indonesia, dan terus mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 2012 menjadi USD 8,42 miliar atau 4,43% dari total ekspor Indonesia. Nilai ekspor PKO (*palm kernel oil*) Indonesia ke dunia pada tahun 2004 sebesar USD 385 juta atau sebesar 0,53% dari total ekspor produk Indonesia, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2011 nilai ekspornya menjadi USD 1,64 miliar atau sebesar 0,80% dari total ekspor Indonesia.³ Peningkatan ekspor ini tidak terlepas dari peningkatan produktivitas minyak sawit yang cukup tinggi.

Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai produsen minyak sawit, disamping iklimnya yang sesuai, luas lahan pertanian di Indonesia serta jumlah tenaga kerja juga cukup memadai untuk mengembangkan perkebunan dan industri minyak sawit. Selain itu Indonesia juga diprediksi akan menjadi negara pengkonsumsi minyak sawit terbesar di dunia. Industri hilir minyak sawit Indonesia terus meningkat. Diantara industri hilir yang paling banyak menyerap minyak sawit adalah *biodiesel* dan *oleokimia* yang menyerap jutaan ton CPO dan PKO sebagai bahan baku. Indonesia

³ UN Comtrade. (2003-2012). *Trade Flow*. 2013 dari <http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults>, Diunduh tanggal 1 s.d 15 September, dalam Tuti Ermawati, Yeni Saptia, Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.7 No.2, Desember 2013

bisa menjadi negara konsumen CPO terbesar. Itu tergantung dari kebijakan *mandatory biodiesel* untuk digunakan di dalam negeri. Saat ini, sebaran pasardomestik terhadap produk ini sebagian besar terserap untuk bahan makanan dan sisanya untuk industri.

Saat ini ekspor produk turunan minyak sawit Indonesia terus meningkat secara gradual seiring dengan meningkatnya permintaan produk-produk turunan minyak sawit. Pesaing utama Indonesia sebagai produsen sawit adalah Malaysia. Dengan adanya perdagangan bebas baik regional maupun global diharapkan ekspor minyak sawit Indonesia akan meningkat. Dengan meningkatnya inovasi industri hilir minyak sawit dan semakin terbukanya pasar dengan perdagangan bebas diharapkan permintaan akan produk-produk turunan minyak sawit akan meningkat dan berkembang.

II. PERDAGANGAN BEBAS

FTA (*free trade agreement*) merupakan perjanjian antar dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas dimana perdagangan barang atau jasa diantara mereka dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau hambatan non tarif.⁴ FTA dilakukan karena keuntungan yang diperoleh oleh negara-negara yang terlibat dari perdagangan ini, didasarkan pada konsep keuntungan komparatif. Sebuah negara akan mengkhususkan dirinya untuk menghasilkan suatu produk jika memiliki keuntungan komparatif. Melalui pengkhususan ini, secara umum dunia dapat mengembangkan keluaran totalnya (*total world output*) dengan jumlah sumber daya yang sama, dan pada saat yang sama efisiensi ekonomi akan terus meningkat. Hasilnya, secara

⁴ <http://www.kemendag.go.id/id/faq>, diakses 4 Agustus 2016.

teoritis, sebuah FTA dapat menjamin bahwa negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan ini, akan memperoleh keuntungan dari hasil terbentuknya perdagangan (*trade creation*) dan pengalihan dagang (*trade diversion*).⁵

Kerjasama ekonomi di bidang perdagangan internasional saat ini mengarah kepada pembentukan kerjasama guna mewujudkan integrasi ekonomi dan keuangan secara regional. Teori integrasi ekonomi mengacu kepada suatu kebijakan komersial atau kebijakan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan hanya diantara negara-negara yang saling sepakat untuk membentuk suatu integrasi ekonomi terbatas.

Teori integrasi ekonomi yang pertama kali dipublikasikan oleh Bela Balassa menyatakan bahwa terdapat lima tahapan Integrasi Ekonomi:⁶

1. Pengaturan Perdagangan Preferensial (*Preferential Trade Arrangements*)
2. Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*)
3. Persekutuan Pabean (*Customs Union*)
4. Pasaran Bersama (*Common Market*)
5. Uni Ekonomi (*Economic Union*)

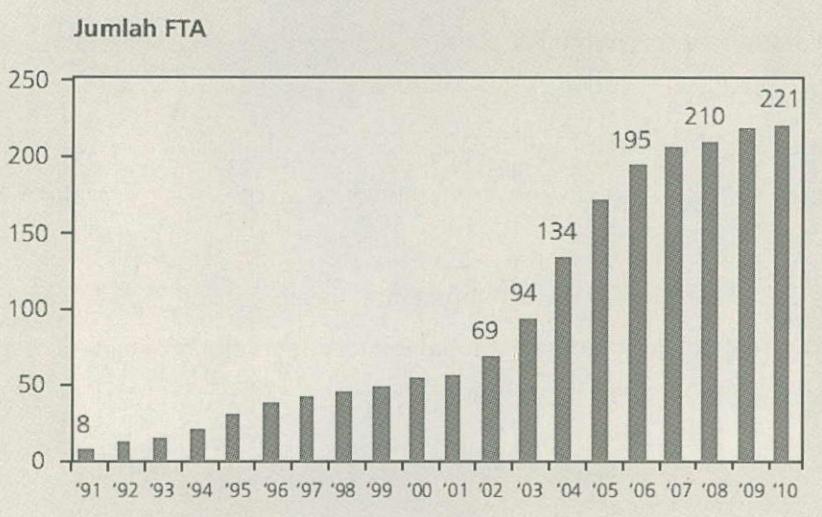
Di era globalisasi ini FTA telah menjadi tren baru, banyak negara-negara yang mengadakan FTA baik bilateral maupun

⁵ Amalia Adininggar Widyasanti, *Perdagangan Bebas Regional Dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2010, hal. 6.

⁶ K. Dianta A. Sebayang: Dampak Integrasi Ekonomi ASEAN Terhadap Perdagangan Indonesia Pada Sektor Kendaraan Roda Empat, Jurnal EconoSains, Volume IX, Nomor 2, Agustus 2011, hal. 120.

multilateral, seperti perjanjian dagang regional. Sejak tahun 2002 jumlah FTA menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, seperti terlihat pada Grafik I. Dan pada tahun 2015, jumlah negara di dunia yang terlibat dalam FTA sudah mencapai 157 negara.

Grafik. 1 Perkembangan Jumlah *Free Trade Agreement* di Dunia



Sumber: ADB, diolah, 2011

Diakui secara luas, argumen yang paling mendukung dalam integrasi regional adalah manfaat memperluas pasar dan mempromosikan kompetisi dengan menghilangkan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota. Kesejahteraan ekonomi meningkat ketika sumber daya yang sebelumnya dipakai dalam produksi dalam negeri yang mahal karena faktor efisiensi, dialokasikan kembali ke arah keuntungan komparatif negara dan menghasilkan produktivitas yang lebih besar (efek penciptaan perdagangan). Perluasan pasar regional juga dapat dilihat oleh negara-negara di luar kawasan sebagai

peningkatan peluang perdagangan. Namun, integrasi regional juga memiliki potensi risiko. *Pertama*, dapat menimbulkan kerugian kesejahteraan jika "efek penciptaan perdagangan" dibayangi oleh "efek pengalihan perdagangan", yaitu jika penghapusan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota menyebabkan perdagangan lebih efisien dengan negara-negara non-anggota dibandingkan jika dialihkan ke negara anggota yang kurang efisien. *Kedua*, akan menyebabkan "pengalihan efek investasi" dimana investasi sumber daya yang terbatas dialihkan ke pasar terpadu dengan skala yang lebih besar. *Ketiga*, ada kekhawatiran terhadap "efek mangkuk mie" (*noodle bowl effect*), mengacu pada potensi masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari kurangnya koherensi antara perbedaan perjanjian yang tumpang tindih.⁷

A. Minyak Sawit Indonesia di Era Perdagangan Bebas

Regionalisme telah menjadi fitur yang menonjol dari sistem perdagangan global untuk beberapa tahun belakangan, sebagian terjadi karena relatif lebih lambat proses negosiasi perdagangan multilateral yang telah dilakukan di bawah Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT)/*World Trade Organization* (WTO). Baru-baru ini banyak muncul perjanjian perdagangan regional (RTAs) dan bentuk-bentuk kerjasama regional. Hal ini dipicu oleh integrasi pasar Uni Eropa (UE) yang sejauh ini merupakan contoh integrasi ekonomi regional yang paling sukses. UE telah menarik perhatian negara-negara lain sehingga terdorong untuk memperkuat hubungan mereka dengan negara-negara lain yang

⁷ Patrizia Tumbarello, *Are Regional Trade Agreements in Asia Stumbling or Building Blocks? Implications for the Mekong-3 Countries*, IMF Working Paper WP/07/53, March 2007, International Monetary Fund.

memberikan manfaat ekonomi menuju integrasi regional. Ada beberapa FTA yang melibatkan Indonesia baik dalam kerangka bilateral maupun regional yaitu Indonesia-Jepang (IJ-EPA), ASEAN-China, ASEAN-FTA (CEPT-AFTA), ASEAN-Korea, ASEAN-India dan ASEAN-Australia-New Zealand.⁸

Indonesia telah banyak terlibat dalam berbagai perjanjian dagang. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 8 perjanjian yang sudah berjalan, dan 7 perjanjian yang masih dalam tahap negosiasi atau studi lanjut.

IJ-EPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJ-EPA*) ditanda tangani pada tanggal 20 Agustus 2007. Perjanjian dagang ini merupakan perjanjian bilateral yang pertama bagi Indonesia dan menempatkan Indonesia sejajar dengan Negara pesaing di pasar Jepang, terutama yang sudah memiliki perjanjian EPA dengan Jepang. Unsur-unsur utama dalam Perjanjian IJ-EPA meliputi beberapa sector yaitu: *Trade in Goods, Investment, Trade in Services, Movement of Natural Persons, Intellectual Property Rights, Cooperation, Competition Policy, Energy and Mineral Resources, Government Procurement, Custom Procedures, Improvement of Business Environment, Dispute Avoidance and Settlement*.

IJ-EPA mencakup lingkup yang luas dengan tujuan mempererat kemitraan ekonomi diantara kedua negara, termasuk kerjasama di bidang *capacity building*, liberalisasi, peningkatan perdagangan dan investasi yang ditujukan pada peningkatan arus barang di lintas batas, investasi dan jasa, pergerakan tenaga kerja diantara kedua Negara dan perdagangan. Bagi Indonesia, IJ-EPA merupakan komplementer untuk kerjasama regional seperti ASEAN

⁸ <http://www.kemendag.go.id/id/faq>, diakses 4 Agustus 2016

plus, APEC dan WTO Putaran Pembangunan Doha. IJ-EPA akan memberikan peningkatan ekspor produk dan jasa Indonesia, peningkatan investasi Jepang, serta peningkatan kemampuan industri Indonesia.

Gagasan perdagangan bebas regional ASEAN-Cina sesungguhnya sudah mulai dirundingkan sejak tahun 2003. Untuk merealisasikannya, maka pada 4 November 2004 ditandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the ASEAN and PRC* oleh para kepala negara/kepala pemerintahan ASEAN dan China, di Phnom Penh, Vietnam. Selanjutnya, pada 24 November 2004 ditandatangani kesepakatan ACFTA di bidang barang, dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bidang perdagangan jasa yang disahkan pada 14 Januari 2007 dan kesepakatan di bidang investasi yang disahkan pada 15 Oktober 2009. Sebagai sebuah kawasan perdagangan bebas, ACFTA bisa dikatakan merupakan region perdagangan bebas terbesar ketiga di dunia setelah Uni Eropa (dengan 491 juta jiwa penduduk dan total PDB sebesar 14,38 triliun dollar AS) dan Amerika Utara (dengan 455 juta penduduk dan total PDB sebesar 15,85 triliun dollar AS). Dengan kata lain, kawasan perdagangan bebas ASEAN-Cina adalah pasar potensial, yang mengombinasikan 1,9 miliar penduduk, dengan total PDB 6,6 triliun dollar AS, dan nilai perdagangan mencapai 4,3 triliun dollar AS.⁹ Skema perdagangan ini telah berhasil meningkatkan total perdagangan ASEAN-China. China merupakan mitra dagang terbesar ASEAN dengan total perdagangan sebesar USD 346,4 miliar atau setara dengan 15,2% dari nilai total perdagangan ASEAN pada tahun

⁹ Redaksi, *ACFTA dan Ancaman Kedaulatan*, Jurnal Sosial Demokrasi, Vol. 8/3/Februari-Juni 2010, hal. 5-6.

2015. Untuk sektor investasi pada tahun 2015, ASEAN menerima investasi asing langsung sebesar USD 8,2 miliar dari China. Hal tersebut menempatkan China sebagai investor terbesar ke-4 dari total investasi ASEAN.

Pada tanggal 1 Januari 2003 diberlakukan Perdagangan bebas AFTA yang diikuti oleh enam negara anggota lama ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Liberalisasi perdagangan AFTA akan menyebabkan semakin terbukanya pasar di semua negara anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN telah membuat kemajuan yang signifikan dalam menurunkan tarif intra-regional melalui skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) untuk AFTA. Lebih dari 99 persen dari produk-produk yang tergolong dalam CEPT Inclusion List (IL) dari ASEAN-6, telah mengalami penurunan tarif diantara 0-5 persen. Impor dari negara-negara ASEAN-6 telah meningkat seiring dengan diturunkannya tarif impor di ASEAN-6. Dengan adanya AFTA, Daya Saing Ekspor Indonesia di pasar ASEAN secara umum mengalami peningkatan.

ASEAN juga melakukan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Korea Selatan dalam *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA). AKFTA dibentuk melalui *Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership* dan disahkan di Vientiane, Laos tahun 2004. *Preferential Treatment* AKFTA berupa sektor barang, jasa-jasa, dan investasi. Total perdagangan ASEAN-Korea FTA mencapai 134,9 juta USD. Hal ini menunjukan perdagangan di kawasan ASEAN dengan Korea Selatan memiliki dampak yang positif berupa peningkatan volume perdagangan dan kesejahteraan masyarakat. Selain dampak tersebut, kerja sama AKFTA akan

memberikan kontribusi positif berupa peningkatan investasi langsung/*Foreign Direct Investment*, kualitas produk domestik di kawasan ASEAN serta daya saing.

Pada kerangka kerja sama ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Agreement* (AANZFTA), total nilai perdagangan dengan Australia dan Selandia Baru sebesar USD 60,3 miliar atau 2,6% dari total perdagangan ASEAN. Investasi asing langsung dari Australia dan Selandia Baru mencapai USD 7,4 miliar atau setara dengan 6,2% dari total investasi di ASEAN pada tahun 2015. Total perdagangan dengan Selandia Baru, mencapai USD 8,5 miliar, dengan nilai investasi asing langsung sebesar USD 2,2 miliar. Sedangkan total nilai perdagangan dengan Australia sebesar 51,8 miliar dan total investasi asing langsung sebesar 5,2 miliar pada tahun 2015. Australia merupakan mitra terbesar ke-7 bagi ASEAN.

Dengan adanya perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral, hambatan perdagangan terutama dalam hal ekspor minyak kelapa sawit akan dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Dengan demikian volume ekspor akan meningkat karena dengan adanya perdagangan bebas tarif biaya masuk ke negara tujuan akan turun atau bahkan ditiadakan, hal ini tentu saja akan berdampak pada harga. Indonesia perlu melakukan perjanjian perdagangan dengan negara-negara pengimpor utama sawit Indonesia seperti India, China, Belanda dan Pakistan.

B. Dampak Integrasi Ekonomi ASEAN Terhadap Perdagangan

Minyak Sawit Indonesia

Paling tidak terdapat tiga gelombang integrasi regional sejak *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) disepakati pada tahun 1947. Gelombang pertama adalah integrasi regional Eropa di tahun 70-an yang menempatkan Eropa sebagai aktor utama dalam perdagangan global. Gelombang kedua dipicu oleh ketidakpuasan Amerika terhadap prinsip non diskriminasi dalam GATT yang bermuara pada pembentukan *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) di awal era 90-an. Gelombang ketiga adalah diinisiasi oleh negara-negara Asia dengan memperkenalkan preferensi tarif seperti *Economic Cooperation Organization* (ECO), *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC), dan *Association of South-East Asian Nation* (ASEAN).¹⁰

Manfaat utama dari integrasi ekonomi yang mendorong integrasi regional berkembang secara global baik di Amerika maupun Asia adalah ekonomi. Integrasi ekonomi akan mendorong ekonomi melalui dua jalur: ukuran integrasi ekonomi dan realokasi sumber daya ekonomi. Integrasi ekonomi di suatu kawasan akan menghasilkan beberapa manfaat bagi negara yang melakukan integrasi. Manfaat yang akan dirasakan diantaranya: 1) mendorong berkembangnya industri lokal; 2) peningkatan perdagangan melalui perbaikan *term of trade*; serta 3) mendorong efisiensi ekonomi di suatu kawasan ditujukan untuk alokasi sumber daya yang lebih

¹⁰ Pomfret, R, *Sequencing Regional Integration in Asia*, In Advanced Research in Asian Economic Studies Vol.3: *International Economic Integration and Asia*. Michael G. Plummer dan Erik Jones (eds).New Jersey: 2006, World Scientific. Hal. 63-64

efisien, mendorong persaingan, dan meningkatkan skala ekonomi dalam produksi dan distribusi diantara negara anggota.¹¹

ASEAN telah menerapkan ASEAN *Free Trade Agreement* (AFTA) sejak tahun 1991. Tujuan AFTA ini adalah untuk menghilangkan ~~hambatan~~ perdagangan berupa tarif antar sesama anggota ASEAN. Selanjutnya penerapan ASEAN *Single Window* (ASW) pada tahun 2013 yang bertujuan untuk mengintegrasikan sistem Bea dan Cukai di seluruh kawasan ASEAN.¹² Dengan penerapan AEC pada tahun 2015 maka pada dasarnya ASEAN telah melaksanakan *common market* dan *economic union* pada saat yang bersamaan.

Negara-negara ASEAN sebagian besar merupakan negara agraris dengan kondisi iklim dan alam yang relatif sama. Tanaman sawit bisa tumbuh hampir di semua negara ASEAN. Keberadaan MEA tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perdagangan minyak sawit Indonesia. Negara ASEAN yang menjadi pengimpor minyak sawit Indonesia hanyalah Malaysia dan Singapura. Singapura meskipun termasuk dalam lima besar pengimpor minyak sawit Indonesia, akan tetapi *sharenya* pada tahun 2013 hanya sekitar 0,04 persen dari total eksport sawit Indonesia. Untuk itu pasar bebas ASEAN tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perdagangan sawit Indonesia.

¹¹ Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, *Laporan Dampak Asean Economic Community terhadap Sektor Industri Jasa, serta Tenaga Kerja di Indonesia*, Jakarta: 2014, hal. 4.

¹² Almonte, L. (2013). *ASEAN Single Window Takes Regional Grouping Closer to Integration*. Diakses pada 5 November 2014 di <http://www.portcalls.com/asean-single-window-takes-regional-grouping-closer-to-integration>

III. SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA SEBAGAI PRODUK AGRO UNGGULAN INDONESIA

Agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan/atau peternakan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.¹³ Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi agro yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Saat Kelapa sawit telah menjadi komoditas ekspor yang cukup penting sebagai penghasil devisa Indonesia sesudah minyak dan gas. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas industri agro yang sangat penting disebabkan oleh kemampuannya yang tinggi untuk menghasilkan minyak nabati yang dibutuhkan di berbagai sektor industri. Tumbuhan ini adalah penghasil minyak nabati terbesar di dunia.

A. Perkembangan Perkebunan dan Produksi Kelapa Sawit Indonesia

Sejak tahun 2009 luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia cenderung menunjukkan peningkatan, naik sekitar 3,27 s.d. 11,33 persen per tahun. Pada tahun 2009 lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 7,95 juta hektar, meningkat menjadi 10,46 juta hektar pada tahun 2013. Pada tahun 2014 luas areal perkebunan kelapa sawit masih meningkat sebesar 4,69 persen dari tahun 2013 menjadi 10,96 juta hektar dan di tahun 2015

¹³ Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/Ot.140/7/2008 Tentang Syarat Dan Tatacara Verifikasi Sarana Dan/Atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif

meningkat sebesar 4,46 persen menjadi 11,44 juta hektar. Selama periode tahun 2009-2015 areal perkebunan kelapa sawit tersebar di 24 provinsi yakni seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat. Dari ke 24 provinsi tersebut, Provinsi Riau merupakan provinsi dengan areal perkebunan kelapa sawit yang terluas di Indonesia yakni 2,19 juta hektar pada tahun 2013 atau 20,96 persen dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pada tahun 2014 luas areal luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau diperkirakan sebesar 2,30 juta hektar.¹⁴

Tabel 1 Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Menurut Provinsi dan Status Pengusahaan Tahun 2013-2015

No.	Wilayah	Perkebunan Rakyat Smallholder		Perkebunan Negara		Perkebunan Swasta		Jumlah	
		Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)
1	Sumatera (2013)	3.406.793	8.484.493	549.059	1.703.419	2.726.376	9.044.385	6.682.228	19.232.296
2	Jawa (2013)	7.991	10.287	20.069	43.564	5.652	5.869	33.712	59.720
3	Nusa Tenggara dan Bali (2013)								
4	Kalimantan (2013)	745.710	1.177.770	132.469	347.138	2.428.344	6.155.240	3.306.523	7.680.148
5	Sulawesi (2013)	152.067	280.924	11.284	18.168	155.529	348.815	318.880	647.907
6	Maluku dan Papua (2013)	43.526	57.254	14.886	32.362	65.265	72.316	123.677	161.932
	Indonesia 2013	4.356.087	10.010.728	727.767	2.144.651	5.381.166	15.626.625	10.465.020	27.782.003
	Indonesia 2014 *)	4.551.854	10.683.286	748.272	2.156.294	5.656.105	16.504.899	10.956.231	29.344.479
	Indonesia 2015**)	4.739.986	11.312.640	769.357	2.201.634	5.935.465	17.434.658	11.444.808	30.948.932

Sumber: BPS, 2015.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2014*, BPS, Jakarta: 2015, hal. 5-6.

Sebagian besar perkebunan kelapa sawit pada tahun 2013 diusahakan oleh perkebunan besar swasta yakni 51,42 persen atau 5,38 juta hektar, sementara perkebunan rakyat mengusahakan 41,63 persen atau 4,36 juta hektar dan hanya 6,95 persen atau 0,72 juta hektar yang diusahakan oleh perkebunan besar negara. Pada tahun 2014 perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh perkebunan besar swasta diperkirakan sebesar 51,62 persen atau 5,66 juta hektar, sementara perkebunan rakyat mengusahakan 41,55 persen atau 4,55 juta hektar dan hanya 6,83 persen atau 0,75 juta hektar yang diusahakan oleh perkebunan besar negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah

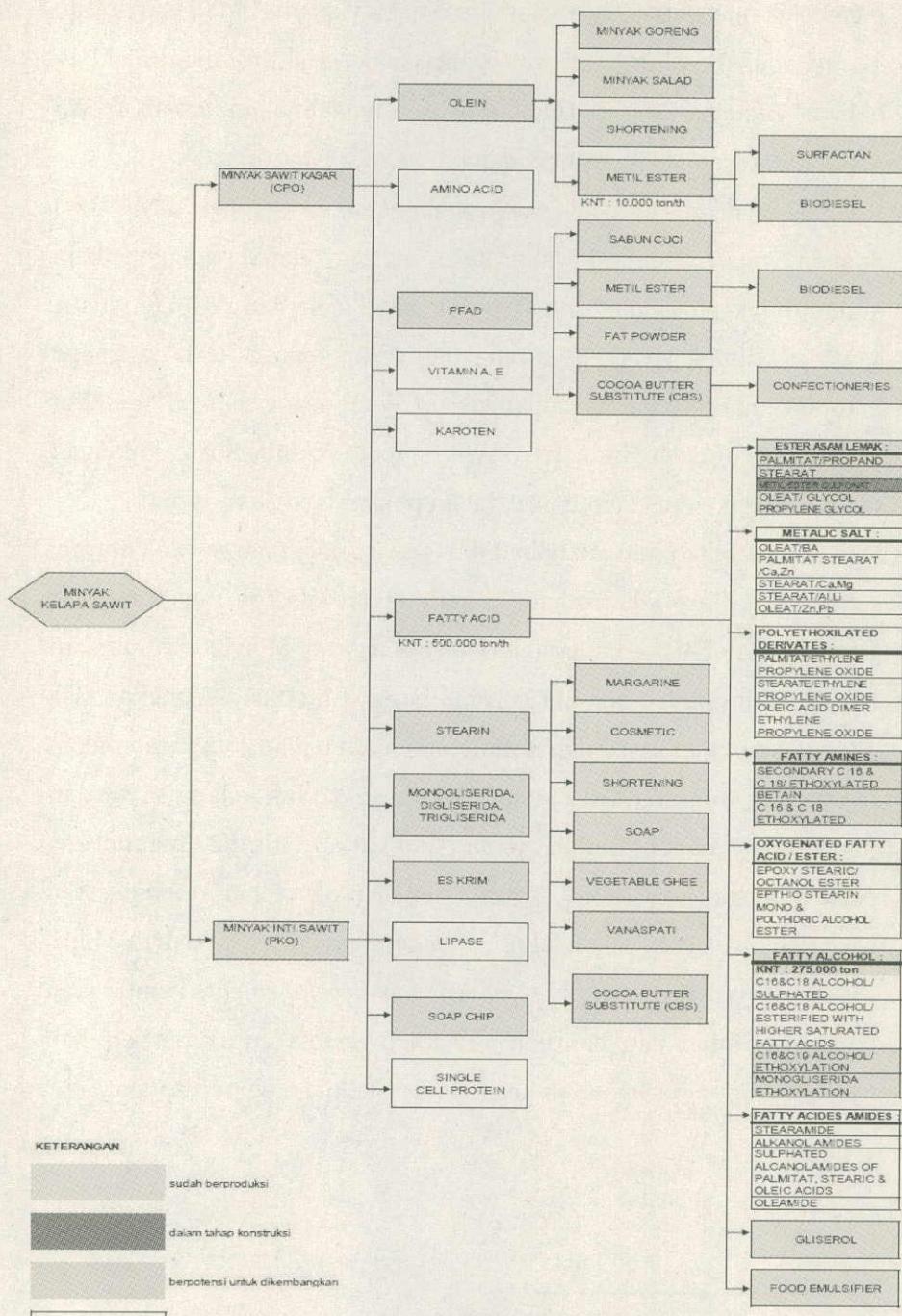
memerlukan sekitar 8-10 kali lipat lahan sawit Indonesia untuk memproduksi volume minyak yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa industri sawit tidak boros menggunakan lahan serta produktivitasnya paling tinggi dan harga paling murah.

Mayoritas industri sawit menggunakan sumber daya lokal dengan *import contain* yang kecil, namun dapat menghasilkan komoditi ekspor yang sangat potensial. Tidak hanya itu, industri sawit ini dinilai strategis karena menyerap tenaga kerja langsung maupun tidak langsung sebanyak 21 juta orang.¹⁵ Hal tersebut menunjukkan jika industri sawit dapat memberikan lapangan pekerjaan sekaligus membantu dalam pengentasan kemiskinan.

Kelebihan minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi. Minyak sawit juga diolah menjadi bahan baku margarin. Minyak inti menjadi bahan baku minyak alkohol dan industri kosmetika. Sedangkan sisa pengolahan buah sawit dapat diolah menjadi bahan campuran pakan ternak dan difermentasi menjadi kompos. Produk kelapa sawit dan turunannya dapat dilihat pada Gambar 1. Untuk mendorong perkembangan produksi sawit pemerintah telah memberikan berbagai insentif melalui pengembangan industri hilir, mengembangkan program *research and developement*, kemudahan dalam perijinan dan bantuan subsidi investasi untuk perkebunan rakyat maupun perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan.

¹⁵ <http://www.mongabay.co.id/2016/04/26/buruh-tak-sejahtera-praktik-gelap-dibalik-gemerlap-kebun-sawit/>

Gambar 1. Pohon Industri Turunan Kelapa Sawit (CPO)



Sumber: Kementerian Perindustrian, 2016.

Manfaat lain dari minyak kelapa sawit antara lain:

- a. Sebagai bahan bakar alternatif biodiesel
- b. Sebagai nutrisi pakanan ternak (cangkang hasil pengolahan)
- c. Sebagai bahan pupuk kompos (cangkang hasil pengolahan)
- d. Sebagai bahan dasar industri lainnya (industri sabun, industri kosmetik, industri makanan)
- e. Sebagai obat karena kandungan minyak nabati berprospek tinggi
- f. Sebagai bahan pembuat *particle board* (batang dan pelepas).¹⁶

Pada tahun 2014 (Tabel 2), jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit berjumlah 1601 perusahaan yang tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Dari 1601 perusahaan tersebut, 159 perusahaan di antaranya merupakan perkebunan besar negara dan 1442 perusahaan merupakan perkebunan besar swasta. Persebaran perusahaan perkebunan kelapa sawit menurut pulau, sebanyak 63 persen perusahaan perkebunan kelapa sawit berada di Pulau Sumatera, sebanyak 33 persen perusahaan perkebunan berada di Pulau Kalimantan, sedangkan sisanya berada di Pulau Sulawesi, Jawa, Maluku, dan Papua. Jumlah perusahaan perkebunan terbanyak berada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 332 perusahaan dan Provinsi Riau sebanyak 192 perusahaan.¹⁷ Kapasitas penyulingan di Indonesia telah meningkat menjadi 45 juta ton per tahun pada akhir 2014, naik dari 30,7 juta ton pada 2013, dan lebih dari dua kali lipat kapasitas di tahun 2012 yaitu 21,3 juta ton.

¹⁶ Pusat Data dan Informasi, Departemen Perindustrian, *Gambaran Sekilas Industri Minyak Kelapa Sawit*, Jakarta: 2007, hal. 21.

¹⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2014*, Jakarta: 2015, hal. 3-5.

Tabel 2. Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Provinsi dan Jenis Perkebunan Besar Tahun 2014

No.	Provinsi	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta	Jumlah
1	Aceh	9	78	87
2	Sumatera Utara	83	249	332
3	Sumatera Barat	3	36	39
4	Riau	18	174	192
5	Jambi	7	83	90
6	Sumatera Selatan	9	126	135
7	Bengkulu	2	55	57
8	Lampung	4	29	33
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	39	39
10	Kepulauan Riau	0	3	3
11	DKI Jakarta	0	0	0
12	Jawa Barat	3	1	4
13	Jawa Tengah	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0
16	Banten	4	1	5
17	Bali	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0
20	Kalimantan Barat	5	172	177
21	Kalimantan Tengah	1	141	142
22	Kalimantan Selatan	3	81	84
23	Kalimantan Timur	3	110	113
24	Kalimantan Utara	0	19	19
25	Sulawesi Utara	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	14	14
27	Sulawesi Selatan	2	0	2
28	Sulawesi Tenggara	1	10	11
29	Gorontalo	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	9	9
31	Maluku	0	4	4
32	Maluku Utara	0	0	0
33	Papua Barat	1	2	3
34	Papua	1	6	7
	Indonesia	159	1442	1601

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015.

IV. PROSPEK PERDAGANGAN KELAPA SAWIT DI ERA PERDAGANGAN BEBAS DUNIA

Teori tradisional perdagangan didasarkan kepada perbedaan dalam produktivitas antar negara, sementara teori perdagangan baru dan ekonomi geografi lebih menekankan kepada produksi, anglomerasi, dan konsentrasi aktivitas di daerah atau wilayah tertentu. Teori tradisional perdagangan menyatakan bahwa setiap negara memiliki keunggulan.. komparatif. (*comparative advantage*) apabila dibandingkan dengan negara lain. Dengan adanya liberalisasi perdagangan, maka akan mengakibatkan realokasi produksi dan spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing negara. Di sisi lain, teori baru perdagangan menekankan kepada hubungan antar perusahaan untuk menerangkan adanya *increasing return* dalam pasar barang dan keuntungan geografis untuk akses ke pasar. Pada saat liberalisasi pasar terjadi, aktivitas produksi yang bersifat *increasing return* akan berada di daerah yang memiliki akses yang bagus ke pasar.¹⁸

Terkait dengan ekspor, dalam teori perdagangan internasional disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, nilai tukar riil, pendapatan dunia dan kebijakan devaluasi. Sementara dari sisi penawaran, ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, harga domestik,

¹⁸ Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, *Laporan Dampak Asean Economic Community terhadap Sektor Industri Jasa, serta Tenaga Kerja di Indonesia*, Jakarta: 2014, hal. 6-7.

nilai tukar riil, kapasitas produksi yang bisa diproyeksikan melalui investasi, impor bahan baku, dan kebijakan deregulasi.¹⁹

A. Perdagangan Produk Kelapa Sawit Indonesia

Selain peluang ekspor yang semakin terbuka, pasar minyak sawit dan minyak inti sawit di dalam negeri masih cukup besar. Pasar potensial yang akan menyerap pemasaran minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) adalah industri *fraksinasi/ranifikasi* (terutama industri minyak goreng), lemak khusus (*cocoa butter substitute*), *margarine/shortening*, *oleochemical*, dan sabun mandi.

Lima faktor yang mempengaruhi harga minyak kelapa sawit adalah:²⁰

- (1) *supply & demand*
 - (2) *prices of competing vegetable oils*
 - (3) cuaca
 - (4) kebijakan impor negara-negara yang mengimpor minyak kelapa sawit
 - (5) perubahan dalam kebijakan pajak dan pungutan ekspor/impor
- Pada dasarnya, negara-negara anggota ASEAN memproduksi jenis produk pertanian yang hampir sama karena mempunyai kondisi iklim dan budaya yang hampir sama. Oleh karena itu, manfaat perdagangan bebas yang akan diperoleh tergantung kepada daya

¹⁹ A. Husni Malian, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Produk Pertanian dan Produk Industri Pertanian Indonesia : Pendekatan Macroeconometric Models dengan Path Analysis*, Jurnal Agro Ekonomi Volume 21 No. 2 Oktober 2003: 97 – 121, hal. 100.

²⁰ <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166>, diakses tanggal 6 Agustus 2016

saing produk pertanian negara-negara ASEAN itu sendiri. Produk yang mempunyai daya saing tinggi akan mampu eksis dan terus berkembang sehingga ekspor negara-negara ASEAN ke kawasan ASEAN sendiri akan makin besar yang selanjutnya akan dapat mendorong produksi dalam negeri serta meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja dan devisa negara. Agroindustri yang mengolah produk ekspor diperkirakan juga akan berkembang makin pesat. Sebaliknya, produk atau kelompok produk pertanian yang daya saingnya rendah akan terancam eksistensinya sehingga produksi dalam negeri dan pendapatan petani negara-negara ASEAN akan menurun.²¹

Indonesia selama ini berfokus pada ekspor minyak sawit mentah. Untuk meningkatkan nilai minyak sawit, pemerintah telah mengubah prioritasnya kepada mengolah produk-produknya supaya memiliki harga jual yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan perkembangan di industri hilir, pajak ekspor untuk produk minyak sawit yang telah disuling telah dipotong dalam beberapa tahun belakangan ini. Sementara itu, bea keluar minyak sawit mentah (CPO) berada di antara 0%-22,5% tergantung pada harga minyak sawit internasional. Indonesia memiliki 'mekanisme otomatis' sehingga ketika harga CPO acuan Pemerintah (berdasarkan harga CPO lokal dan internasional) jatuh di bawah 750 dollar Amerika Serikat (AS) per metrik ton, pajak ekspor dipotong menjadi 0%. Karena harga acuan ini jatuh di bawah 750 dollar AS per metrik

²¹ Prajogo u. Hadidan Sudimardianto, *Analisis Komparasi Daya Saing Produk Ekspor Pertanian Antar Negara Asean Dalam Era Perdagangan Bebas AFTA*, Jurnal Agro Ekonomi, volume 22 no.1, Mei 2004: 46 - 73.

ton di September 2013, Indonesia telah menetapkan pajak ekspor CPO 0% sejak Oktober 2014.²²

B. Prospek Perdagangan Kelapa Sawit di Era Perdagangan Bebas

Permintaan dunia akan minyak sawit menunjukkan kecenderungan untuk meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi dunia yang mengakibatkan meningkatnya konsumsi produk-produk dengan bahan baku minyak sawit. Target jangka panjang Indonesia mulai tahun 2020 Indonesia akan memproduksi 40 juta ton CPO per tahun. Saat ini sebagian besar produksi minyak kelapa sawit Indonesia adalah untuk komoditi ekspor. Negara-negara tujuan ekspor utamanya adalah RRT, India, Malaysia, Singapura, dan Belanda.

Dalam beberapa tahun terakhir harga minyak sawit mengalami penurunan tajam. Pada awal era 2000an, harga minyak sawit naik tajam terutama setelah tahun 2005. Krisis global telah menyebabkan harga CPO turun tajam di tahun 2008. Pada tahun 2011 harga CPO kembali menguat, akan tetapi volume ekspor Indonesia menurun, hal ini terutama dikarenakan menurunnya permintaan dari RRT. Sejak pertengahan 2014 pemintaan akan minyak sawit kembali menurun karena rendahnya harga minyak mentah yang mengakibatkan berkurangnya permintaan *biofuel* berbahan baku minyak sawit. Karena itu, prospek industri minyak sawit suram dalam jangka waktu pendek, terutama karena Indonesia masih

²² <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166>, diakses 29 Agustus 2016.

terlalu bergantung pada CPO dibandingkan produk-produk minyak sawit olahan.²³

Untuk meningkatkan kinerja ekspor minyak sawit, Indonesia perlu mengevaluasi pasar tujuan ekspornya. Untuk memaksimalkan ekspor, Indonesia harus segera mengambil keputusan untuk masuk, mempertahankan atau keluar dari pasar ekspor tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor minyak sawit Indonesia ke beberapa negara perlu dianalisa. Hasil penelitian Andi Alatas²⁴ menunjukkan bahwa peningkatan jumlah produksi CPO Indonesia berpengaruh terhadap peningkatan volume ekspor CPO ke beberapa negara pengimpor utama. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor CPO Indonesia ke negara-negara pengimpor CPO utama (RRT, India, dan Belanda) adalah: harga internasional, nilai tukar rupiah, pendapatan perkapita, jumlah penduduk, harga substitusi, harga CPO domestik, tren, serta pendapatan negara. Minyak sawit (CPO) Indonesia memiliki keunggulan komperatif yang lebih tinggi daripada negara-negara penghasil CPO di dunia. Hal ini ditunjukan dengan adanya nilai RCA (*Revealed Comparative Advantage*) yang diatas 1, yang artinya pangsa komoditas CPO Indonesia lebih besar dari pangsa pasar ekspor komoditas CPO dari seluruh dunia.

Selain Indonesia, negara lain yang menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia antara lain Malaysia, Thailand, Nigeria, dan Colombia. Pada tahun 2011, Indonesia mampu menghasilkan 23.900 ribu ton atau 40,27% dari total produksi minyak sawit dunia sebesar 50.894 ribu ton, sementara Malaysia 40,26%, Thailand 2,78%,

²³ <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166>, diakses, 29 Agustus 2016.

²⁴ Andi Alatas, *Trend Produksi dan Ekspor Minyak Sawit (CPO) Indonesia*, Jurnal Agraris, Vol.1 No.2 Juli 2015

Nigeria 2,03%, dan Colombia 1,80%. Dengan tingkat produksi yang tidak terlalu jauh dari Indonesia, Malaysia sangat berpotensi menjadi pesaing utama Indonesia.²⁵

Berdasarkan hasil perhitungan indeks *Analisis Revealed Comparative Advantage* (RCA) dari 4 negara produsen utama minyak kelapa sawit dunia yang dilakukan oleh Tuti dan Yeni²⁶ menunjukkan bahwa negara yang memiliki kinerja ekspor tertinggi adalah Malaysia. Malaysia mempunyai daya saing yang cukup bagus dibandingkan dengan Indonesia, Colombia, dan Thailand. Dengan demikian meskipun perkebunan negara penghasil sawit terbesar, Indonesia dapat dikatakan masih belum optimal dalam memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimilikinya, terutama lahan yang luas, biaya tenaga kerja serta biaya input yang rendah. Sementara Malaysia yang areal perkebunan sawitnya terbatas mampu berekspansi dengan melakukan investasi-investasi di negara lain termasuk Indonesia. Thailand memiliki daya saing produk CPO yang lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun negara ini termasuk baru menyandang gelar sebagai negara pengekspor kelapa sawit setelah Indonesia dan Malaysia, namun kinerja ekspornya cukup baik.

Untuk mendorong hilirisasi minyak kelapa sawit di tanah air, pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagai upaya program hilirisasi industri kelapa sawit diduga

²⁵ Kementerian Pertanian *Statistik Pertanian 2012* 

menjadi salah satu penyebab turunnya daya saing ekspor CPO dan PKO. Dengan adanya penurunan ekspor tersebut diharapkan akan meningkatkan pasokan bahan baku CPO dan PKO dalam negeri, untuk diolah kembali sehingga dapat menghasilkan produk turunan CPO dan PKO dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Kedepannya diharapkan ekspor CPO dan PKO tidak lagi didominasi bahan mentah yang seperti selama ini terjadi, tetapi lebih pada produk turunan dari CPO dan PKO.

Indonesia harus bisa memanfaatkan *comparative advantage* yang dimilikinya untuk meningkatkan nilai ekspor produk kelapa sawit. Luasnya lahan perkebunan saja tidak mampu mempertahankan pertumbuhan ekspor. Minyak kelapa sawit harus diolah kembali menjadi berbagai produk turunan agar memiliki nilai tambahan yang jauh lebih tinggi. Dengan demikian, era perdangan bebas dapat dimanfaatkan secara maksimal, dimana produk-produk indonesia, terutama yang berbahan dasar kelapa sawit mampu merebut pangsa pasar regional mupun global.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Industri CPO merupakan industri berbasis agro yang masuk dalam sembilan industri manufaktur unggulan Indonesia. Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai produsen minyak sawit, disamping iklimnya yang sesuai, luas lahan pertanian di Indonesia serta jumlah tenaga kerja juga cukup memadai untuk mengembangkan perkebunan dan industri minyak sawit. Selain itu Indonesia juga diprediksi akan menjadi negara pengkonsumsi minyak sawit terbesar di dunia.

FTA telah menjadi tren baru dalam perdagangan dunia. Pada tahun 2015 jumlah negara yang terlibat FTA telah mencapai 157 negara. Argumen yang paling mendukung dalam integrasi regional adalah memperluas pasar dan mempromosikan kompetisi dengan menghilangkan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota. Kesejahteraan ekonomi meningkat ketika sumber daya yang sebelumnya dipakai dalam produksi dalam negeri yang mahal karena faktor efisiensi, dialokasikan kembali ke arah keuntungan komparatif negara dan menghasilkan produktivitas yang lebih besar (efek penciptaan perdagangan). Indonesia telah banyak terlibat dalam berbagai perjanjian dagang. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 8 perjanjian yang sudah berjalan, dan 7 perjanjian yang masih dalam tahap negosiasi atau studi lanjut.

Sejak tahun 2009 luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia cenderung menunjukkan peningkatan, naik sekitar 3,27 s.d. 11,33 persen per tahun. Jumlah produksi total perkebunan kelapa sawit Indonesia pada tahun 2013 adalah 27,78 juta ton

dengan produktivitas rata-rata per hektarnya sekitar 3,54 kg/ha. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 29,34 juta ton (angka sementara) dengan produktivitas rata-rata 3,57 kg/ha. Dan pada tahun 2015 diperkirakan jumlah produksi ini akan meningkat menjadi 30,94 juta ton dengan produktivitas 3,60 kg/ha. Meskipun saat ini pertumbuhan ekspor minyak sawit Indonesia mengalami penurunan, target industri minyak sawit Indonesia jangka panjang adalah memproduksi 40 juta ton CPO per tahun mulai dari tahun 2020 dengan area perkebunan seluas 13 juta hektar.

Pada tahun 2014 jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit berjumlah 1601 perusahaan yang tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Dari 1601 perusahaan tersebut, 159 perusahaan diantaranya merupakan perkebunan besar negara dan 1442 perusahaan merupakan perkebunan besar swasta.

Untuk meningkatkan nilai minyak sawit, pemerintah telah mengubah prioritasnya kepadahilirisasi produk kelapa sawit supaya memiliki harga jual yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan perkembangan di industri hilir, pajak ekspor untuk produk minyak sawit yang telah disuling telah dipotong dalam beberapa tahun belakangan ini. Sementara itu, pajak ekspor minyak sawit mentah (CPO) berada di antara 0%-22,5% tergantung pada harga minyak sawit internasional. Indonesia memiliki 'mekanisme otomatis' sehingga ketika harga CPO acuan Pemerintah (berdasarkan harga CPO lokal dan internasional) jatuh di bawah 750 dollar Amerika Serikat (AS) per metrik ton, pajak ekspor dipotong menjadi 0%.

Dibandingkan dengan negara-negara pengekspor sawit utama lainnya, Indonesia dapat dikatakan masih belum optimal dalam memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimilikinya,

terutama lahan yang luas, biaya tenaga kerja serta biaya input yang rendah. Sementara Malaysia yang areal perkebunan sawitnya terbatas mampu berekspansi dengan melakukan investasi-investasi di negara lain termasuk Indonesia. Thailand memiliki daya saing produk CPO yang lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun negara ini termasuk baru menyandang gelar sebagai negara pengekspor kelapa sawit setelah Indonesia dan Malaysia, namun kinerja eksportnya cukup baik.

B. Saran

Indonesia harus bisa memanfaatkan *competitive advantage* yang dimilikinya untuk meningkatkan nilai eksport produk kelapa sawit. Peningkatan produksi dan produktivitas industri minyak sawit perlu dilakukan dengan melakukan inovasi produk turunan minyak kelapa sawit.

Perlu adanya kebijakan pemerintah yang memihak untuk meningkatkan produksi dan penjualan minyak sawit baik di dalam maupun di luar negeri. Era perdagangan bebas perlu dimanfaatkan secara optimal agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar produk negara lain. Selain melalui kebijakan pemerintah perlu melakukan tidak nyata dalam rangka meningkatkan volume dan nilai jual minyak kelapa sawit. Berbagai kendala dan hambatan yang ada selama ini perlu diminimalisir.

Beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya: 1)

Peningkatan daya saing industri

penetapan satu peta yang terintegrasi dengan tata ruang nasional; serta 3) Peningkatan konsumsi di dalam negeri terutama untuk energi; percepatan program mandatory biodiesel menjadi (B20, B40, dan lain-lainnya).

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Alatas, Andi, *Trend Produksi dan Ekspor Minyak Sawit (CPO) Indonesia*, Jurnal Agraris, Vol.1 No.2 Juli 2015
- Almonte, L. *ASEAN Single Window Takes Regional Grouping Closer to Integration*, 2013, Diakses pada 5 November 2014 di <http://www.portcalls.com/asean-single-window-takes-regional-grouping-closer-to-integration>
- Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, *Laporan Dampak Asean Economic Community terhadap Sektor Industri Jasa, serta Tenaga Kerja di Indonesia*, Jakarta: 2014
- Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, *Laporan Dampak Asean Economic Community terhadap Sektor Industri Jasa, serta Tenaga Kerja di Indonesia*, Jakarta: 2014
- Badan Pusat Statistik Indonesia, *Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2014*, Jakarta: 2015.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2014*, BPS, Jakarta: 2015
- Ermawati, Tuti dan Yeni Saptia, *Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.7 no.2, Desember 2013
- Hadi, Prajogo U. dan Sudimardianto, *Analisis Komparasi Daya Saing Produk Ekspor Pertanian Antar Negara Asean Dalam Era Perdagangan Bebas AFTA*, Jurnal Agro Ekonomi, volume 22 no.1, mei 2004: 46 - 73
- Kementerian Pertanian, *Statistik Pertanian 2012*, Jakarta: 2012, Kementerian Pertanian.

- Malian, A. Husni, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Produk Pertanian dan Produk Industri Pertanian Indonesia: Pendekatan Macroeconometric Models dengan Path Analysis*, Jurnal Agro Ekonomi Volume 21 No. 2 Oktober 2003: 97 – 121.
- Pomfret, R., "Sequencing Regional Integration in Asia". In Advanced Research in Asian Economic Studies Vol.3: *International Economic Integration and Asia*. Michael G. Plummer dan Erik Jones (eds).New Jersey:2006, World Scientific.
- Pusat Data dan Informasi, Departemen Perindustrian, *Gambaran Sekilas Industri Minyak Kelapa Sawit*, Jakarta: 2007
- Redaksi, *ACFTA dan Ancaman Kedaulatan*, Jurnal Sosial Demokrasi, Vol. 8/3/Februari-Juni 2010.
- Sebayang, K. Dan Dianta A.,*Dampak Integrasi Ekonomi ASEAN Terhadap Perdagangan Indonesia Pada Sektor Kendaraan Roda Empat*, Jurnal EconoSains, Volume IX, Nomor 2, Agustus 2011.
- Tumbarello,Patrizia, *Are Regional Trade Agreements in Asia Stumbling or Building Blocks? Implications for the Mekong-3 Countries*, IMF Working Paper WP/07/53, March 2007, International Monetary Fund.
- UN Comtrade, (2003-2012),*Trade Flow*: 2013 dari <http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults>, Diunduh tanggal 1 s.d 15 September, dalam Tuti Ermawati, Yeni Saptia, Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.7 No.2, Desember 2013
- Widyasanti, A. Adininggar, *Perdagangan Bebas Regional Dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juli 2010.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/Ot.140/7/2008 Tentang Syarat Dan Tatacara Verifikasi Sarana Dan/Atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif

Internet

<http://www.kemendag.go.id/id/faq>, diakses 4 Agustus 2016.

<http://www.kemendag.go.id/id/faq>, diakses 4 Agustus 2016

<http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166>, diakses 29 Agustus 2016.

<http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166>, diakses, 29 Agustus 2016.

9 Cabang Industri Jadi Unggulan, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6631/9-Cabang-Industri-Jadi-Unggulan>, diakses tanggal 2 Agustus 2016.

<http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166>, diakses 10 Agustus 2016.

Peluang dan Tantangan Perkembangan Industri Argo dalam Perdagangan Bebas MEA 2105

Suhartono

I. LATAR BELAKANG

Perubahan sistem perdagangan internasional menuju liberalisasi perdagangan menarik perhatian serius semua pemangku kepentingan baik negara atau kelompok masyarakat di semua negara. Salah satunya terkait dengan arah perkembangan kerjasama regional di Asia Tenggara, dari awalnya dalam bentuk organisasi ASEAN bergerak menuju Asean Free trade Area (AFTA). Saat ini mulai berlaku kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 atau *ASEAN Economic Community* (AEC). Pembentukan MEA atau AEC merupakan kelanjutan dari kesepakatan kepala negara ASEAN tahun 1997 mengenai visi ASEAN 2020 yang menginginkan terjadinya transformasi ASEAN menjadi kawasan yang lebih stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dengan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial yang rendah. AEC menjadi salah satu pilar di samping pilar keamanan dan sosial budaya dalam menopang perkembangan ASEAN 2020. Khusus kesepakatan MEA atau AEC mempertegas posisi negara-negara ASEAN dalam menyikapi arus liberalisasi perdagangan antar negara yang telah berkembang cepat di tingkat global.

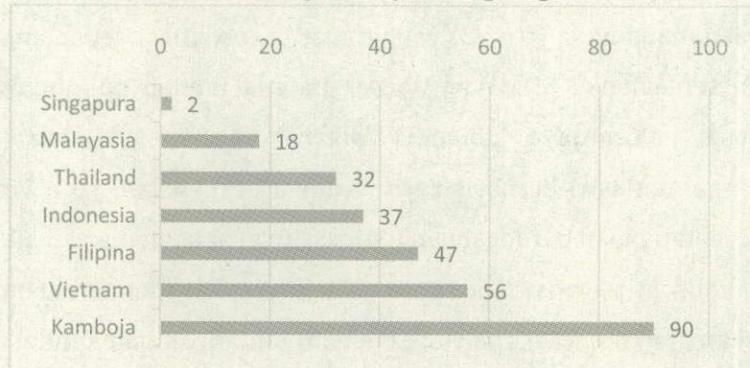
Perkembangan regional tersebut bagi Indonesia sendiri merupakan fenomena atau kondisi yang tidak bisa lagi dihindari, baik karena sebagai penggagas dan menjadi anggota yang penting di dalam organisasi ASEAN itu sendiri. Di sisi yang lain kenyataan liberalisasi perdagangan yang berlangsung di luar kawasan terutama

tetangga dekat di Asia telah menunjukkan kemajuan penting di seperti yang terjadi di Korea Selatan, Jepang dan Cina. Integrasi negara-negara tersebut ke dalam sistem perdagangan internasional yang liberal memberikan keseempatan negara-negara tersebut untuk maju dan menikmati keuntungan dari perdagangan bebas. Sebuah perkembangan yang satu sisinya menciptakan banyak peluang perdagangan, namun di sisi lainnya menuntut kesiapan kapasitas dan kewaspadaan di dalam berkompetisi dalam mekanisme perdagangan bebas. Di dalam perdagangan bebas terkandung sejumlah tantangan bahkan ancaman bagi negara-negara yang tidak memiliki kapasitas atau daya saing, karena hanya sekedar menjadi pasar semata dibanding menjadi produsen yang unggul. Tentunya, negara yang lemah secara kapasitas produksi akan lemah secara ekonomi, karena sifat pertumbuhan ekonominya merupakan cerminan tingkat komsumsi bukan produktifitas dalam produksi.

Negara dengan daya saing dan produktifitas yang tinggi akan melihat perdagangan bebas menjadi peluang karena hilangnya hambatan perdagangan dibanding saat negara-negara kawasan menerapkan sejumlah hambatan dengan tujuan melindungi produk dalam negerinya. Dalam perspektif ini, liberalisasi dalam kerangka MEA akan menciptakan peluang pasar baru bagi produk Indonesia yang unggul secara daya saing untuk dapat dengan lebih mudah memasuki pasar negara-negara di ASEAN dan bersaing dengan produk baik dari dalam negeri negara ASEAN maupun negara luar ASEAN. Ini sebuah peluang besar yang tidak mungkin hadir di saat negara-negara masih menerapkan kebijakan perdagangan yang proteksionis.

Di atas peluang tersebut, kita patut menyadari bahwa di samping peluang ada sejumlah tantangan, terkait dengan posisi daya saing produk Indonesia baik di dalam persaingan pasar dalam negeri maupun di luar negeri (negara anggota ASEAN). Posisi daya saing tersebut dapat dilihat dari *Global Competitiveness Index* tahun 2015¹, dimana peringkat Indonesia berada pada posisi 37 dari 140 negara di dunia dalam hal daya saing produk, di bawah negara Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan peringkat daya saing tersebut sudah tergambar bahwa produk Indonesia masih di bawah daya saing beberapa negara dan unggul dari lainnya. Artinya masih diperlukan upaya meningkatkan daya saing agar dapat unggul dalam persaingan pasar.

Gambar 1. Peringkat Daya Saing Negara ASEAN Tahun 2015



Tingkat daya saing industri nasional dalam produk apapun menentukan seberapa besar industri nasional bisa mengatasi tantangan persaingan. Untuk itu, industri nasional dituntut untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi produksi, menghasilkan produk dengan kualitas yang unggul dan pemasaran output/produk

¹ Klaus Schwab, *The Global Competitiveness Report Tahun 2015-2016*, World Economic Forum.

secara massal, efektif dan efisien sehingga menghasilkan tingkat daya saing yang lebih baik baik di pasar domestik maupun pasar luar negeri. Untuk mengejar peluang dan tantangan tersebut, kekuatan industri dalam negeri memiliki sejumlah kendala terkait dengan sumber daya manusia (SDM), permodalan dan penguasaan teknologi. Faktor-faktor tersebut masih menjadi kendala terbesar untuk memanfaatkan peluang yang tercipta dan mengatasi tantangan yang ada.

Salah satu dari sekian sektor industri yang menghadapi peluang, tantangan dan kendala adalah industri berbasis agro atau agro industri. Industri berbasis agro merupakan sektor industri yang memiliki kapasitas atau daya dukung sumber daya bahan baku yang paling besar, baik karena memiliki luas lahan/wilayah yang paling besar, jenis tanamannya (tropis) yang dapat berproduksi sepanjang tahun dan tersedianya SDM yang besar karena jumlah penduduk yang besar. Tentunya mendiskusikan secara mendalam perkembangan industri berbasis agro nasional berhadapan *vis a vis* dengan perkembangan perdagangan internasional akan menarik baik dari sisi konsep teoritis maupun prakteknya. Terutama, dalam merumuskan atau mencari apa yang menjadi tantangan dan kendala agro-industry nasional bersaing dalam kerangka MEA 2015, dan bagi perumusan kebijakan pemerintah.

Untuk sampai ke sana, tulisan ini mencoba pertama mendiskusikan apa itu liberalisasi perdagangan dan bentuknya. Diskusi selanjutnya membahas strategi industrialisasi agro, dalam hal ini bagaimana industrialisasi agro diterapkan di sejumlah negara dan alasan di baliknya. Selanjutnya untuk memperoleh gambaran pemanfaatan peluang dan mengatasi tantangan didiskusikan

bagaimana *agroindustry* beradaptasi dengan liberalisasi perdagangan.

II. LIBERALISASI PERDAGANGAN

Ide atau gagasan meliberalisasi perdagangan merupakan ide yang sejak lama digagas oleh Adam Smith sebagaimana ditulis dalam karya kalasiknya *The Wealth of Nation*. Walaupun pada saat bersamaan terdapat karya lain yang secara spesifik mengupas perdagangan dan pemerintah (*Government and Commerce*) karya Abbe de Condillac, tetapi *wealth of nation* tetap menjadi referensi utama pengembangan lebih jauh konsep perdagangan antar negara. Menurut Baghwaty karya Adam Smith menginspirasi sejumlah teoritis perdagangan termasuk model-model yang dikembangkan oleh David Ricardo². Model David Ricardo menggambarkan bagaimana bekerjanya satu variabel faktor produksi dalam proses produksi dua barang dengan asumsi tingkat produktivitas tenaga kerja konstan dari dua negara yang memiliki tingkat produktivitas relatif, dan kedua negara yang terlibat perdagangan diasumsikan memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut. Model ini menjelaskan bahwa keberlanjutan perdagangan tersebut ditentukan oleh keuntungan, dimana berlaku hukum pasar bebas yaitu harga (keseimbangan antara *supply and demand*) menentukan alokasi sumber.

Pandangan ini sendiri menurut Baghwaty memiliki kelemahan, ketika terjadi *market failure* (distorsi), maka perdagangan bebas bukan kebijakan terbaik, sebaliknya kebijakan

² Bhagwati, Jagdish N. 2002, *Free Trade Today*, Princeton University Press, hal.1.

tersebut dapat membahayakan dibanding bermanfaat. Pasar bebas tidak serta merta mendatangkan keuntungan ketika terdapat distorsi pasar seperti adanya monopoli dan tarif impor. Salah satunya sering dipraktekan oleh negara berkembang dengan menerapkan kebijakan *infant industri*³, yaitu dengan memproteksi industrinya yang baru tumbuh sebagai bagian dari *substitution import strategy* (yaitu strategi memproduksi barang impor untuk kebutuhan domestik, selanjutnya dikembangkan untuk kebutuhan ekspor). Tujuannya untuk menciptakan kekuatan industri dalam negeri yang monopolistik, sehingga skala ekonomi dari industri tersebut dapat lebih cepat tercapai dan mampu melakukan kompetisi dengan industri dari negara yang sudah maju. Akibatnya alokasi sumber produksi tidak dapat berjalan sesuai hukum pasar, tetapi ditentukan oleh kebijakan pemerintah (*invisible hand*).

Dalam pemikiran ekonomi sendiri, titik *trade off supply and demand* faktor penting yang mempengaruhi aktivitas perdagangan. Pada sisi *supply*/produsen dipengaruhi oleh variabel kemampuan produsen memproduksi barang dengan efisiensi. Efisiensi dapat dalam bentuk proses produksi yang relatif singkat dengan biaya produksi yang sekecil mungkin dan distribusi yang efisien dengan luas wilayah yang luas. Dengan efisiensi tersebut produsen berharap dapat menekan biaya, sehingga produsen lebih besar perannya dalam menentukan harga dan margin dari produk yang sampai di tangan konsumen.

Perdagangan antar negara terjadi ketika masing-masing negara mengembangkan produk yang berbeda sehingga menciptakan

³ Ibid, 14

permintaan dan penawaran antar negara atas dasar perbedaan barang yang diproduknya. Perdagangan antar negara tidak hanya terjadi karena adanya perbedaan produk (*comparative advantage*) saja, tetapi juga berkembang ketika terjadi perbedaan efisiensi produk (*competitive advantage*) pada barang dalam proses produksi dan *distribusi*. Perbedaan produk dan perbedaan efisiensi dan nilai kompetisi tersebut mengisi celah permintaan dan penawaran dari satu negara dengan negara lainnya. Adanya perbedaan produk dan perbedaan tingkat efisiensi produk menciptakan penawaran dan permintaan akan perdagangan.

Di dalam sistem perdagangan yang proteksionis ataupun semi proteksionis, peran pemerintah cukup besar dengan sejumlah kewenangan dalam mengatur jenis produk yang dapat diperdagangkan dan volumenya atas dasar kepentingan subjektif masing-masing negara. Peran tersebut diwujudkan dengan sejumlah kebijakan seperti pemberlakuan tarif impor, kuota impor, kontrol lalulintas perdagangan, syarat kandungan lokal dan perakitan produk. Menurut Krugman⁴, kebijakan proteksi membutuhkan peran pemerintah yang cukup besar dalam pelaksanaannya dari mulai pemilihan industri yang diproteksi, pengawasan kandungan lokal hingga memperbesar birokrasi pengawasan. Kelemahan dari kebijakan perdagangan yang proteksionis menurut Krugman terletak pada adanya distorsi insentif, fragmentasi pasar, monopoli dan menguatnya praktek *rent seeking*.

Ketika, sebuah negara merubah kebijakan perdagangannya dari proteksionis menjadi terbuka atau menempuh jalan liberalisasi

⁴ Krugman, Paul. "Protection in Developing Countries" di dalam *Policy Making in The Open Economy*, ed. DornbuschRudiger, Oxford University Press, 1993.

akan muncul sejumlah dampak penting. Menurut Krugman⁵, pemerintah negara tersebut akan menghadapi persoalan dampak negatif proses transisi, perubahan distribusi pendapatan dan menurunnya kewenangan dan pengaruh aparatur pemerintah. Dampak negatif proses transisi tampak dari neraca perdagangan yang defisit dan meningkatnya pengangguran. Defisit neraca perdagangan disebabkan oleh derasnya barang impor masuk melebihi ekspor. Derasnya impor karena produk lokal kalah bersaing, baik karena proses produksi kurang efisien atau harga lebih mahal dari impor. Terpukulnya produk lokal akan menekan penghasilan pekerja bahkan dapat mendorong penutupan industri lokal dan ini akan menciptakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja akan berdampak pada distribusi pendapatan atau menciptakan kemiskinan atau memperlebar kesenjangan. Pemutusan hubungan kerja menjadi salah satu yang tidak bisa dihindari pada sektor-sektor tertentu.

Sedangkan dalam perdagangan bebas, keuntungan yang dinikmati masyarakat akan berasal dari barang dengan harga yang relatif bersaing atau harga murah. Para produsen dipaksa bersaing dan melakukan efisiensi dalam proses produksi dan distribusinya. Hal ini menyebabkan harga yang terbentuk menjadi semakin realistik. Dengan kata lain masyarakat mendapatkan harga yang semakin rasional mendekati harga produksinya, selain itu masyarakat mendapatkan pilihan yang lebih banyak menyesuaikan kemampuan dan preferensinya.

⁵ Ibid

Ada perbedaan pendekatan dalam penerapan liberalisasi perdagangan dalam payung *Free Trade Area* dan pendekatan liberalisasi perdagangan secara regionalisme (Rai, 2010). Salah satunya ada perbedaan perlakuan dalam konteks regionalisme dengan perdagangan bebas, dimana regionalisme memberlakukan diskriminasi antara produk yang berasal dari negara anggota dengan di luar anggota. Sedangkan konsep perdagangan bebas yang lebih luas dari regionalisme berlaku secara luas bukan hanya dengan negara anggota kawasan juga berasal dari luar kawasan. Hal ini dijelaskan dengan baik oleh teori *union costum*, dimana di bawah satu atap kepabeanan, negara-negara anggota bersepakat menghapus hambatan tarif dan non tarif atas barang impor dari sesama negara anggota dan mengenakan seperangkat tarif terhadap impor dari negara bukan anggota. Kebijakan ini menghasilkan dampak negatif dan positif. Dampak positif berasal dari adanya pergantian dari produk domestik berbiaya tinggi dengan produk impor berbiaya lebih murah dari negara yang bergabung dalam satu atap kepabeanan. Selain itu, para eksporter domestik memperoleh kesempatan pasar lebih luas dari dihapuskannya hambatan tarif di negara anggota, sehingga bisa bersaing dengan produk lokal dan dari negara lain di luar keanggotaan satu kepabeanan. Efek negatif terjadi ketika impor yang masuk dari negara anggota bukan menggantikan produk lokal yang berbiaya tinggi saja tetapi produk impor dari negara lain di luar keanggotaan yang lebih murah biaya produksinya. Ini kerugian bagi negara dalam kawasan karena perdagangan yang tercipta bukan menghasilkan pasar bagi produk yang efisien tetapi produk yang lebih mahal. Jadi perdagangan bebas bisa menciptakan keuntungan karena menciptakan perdagangan

atau pasar baru tetapi juga bisa menciptakan pasar yang tidak diinginkan.

Dalam konteks kedaulatan dan fungsi mengatur dari pemerintahan dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan distributif, perdagangan bebas memberikan ruang yang lebih sempit bagi pemerintah untuk terlibat. Untuk itu pemerintah perlu memainkan peran strategis lainnya yang ruangnya masih bisa dimungkinkan sepanjang disepakati oleh negara-negara yang bergabung dalam regionalisme ataupun perdagangan bebas kawasan. Usaha pemerintah dibutuhkan di dalam mendorong dan mengembangkan industri dalam negeri dan kegiatan perdagangan yang mengikutinya.

Dalam pendekatan kebijakan industri ada dua pola peran pemerintah yaitu interventionis bersifat vertikal dan interventionis bersifat horizontal⁶. Pendekatan kebijakan interventionis bersifat vertikal fokus pada upaya pemberdayaan sektor usaha tertentu, dimana sasaran intervensi diarahkan pada hasil dan proses produksi dari usaha kecil agar dapat tumbuh dan bersaing. Dalam pendekatan ini sasaran diberikan kepada usaha kecil dan menengah melalui kebijakan-kebijakan bersifat mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh sektor produksi dari hulu sampai hilir. Dengan pendekatan koordinatif tersebut diharapkan terbangun sistem pengembangan usaha yang dapat melindungi dan menumbuhkan usaha kecil dalam persaingan yang tak seimbang. Olehkarenanya dalam pengembangannya satu unit usaha yang satu terkait dengan yang lainnya. Dalam pendekatan ini usaha kecil yang terkonsolidasi dapat

⁶ Audretsch, D. B 1998. *Introduction to Industrial Policy and Competitive Advantage*, Vol 1-3, Aldershot: Edward Elgar

meningkatkan efisiensi produksinya dan meningkatkan daya saing produknya.

Sedangkan pendekatan secara horisontal tidak memperlakukan pembedaan atas sektor tertentu, tetapi sektor tersebut tetap memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap struktur sektor usaha. Menurut Parker⁷ pendekatan horisontal fokus pada peningkatan kualitas (*input*) masukan proses produksi dalam hal ini *input* tenaga kerja dan teknologi. Kebijakan-kebijakan yang menjadi turunan pendekatan ini dari sisi tenaga kerja seperti hubungan industri, upah buruh, serta pelatihan. Dalam perkembangannya pendekatan ini juga memasukkan kebijakan yang fokus pada biaya produksi dan persaingan harga.

Peran dan fungsi pemerintah yang berusaha membangun kekuatan produksi dalam negeri sangat diperlukan bagi industri yang berbasis pada kekayaan alam lokal dan menyerap atau memperkerjakan banyak penduduk lokal. Hal ini untuk mengoptimalkan ruang yang menguntungkan lebih banyak orang, karena negara dibentuk untuk melindungi segenap tanah air dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Salah satunya bagaimana pemerintah mengoptimalkan industri berbasis agro yang merupakan industri berbasis kekayaan alam Indonesia dan mayoritas penduduk Indonesia bekerja di dalamnya.

III. INDUSTRIALISASI BERBASIS AGRO

Industrialisasi menjadi pilihan banyak negara berkembang dalam mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saingnya di

⁷ Parker, Rachel 2002. "Coordination and competition in small business policy: A comparative analysis of Australia and Denmark", *Journal of Economic Issues*. Lincoln: Dec 2002. Vol.36, Iss. 4

dalam memenangkan kompetisi yang terjadi dalam perdagangan internasional pada umumnya dan khususnya dalam perdagangan bebas. Tidak ketinggalan bagi Indonesia, ketika dipimpin oleh Presiden Suharto dalam kerangka rencana pembangunan lima tahun, telah disiapkan pondasi industri Indonesia. Salah satunya dalam bentuk tahapan pembangunan, dimana untuk mencapai swasembada pangan ditempuh dengan strategi mekanisasi pertanian dan selanjutnya membangun industri. Salah satu strategi industrialisasi tersebut adalah untuk mengubah struktur ekonomi masyarakat dari agraris menjadi industri, namun masih berbasis pada sumber daya alam yang dominan.

Saat orde baru memulai strategi industrialisasi dalam kebijakan pembangunannya dihadapkan pada adanya pilihan untuk memulainya berdasarkan industrialisasi yang berbasis pada penggunaan teknologi yang canggih dan modern dengan orientasi memproduksi kebutuhan dalam negeri yang sebelumnya tergantung pada *import-based*, dan industrialisasi yang berbasis pada potensi sumberdaya lokal (*resources-based*). Pilihan pertama menekankan pada kemampuan untuk mensubtitusi produk-produk impor yang dikomsumsi dalam negeri. Sedangkan kedua menekankan industri yang berbasis pada sumber daya lokal. Subtitusi impor menempatkan industri lokal sebagai “tukang jahit” yang bisa jadi *raw materialnya* bukan hanya berasal dari dalam negeri saja tetapi terbuka dari luar. Namun, karena hanya bagian dari kepanjangan tangan produsen dari luar negeri sering bahan baku yang memenuhi syarat untuk diproses secara industri didatangkan dari luar negeri. Dalam konteks tersebut subtitusi impor hanya

memanfaatkan daya saing sumber daya manusia(SDM) atau yang lainnya, bukan pada bahan baku.

Sebaliknya strategi industrialisasi berbasis pada sumber daya akan menempatkan sumber daya lokal sebagai dasar utama membangun industrinya baik bukan hanya SDM tetapi lebih luas bahan baku dan keunggulan lokal lainnya. Pertanian dalam konteks Indonesia memiliki keunggulan bukan hanya potensi sumber daya alam pertaniannya, selain dengan banyaknya SDM yang bekerja di sektor ini dan luas dan kapasitas wilayah dalam mendukungnya. Tentunya industrialisasi berbasis pada sumber daya pertanian akan merujuk pada konsep konsep dan aplikasi industri berbasis agro atau industri agro.

Industri berbasis pada produk pertanian atau agro industri konsepnya diperkenalkan oleh Austin⁸, yang menilai bahwa "*agroindustry is the core of an important agricultural chains commodity*". Kerangka mengenai kegiatan agroindustri ada pada kerangka kegiatan perusahaan yang memproses bahan nabati (yang berasal dari tanaman) atau hewani (yang dihasilkan oleh hewan). Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawetan melalui fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan dan distribusi. Produk agroindustri ini dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk antara untuk bahan baku industri lainnya. Agroindustri terbentuk menjadi sebuah kompleks industri pertanian, ketika secara proses mengintegrasikan dari mulai produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen.

⁸ Austin JE. 1981. *Agroindustry Industrial Project Analysis*. Maryland: The John Hopkins University Press

Untuk mengoptimalkan potensi agroindustri sejumlah studi menyarankan pentingnya membangun agroindustri dengan pendekatan cluster (kluster) atau terintegrasi. Kluster merupakan cara mengelompokkan industri menurut geografis untuk memperoleh keunggulan melalui *co location* (kerjasama berdasar lokasi)⁹. Secara lebih luas Porter¹⁰ mendefiniskannya sebagai pengelompokan geografis dari perusahaan atau lembaga yang memiliki kedekatan dalam suatu bidang. Pendekatan kluster berupaya membangun keterkaitan antar industri yang bisa mengarah pada rangkaian proses produksi hingga distribusi ke konsumen, atau mengarahkannya untuk mendukung suatu produk manufaktur tertentu. Untuk memperkuat strategi industrialisasi dengan kluster, strategi ini juga menyarankan untuk mengembangkan kluster dengan cara menempatkan lembaga pemerintah, universitas hingga perusahaan terkait atau sebidang dalam satu kawasan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan setiap output produksi menjadi rangkaian yang efektif dan efisien.

Strategi kluster industri ini dapat dilihat menjadi alternatif dalam memperbaiki daya saing agroindustri Indonesia yang masih masuk kategori sedang berkembang. Pengalaman di banyak negara berkembang, potret sektor pertanian masih mewakili gambaran kehidupan kemiskinan suatu negara dibanding gambaran kemakmuran. Gambaran tentang petani kecil dan miskin yang tinggal di pedesaan mewakili ketertinggalan dan fenomena lingkaran

⁹ Bosworth, B. & Broun, D. 1996. "Connect the Dots: Using Cluster-Based Strategies to Create Urban Employment", *Firm Connections*, 4(2): 1-6

¹⁰ Porter, M. 1998. "Clusters and the New Economics of Competition". *Harvard Business Review*. Available at: <http://hbr.org/product/clusters-and-the-new-economics-of-competition/an/98609-PDF-ENG>

kemiskinan. Semua itu karena petani dihadapkan pada masalah besar yang tidak pernah bisa diatasi dalam waktu singkat yaitu rendahnya keuntungan produk hasil pertanian, rendahnya kemampuan mengelola resiko gagal panen dan rendahnya tingkat investasi bagi pengembangan proses produksi dan pengolahan hasil pertanian. Kondisi tersebut mempatkan petani kurang produktif, kurang mengenal pasar dan kurang berusaha meningkatkan nilai tambah sehingga keuntungan hasil pertanian yang diperoleh petani tetap rendah¹¹. Pada akhirnya kelompok masyarakat petani menjadi kelompok masyarakat yang miskin, bukan karena ketiadaan sumberdaya namun kemampuan mengakses pasar yang rendah.

Untuk mengatasi kondisi tersebut *Internasional Trade Center* (ITC) menawarkan konsep peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui “value network”¹². Dalam konsep ini nilai tambah dibentuk melalui proses akumulasi dari bekerjanya mekanisme baik secara vertikal, horizontal maupun hubungan saling mendukung dari setiap tahapan produksi hingga pemasaran. Dalam konteks vertikal, terjadi interkoneksi atau integrasi dari pensuplai bahan baku atau bahan input produksi pertanian, produser pertanian (petani), industri proses, eksportir, pembeli pemilik merek potensial dan retail. Secara horizontal diharapkan terbentuk kerjasama diantara para produser (petani) dalam bentuk kelompok, koperasi, ataupun usaha bersama. Hubungan dukungan terjadi di saat ada kerjasama

¹¹ ITC. 2006. *Bringing the Poor into the Export Process: Is Linking Small Producers and Big Exporters a Solution?* Agrawal, S.; India Trade Promotion Organization. ITC Executive Forum, International Trade Centre UNCTAD/WTO. Geneva, Switzerland

¹² ITC. 2005. *Innovations in Export Strategy: Competitiveness through Export Clustering*. ITC Executive Forum, International Trade Centre UNCTAD/WTO. Geneva, Switzerland. ITC.

yang mendukung antara lembaga pemerintah dan swasta dalam mendukung petani untuk dapat menghasilkan produk pertanian yang lebih banyak, berkualitas dan memenuhi syarat-syarat masuk ke dalam sistem produksi lanjutan atau industri.

Ada konsep lain yang perlu dipertimbangkan yang sudah berkembang dalam mengembangkan agroindustri di Indonesia. Konsep-konsep ini telah berkembang dan dipraktekan di sejumlah negara (Nogales, 2010). Pertama konsep *Global value chain*, sebuah konsep pengembangan produk agro dengan pengembangan wilayah lintas pulau dan negara. Dalam konsep ini pengembangan dilakukan melalui sejumlah perusahaan yang bekerja lintas negara sehingga bersifat global. Cara ini diyakini dapat menghubungkan kekuatan petani lokal dengan pasar global. Kedua *Agribusiness complex* merujuk pada praktek interkoneksi antar kegiatan dari mulai memproduksi hasil pertanian hingga pemasaran, dan interkoneksi dan saling ketergantungan antar perusahaan di dalam suatu *complex*.

Ketiga *agro-industrial park* atau sering disebut agro-food park merupakan upaya membangun fasilitas bersama (digunakan dan dimanfaatkan secara bersama seperti infrastruktur, transportasi, gudang dan pengemasan) dalam memproses lebih lanjut produk hasil pertanian menjadi pangan yang siap dipasarkan. Keempat *Agri-export zones* sebagai bentuk usaha mewujudkan kluster dapat menumbuhkan kegiatan ekspor produk pertanian. Hal ini diterapkan di India sejak 2001, dengan cara menetapkan suatu zona, dimana di dalam zona tersebut memiliki produk pertanian yang unggul yang dapat dikembangkan menjadi komoditas ekspor. Sedangkan, produk lanjutan dari produk pertanian harus memiliki hubungan yang kuat

dari produk pertanian setempat dan diarahkan berada dalam satu zona yang sama dengan produk pertaniannya walaupun berbeda distrik. Zona ini yang dikembangkan sebagai zona ekspor produk pertanian ataupn produk agro. Hal ini memungkinkan tumbuhnya kaitan antara produk pertanian dan industri bahkan dalam perkembangannya industri mengembangkan lebih jauh dengan riset baik untuk peningkatan produk pertanian maupun pengembangan produk, memberikan bantuan modal pertanian hingga faktor produksi lainnya. Kaitan langsung dan kuat membentuk rantai produksi yang efektif dan efisien, sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

Kelima, untuk mengoptimalkan potensi di Jepang dikembangkan *One-village-one-product*. Suatu kawasan pedesaan atau kawasan tertentu didorong untuk berkonsentrasi atau focus pada satu produk, meningkatkan nilai tambah produk dan memperkenalkannya sebagai produk daerah tersebut secara terus menerus. Selanjutnya pemerintah terlibat mempromosikannya dan memfasilitasi pemasarannya baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sejumlah negara mengadopsi strategi ini seperti Thailand dengan *One-Tumbon-One-Product* dan Srilangka dengan *Spice export villages*.

Sejumlah strategi agro industri berbasis kluster yang dikembangkan disejumlah negara tersebut merupakan respon negara atas perkembangan pesat perdagangan dunia di satu sisi dan kebutuhan untuk membenahi aktivitas dan iklim bisnisnya sehingga mampu memenuhi tuntutan global baik dari sisi standar, produk berkualitas, memasarkan produk, pemasaran, inovasi kemasan dan tuntutan efisiensi. Tuntutan-tuntutan tersebut dalam konteks

perdagangan bebas harus dapat dipenuhi dengan skala produksi yang konstan, di dalam tekanan pasar, sehingga pada akhirnya membutuhkan perangkat strategi industrialisasi agro yang mampu memperkuat kapasitas inovasi dan daya saing.

Strategi kluster juga memberikan peluang terciptanya interkoneksi dengan industri yang berdekatan secara geografis dan saling terkait, karena kemudahan sarana transportasi dan memperpendek jarak perpindahan produk sehingga mampu menekan biaya produksi maupun distribusi. Penambahan biaya ini yang sering disebabkan oleh jarak dan sarana menyebabkan daya saing produk agro menurun. Melalui kluster biaya-biaya tersebut dapat ditekan. Penyebaran pertanian yang luas didalam wilayah kepulauan dengan dukungan infrastruktur yang belum memadai, bagi Indonesia pendekatan kluster akan meningkatkan efisiensi dengan adanya industri yang dekat dengan sumber bahan baku. Strategi ini juga akan mengatasi ketimpangan antara wilayah salah satunya karena adanya pemusatan industri di wilayah barat Indonesia khususnya Pulau Jawa. Sedangkan bahan baku tersedia melimpah di luar Pulau Jawa.

IV. DAYA SAING AGRO INDUSTRI MENGHADAPI LIBERALISASI PERDAGANGAN

Peluang membesarkan kontribusi agro industri ke dalam pasar domestik dan luar negeri terbuka lebar dalam kerangka perdagangan bebas. Peluang tersebut hanya bisa diraih dengan memperkuat kapasitas daya saing industri berbasis agro di Indonesia. Secara geografis, iklim dan jenis tanaman agro yang bisa diindustrialisasi dan dipasarkan secara global, Indonesia memiliki

potensi yang besar. Namun, dalam kenyataannya tidak semua potensi tersebut memiliki kapasitas daya saing yang tinggi.

Hal ini bisa dilihat dari studi mengenai daya saing industri Indonesia dalam menghadapi MEA 2015. Melalui pengukuran menggunakan indeks *Revealed Competitive Advantage* (RCA), Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan (Nizar, 2014), menggambarkan bahwa diantara produk/komoditas ekspor dalam tujuh sektor yang akan diintegrasikan, ternyata ada yang memiliki daya saing tinggi (indeks $RCA > 1$), dan daya saing rendah (indeks $RCA < 1$) di pasar regional (ASEAN) dan internasional (di luar ASEAN). Di dalam studi tersebut kelompok produk berbasis agro klasifikasi termasuk yang memiliki kategori tinggi dan rendah seperti dalam Tabel 1.

Tabel 1. Daya Saing Produk Berbasis Agro

PRODUK (Kode SITC)	Daya Saing Indonesia		Kompetitor	
	ASEAN	NON ASEAN	ASEAN	NON ASEAN
Susu (022, 023, 024)	rendah($RC A < 1$)	rendah($RC A < 1$)	Filipina (RCA tertinggi) : khusus susu & produk susu (022) dan keju & dadih (024)	semua negara ASEAN $RCA < 1$
Buah-buahan (057, 058, 059)				
Buah2an & kacang2an, segar atau kering (057)	tinggi (RCA > 1)	rendah($RC A < 1$)	Kamboja (RCA tertinggi), Laos, Filipina, Thailand dan Vietnam	Filipina (RCA tertinggi), Myanmar & Vietnam
Buah, diawetkan, dan buah olahan; tanpa jus (058)	rendah($RC A < 1$)	Rendah($RC A < 1$)	Filipina (RCA tertinggi), Laos, Malaysia, Thailand, dan Vietnam	Filipina (RCA tertinggi), Thailand & Vietnam
Jus buah dan sayuran, tdk difermentasi (059)	rendah($RC A < 1$)	rendah($RC A < 1$)	Thailand (RCA tertinggi), Filipina dan Malaysia	Filipina (RCA tertinggi), Thailand
Gula (061 dan 062)				

Gula, molase dan madu (061)	rendah(RC A<1)	rendah(RC A<1)	Thailand (RCA tertinggi) dan Kamboja	Laos (RCA tertinggi), Filipina, Kamboja dan Thailand
Gula hias (062)	tinggi (RCA > 1)	rendah(RC A<1)	Vietnam(RCA tertinggi), Filipina, Malaysia, dan Thailand	Thailand (RCA tertinggi), Filipina & Vietnam
Kopi (072)	tinggi (RCA > 1)	rendah(RC A<1)	RCA Indonesia tertinggi : Vietnam, Laos, Thailand dan Malaysia	Laos (RCA tertinggi) dan Vietnam
Kakao (072 dan 073)				
Kakao (072)	tinggi (RCA > 1)	tinggi (RCA > 1)	Malaysia; tapi RCA Indonesia lebih tinggi	Malaysia (RCA tertinggi) dan Singapura
Cokelat, makanan olahan dengan kakao (073)	tinggi (RCA > 1)	rendah(RC A<1)	Malaysia (RCA tertinggi) dan Singapura	semua negara ASEAN RCA < 1
Tembakau (121 dan 122)				
Tembakau non-olahan (sisa tembakau) (121)	tinggi (RCA > 1)	tinggi (RCA > 1)	Kamboja (RCA tertinggi), Filipina & Laos	Laos (RCA tertinggi) & Filipina
Tembakau olahan (122)	tinggi (RCA > 1)	rendah(RC A<1)	Filipina (RCA tertinggi), Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapura & Vietnam	semua negara ASEAN RCA < 1
Kertas dan produk kertas (251, 641, & 642)				
Bubur kayu dan sampah kertas (251)	rendah(RC A<1)	tinggi (RCA > 1)	Kamboja (RCA tertinggi)	Indonesia tertinggi, negara ASEAN lain RCA < 1
Kertas dan kertas karton (641)	tinggi (RCA > 1)	tinggi (RCA > 1)	Indonesia tertinggi : Singapura & Thailand	Indonesia tertinggi, negara lain RCA < 1
Kertas dan kertas karton, dipotong (642) Minyak	tinggi (RCA > 1)	rendah(RC A<1)	Thailand (RCA tertinggi), Malaysia & Vietnam	semua negara ASEAN RCA < 1
Minyak nabati lainnya, cair atau kental (422)	tinggi (RCA > 1)	tinggi (RCA > 1)	Kamboja, Malaysia, Thailand, Filipina & Vietnam;tapi	Malaysia & Filipina; RCA Indonesia tertinggi

			RCA Indonesia tertinggi	
Furnitur (821)	rendah(RC A<1)	tinggi (RCA > 1)	Malaysia (RCA tertinggi), Filipina, Thailand & Vietnam	Malaysia & Vietnam (RCA tertinggi)

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (Nizar, 2014)

Sementara itu di dalam Tabel 1, produk-produk ekspor Indonesia dalam kelompok produk berbasis agro yang memiliki daya saing tinggi ($RCA > 1$) terhadap produk sejenis dari negara ASEAN antara lain adalah Kopi, Kakao, Tembakau, beberapa produk kertas dan minyak nabati. Namun walaupun daya saing tinggi dibanding dengan negara-negara di ASEAN, hanya kakao, tembakau non olahan, kertas dan kertas karton serta minyak nabati. Diantara produk yang memiliki daya saing tinggi baik di dalam ASEAN maupun luar posisi kompetitor tidak selalu bisa diungguli oleh Indonesia.

Berdasarkan data nilai ekspor akhir tahun 2013, produk kopi memiliki pangsa sekitar 1,1 persen dari total ekspor Indonesia dengan orientasi pasar terbesar, yaitu sekitar 41,4 persen ditujukan ke negara-negara ASEAN dan sisanya ke negara-negara non-ASEAN. Dengan pangsa ekspor kopi yang cukup tinggi tersebut tingkat daya saingnya juga sangat tinggi ($RCA > 1$). Di pasar ASEAN, tingkat daya saing ekspor kopi Indonesia sangat tinggi dengan trend meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh indek RCA yang mencapai 8,4 dalam tahun 2009, kemudian meningkat menjadi 9,5 dalam tahun 2010, dan meningkat menjadi 10,2 dalam tahun 2012 dan menjadi 12,5 dalam tahun 2013(Nizar, 2014).

Sedangkan kakao walaupun memiliki daya saing tinggi baik di tingkat ASEAN maupun Non ASEAN, kecendrungan indeks daya

saingnya menurun. Menurut Nizar (2014), di balik nilai ekspor kakao mencapai 1,4 persen dari total ekspo, posisi Indonesia di ASEAN maupun luar ASEAN masih di bawah daya saing Malaysia. Bahkan ekspor terbesar Indonesia ditujukan ke Malaysia. Ini berarti produk kakao Indonesia menopang ekspor produk kakao Malaysia, dimana Malaysia mendapatkan nilai tambah dari kakao yang berasal dari Indonesia. Sebagai produsen kakao ketiga di dunia, pemerintah dalam kerangka MEA, berupaya membina petani untuk mencapai syarat mutu dan kematangan biji yang disyaratkan industri dan mengarahkan untuk menjual ke industri pengolahan dalam negeri sehingga industri berbasis kaka dapat meningkatkan nilai produk dan bersaing dengan Malaysia.

Tembakau merupakan salah satu andalan produk ekspor berbasis agro Indonesia baik ke pasar ASEAN maupun luar ASEAN. Produk tembakau olahan (rokok-cengkeh dan tembakau) sangat tinggi di pasar ASEAN dan produsen terbesar kedua dunia, sehingga peluang ekspor juga terbuka di pasar internasional. Namun perkembangan pasar internasional menghadapi serangkaian kebijakan yang menghambat pertumbuhan ekspor Indonesia, sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia untuk melindungi pasarnya baik karena alasan kesehatan dan menekan konsumsi tembakau menyebabkan peluang tersebut belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Hambatan tersebut seperti larangan rokok kretek di Amerika dan *plain packaging* di Australia.

Produk strategis industri berbasis agro lainnya yang penting adalah produk minyak nabati yang di dalamnya termasuk Crude Palm Oil (CPO), dimana nilai eksportnya mencapai 4,2 persen dari ekspor nasional, dengan ASEAN sebagai pasar terbesarnya. Produk

berbasis sawit ini memiliki daya saing tinggi baik di ASEAN maupun non-ASEAN. Peluang pasar yang luas juga menghadapi hambatan dari negara-negara Eropa dan Amerika berdasarkan alasan lingkungan. Sehingga pertumbuhan eksportnya mengalami tantangan yang penting. Strategi hilirisasi industri turunan bagi produk menjadi instrumen penting dalam menembus hambatan tersebut dan selain dapat meningkatkan nilai produk serta meningkatkan daya saingnya baik dalam konteks pasar ASEAN maupun luas ASEAN.

Tantangan lain menyertai MEA ada pada *trade diversion*, perdagangan yang tidak diinginkan karena menurunkan atau merusak pasar yang kompetitif dan menguntungkan bagi lapisan masyarakat yang lebih luas. Adanya kesepakatan perdagangan bebas antara negara anggota ASEAN dengan negara di luar kawasan seperti Singapura memungkinkan impor produk dari luar kawasan akan menggerus pasar dari negara anggota kawasan. Ketika efek diversion terjadi maka akan memukul bukan hanya konsumen tetapi juga industri pesaing dari negara dalam kawasan. Bagi Indonesia MEA membuka peluang menguatkan industri berbasis agro yang masih memiliki daya saing rendah untuk tumbuh sekaligus mendorong konsolidasi industri yang sudah tinggi daya saingnya. Tentunya dalam kerangka memanfaatkan efek *trade creation*, bukan efek *diversion*. Untuk itu pemerintah perlu mendorong pembahasan lebih mendalam terkait dengan efek *diversion* dengan negara anggota ASEAN lainnya terutama yang mendukung pertumbuhan industri berbasis agro yang masih rendah daya saingnya ataupun yang berpotensi merusak pasar produk yang berdaya saing tinggi.

V. BUKAN SEKEDAR PABRIK TAPI INDUSTRI

Pasar bebas baik dalam kerangka MEA maupun AFTA menuntut setiap negara menyiapkan industrinya agar efektif dan efisien untuk unggul di pasar. Agro industri dalam perspektif *value network* harus mampu mengakumulasi semua tahapan produksi dari bahan baku hingga ke tangan konsumen baik di dalam negeri maupun luar negeri lebih efektif dan efisien. Konsep keunggulan industri nasional dalam konteks agro seharusnya dapat melampaui sekedar capaian swasembada pangan semata seperti yang digariskan pada masa orde baru. Tetapi harus lebih jauh dan luas mengaitkannya dengan kemampuan industri nasional mengambil *value network*, sehingga bukan hanya memenuhi pasar dalam negeri tetapi mengambil peluang dari pasar di luar negeri. Artinya bukan hanya bisa menghasilkan saja dalam konteks substitusi impor tetapi lebih jauh lagi, semua yang dibangun berbasis agro memiliki tujuan ekspor. Hal ini didukung oleh studi yang memperlihatkan bahwa diversifikasi pasar ekspor tidak memberikan nilai tambah per tenaga kerja baik bagi industri berbasis non-agro maupun bagi yang berbasis agro (Hadiyanto, 2015). Namun studi tersebut menyarankan untuk meningkatkan pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja agro industri dengan mendorong pengembangan produk-produk yang memiliki daya saing di pasar ekspor, misalnya produk-produk kelapa sawit, kakao dan furniture. Artinya fokus pada pengembangan daya saing akan mempengaruhi kapasitas agro industri nasional untuk memberikan kesejahteraan atau nilai tambah pada para pekerjanya.

Pengembangan bukan hanya sekedar membangun pabrik tetapi membangun daya saing dalam bentuk industri. Pendekatan kluster untuk industri agro agar mampu mengembangkan keunggulannya mensyaratkan kehadiran pemerintah, lembaga penelitian, masuknya investasi dan penguatan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung industri. Kehadiran pemerintah sangat penting untuk menderegulasi aturan yang menurunkan daya saing dan meregulasi faktor-faktor penghambat untuk direduksi dengan kekuatan hukum. Kolaborasi lembaga penelitian dengan industri akan menghasilkan inovasi (Lukman Adhi S, Kompas 5 September 2016), selain itu peningkatan kualitas pendidikan dalam menyiapkan SDM siap pakai bagi industri juga akan meningkatkan daya saing industri. Produk agro butuh industri yang menyerap bahan baku dalam negeri dan manusianya, karena ada nilai tambah baik dari setiap tahapan produksi ataupun adanya interkoneksi dengan pasar apalagi bisa masuk ke dalam *global value chain*, produk agro tidak hanya dapat mengandalkan pasar dalam negeri semata namun juga pasar global.

Gambaran tingkat daya saing yang masih beragam, khususnya produk yang memiliki daya saing rendah memerlukan strategi percepatan industrialisasi produk pertanian sehingga bisa mengambil peluang dari perdagangan bebas. Fakta yang berkembang ketika perdagangan bebas terbuka di depan mata, di beberapa daerah mengalami proses deindustrialisasi. Hal ini disebabkan pembangunan infrastruktur fisik dan sosial tidak terjadi secara cepat dan masif mengikuti gerak pertumbuhan perdagangan. Sebagai contoh di Sumatera Utara daerah yang memiliki potensi agro seperti sawit, karet dan kopi mengalami deindustrialisasi dalam dekade

terkahir karena pembangunan infrastruktur trasportasi dan energi yang lambat menyentuh daerah ini. Akibatnya daya saing untuk investasi yang mengembangkan industri juga menurun.

Di sisi lainnya transformasi sosial dan politik dalam kerangka otonomi daerah belum mampu menjadi solusi bagi menahan laju deindustrialisasi. Lemahnya atau lambatnya kerja dan kinerja pemerintahan dalam mengelola konflik sosial, mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengambil kebijakan dalam mendukung pengembangan industri di daerahnya menambah percepatan deindustrialisasi di Sumatera Utara. Wahyu Dosen Ekonomi Universitas Sumatera Utara¹³, menunjukkan masalah lambatnya proses pembangunan kawasan ekonomi khusus Sei Mangke (salah satu basis produksi atau industri berbasis Kelapa Sawit) merupakan representasi dari kombinasi dari buruknya baik efektifitas dan efisiensi kebijakan daerah dalam mengatasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan di kawasan industri, penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur baik untuk pabrik, transportasi dan energi. Selain itu juga ditemukan faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan berupa persaingan antara pelaku usaha dalam mengembangkan basis produksi yang melibatkan dan mempengaruhi persaingan antara pemerintah daerah untuk mendapatkan prioritas pembangunan berbasis keunggulan daerah pada jenis komoditas yang sama. Tarik menarik kepentingan pelaku usaha berbasis sawit di Provinsi Riau atau Sumatera Utara, dan Aceh sebagai pemasok sumber energi, ternyata tidak bisa diatasi melalui instrumen fungsi koordinasi baik horizontal diantara pemerintah

¹³ Wawancara Tanggal 25 Maret 2014

daerah dan juga vertikal oleh pemerintah pusat menambah pelambatan industrialisasi atau sebaliknya mempercepat deindustralisasi sektor sawit di Sumatera Utara. Tarik menarik tersebut berimbang kepada lambatnya pemerintah pusat mempercepat pembangunan pelabuhan sebagai titik akhir produk itu di pasarkan baik ke dalam negeri atau ke luar negeri. Atas hal ini akhirnya bisa dipahami apabila daya saing industri berbasis agro khususnya sawit masih tertinggal di banding Malaysia yang telah berhasil membangun sejumlah infrastruktur untuk mendukung proses produksi dari industri berbasis agro secara terintegrasi.

Persoalan yang dihadapi oleh Sumatera Utara dikeluhkan juga daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti Kalimantan Timur yang juga sebagian berbasis kelapa sawit. Didik Heriyanto Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan¹⁴, melihat bahwa agro industri seharusnya bisa menjadi andalan Kalimantan Timur pasca industri tambang yang akan mencapai tingkat produksi terakhir hingga tahun 2030. Oleh karenanya Kalimantan Timur membutuhkan industri berbasis sumber daya yang umurnya lebih panjang menggantikan industri tambang. Tantangannya peran pemerintah masih rendah dalam mendukung kegiatan penelitian yang menghasilkan inovasi produksi agro dan pengolahannya. Terutama dalam meningkatkan produktivitas di tingkat hulu yaitu produktivitas tanaman, memenuhi kualitas tanaman yang dibutuhkan industri hingga yang langsung ke konsumen rumah tangga.

¹⁴ Wawancara 25 April 2015 di Balikpapan

Dari dua kondisi yang didiskusikan di atas ada dua persoalan terkait membangun industri berbasis agro di Indonesia baik itu di hulu dan hilir. Industri membutuhkan perangkat daya dukung yang beragam dan kompleks untuk memaksimalkan produk sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Masyarakat petani di sisi hulu dan pelaku usaha di sisi hilir membutuhkan, bahkan kalangan akademisi memandang perlunya kehadiran peran pemerintah secara nyata menyelesaikan persoalan yang seharusnya menjalankan fungsi regulasi program pembangunan dan eksekusi anggaran menjalankan peran koordinatif baik skala nasional, antar pemerintah daerah, penciptaan iklim sosial dan usaha yang kondisif, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung kegiatan industri dan membangun keterkaitan antara sisi hulu dan hilir. Keluhan dari pengamat di daerah tersebut membuktikan bahwa di tengah persaingan pasar bebas, peran pemerintah masih besar terutama dalam menentukan alokasi anggaran yang mendukung proses industrialisasi. Dengan kata lain industrialisasi bukan hanya berhenti sekedar membangun pabrik tetapi membangun keterkaitan dari sisi hulu hingga hilir dengan faktor-faktor pendukung lainnya sehingga terbentuk industri berbasis agro dengan daya saing produk yang tinggi di pasar. Jadi pemerintah tidak bisa berhenti sampai ada infrastruktur terbangun sehingga memungkinkan dibangun pabrik pengelohan, tetapi agar itu berkelanjutan dan tidak mengarah pada deindustrialisasi pemerintah perlu mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan industri sebelum dan sesudahnya agar industri terbangun memiliki daya saing, tentunya dalam batas dan kewenangannya dan tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas.

VI. PENUTUP

Berada di dalam atau di luar arus perdagangan bebas bagi Indonesia bukan lagi menjadi perdebatan untuk memilih yang mana, karena sejak 2015 Indonesia telah menjadi bagian dari kesepakatan bersama negara ASEAN untuk memberlakukan *ASEAN Economic Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di dalamnya ada kesepakatan untuk menerapkan perdagangan bebas diantara anggotanya. Kesepakatan tersebut didasari keyakinan perdagangan bebas diantara negara ASEAN akan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat di negara-negara ASEAN. Salah satu yang diperdagangkan secara bebas adalah produk agro.

Bagi Indonesia produk agro adalah komoditas terbesar dan mayoritas penduduknya bekerja di sektor ini, namun diantara negara-negara anggota ASEAN juga memiliki komoditas yang sama. Perlu digarisbawahi bahwa perdagangan bebas bukan sekedar bicara kuantitas tetapi daya saing karena perbedaan daya saing terutama atas komoditas yang sejenis. Itu hanya bisa dikembangkan apabila basis produksi berorientasi industri. Pendekatan kluster industri memanfaatkan *“value network”* dari terintegrasinya sisi hulu dan hilir suatu komoditas dan integrasinya ke pasar akan memperkuat daya saing baik itu efektifitas dan efisiensi produksi.

Beberapa komoditas agro Indonesia memiliki keunggulan daya saing dari komoditas sejenis negara ASEAN. Namun efektifitas dan efisiensi yang tinggi dari industri yang akan menentukan keberlanjutan keunggulan tersebut. Hal yang sama juga bagi komoditas yang masih tertinggal daya saingannya, lagi-lagi

membutuhkan pendekatan industrialisasi *resource based* dengan kluster. Untuk menuju kesana pemerintah dengan kewenangan dan anggaran yang dimilikinya seharusnya mulai secara serius dan terus menerus membangun kawasan dengan infrastrukturnya hingga bukan hanya terbangun pabrik-pabrik tetapi lebih jauh lagi terbangun sistem yang kuat dengan pendekatan kluster. Pendekatan kluster untuk menjawab tren deindustrialisasi, karena selama ini pengembangan industri tampaknya dipisahkan dari faktor-faktor pendukungnya terutama dengan agro industri, seharusnya pemerintah masih ada dalam ruang mendukung pertumbuhan agro industri walaupun di dalam era perdagangan bebas, karena dukungan bukan pada instrumen tarif tetapi menyediakan daya dukung agar industri bisa bersaing dan produknya memiliki keunggulan di pasar.

Daftar Pustaka

- Audretsch, D. B 1998. *Introduction to Industrial Policy and Competitive Advantage*, Vol 1-3, Aldershot: Edward Elgar.
- Austin, J.E. 1981. *Agroindustri Industrial Project Analysis*. Maryland: The John Hopkins University Press.
- Bhagwati, Jagdish N. 2002, *Free Trade Today*, Princeton University Press.
- Bosworth, B. & Broun, D. 1996. Connect the Dots: Using Cluster-Based Strategies to Create Urban Employment. *Firm Connections* 4(2): 1-6.
- Rachel 2002. "Coordination and competition in small business policy: A comparative analysis of Australia and Denmark", *Journal of Economic Issues. Lincoln: Dec 2002. Vol.36*,
- Hadiyanto, Y. R. 2015. Pengaruh Diversifikasi Ekspor Terhadap Pertumbuhan Nilai Tambah Per Tenaga kerja Sektor Manufaktur Berbasis Agro. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 9(2), 179–200.
- International Trade Center, 2006. *Bringing the Poor into the Export Process: Is Linking Small Producers and Big Exporters a Solution?* Agrawal, S.; India Trade Promotion Organization. ITC Executive Forum, International Trade Centre UNCTAD/WTO. Geneva, Switzerland
- ITC. 2005. *Innovations in Export Strategy: Competitiveness through Export Clustering*. ITC Executive Forum, International Trade Centre UNCTAD/WTO. Geneva, Switzerland, ITC.
- Schwab, Klaus. 2016. *The Global Competitiveness Report Tahun 2015-2016*, World Economic Forum.

- Krugman, Paul. 1993. "Protection in Developing Countries" di dalam *Policy Making in The Open Economy*, ed. Dombusch Rudiger, Oxford University Press.
- Nizar, M. A. (2014). *Laporan Dampak Asean Economic Community Terhadap Sektor Industri Dan Jasa* ,Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan.
- Nogales, E. G. (2010). *Agro-based clusters in developing countries: staying competitive in a globalized economy. Agriculture Management, Marketing And Finance Occasional Paper* (Vol. 25). Rome.
- Porter, M. 1998. "Clusters and the New Economics of Competition". *Harvard Business Review*. Available at: <http://hbr.org/product/clusters-and-the-new-economics-of-competition/an/98609-PDF-ENG>
- Rai, D. K. (2010). *Asian Economic Integration and Cooperation: Challenges and Ways Forward for Pan-Asian Regionalism*. Hamburg.

ASPEK KELEMBAGAAN

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING INDUSTRI AGRO INDONESIA (CONTOH KASUS SEI MANGKE DI SUMATERA UTARA & MALOY DI KALIMANTAN TIMUR)

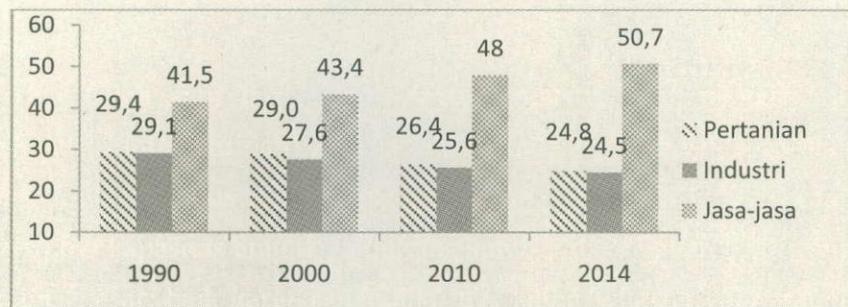
oleh: Rafika Sari

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, sektor industri tidak terlepas dari sektor lain, salah satunya pertanian. Sejak tahun 1990 hingga sekarang, tren perkembangan sektor industri terlinat sejajar dengan perkembangan sektor pertanian. Kondisi ini terlihat ketika sumbangsih sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan menjadi 27,6% pada tahun 2000 dari 29,1% pada tahun 1990, dan bahkan menurun menjadi 24,5% pada tahun 2014, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB juga mengalami penurunan menjadi 29% pada tahun 2000 dari sebesar 29,4% pada tahun 1990 dan menurun menjadi 24,8% pada tahun 2014. Kesamaan tren antara sektor industri dan sektor pertanian ini diawali dengan program pembangunan jangka panjang yang salah satunya menitikberatkan pada industri yang mampu mengolah hasil pertanian, dan menjadikan sektor industri sebagai mesin pertumbuhan (*engine of growth*) perekonomian Indonesia. Hubungan antara sektor industri dan sektor pertanian ini diteliti oleh

Heru Kustanto, dkk.¹ (2013) bahwa pertumbuhan *output* dari cabang industri berbasis pertanian (industri agro) relatif lebih tinggi dibandingkan cabang industri lainnya.

Gambar 1. Persentasi PDB Indonesia Menurut Sektor Tahun 1990, 2000, 2010, dan 2014.



Sumber: Badan Pusat Statistik.

Namun demikian, saat ini hanya sebagian kecil produk industri agro Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Tabel 1 menunjukkan beberapa industri agro Indonesia yang mampu bersaing di dunia, salah satunya minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*), dimana volume produksinya mampu mengalahkan Malaysia sebagai kompetitornya.

¹ Heru Kustanto, Rina Oktaviani, Bonar M. Sinaga, dan M. Firdaus. "Reindustrialisasi dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Makro serta Kinerja Sektor Industri di Indonesia". *Jurnal Riset Industri*, 2012, Vol. 6(1), hal.97-115.

Tabel 1. Produksi dan Rangking Industri Agro Indonesia Tahun 2014.

Produksi	Volume Produksi	Rangking Dunia	Produksi	Volume Produksi	Rangking Dunia
CPO	31 juta ton	No. 1	Kopi	738 ribu ton	No. 4
Kertas	10,9 juta ton	No. 6	Kakao	450 ribu ton	No. 3
Ikan udang	& 10,5 juta ton	No. 2	Rumput laut	237 ribu ton	No. 1
Pulp	6,2 juta ton	No. 9	Teh	147,7 ribu ton	No. 7
Kelapa	3,3 juta ton	No. 1	Rotan	143 ribu ton	No. 1
Karet	3,23 juta ton	No. 2	Lada	88 ribu ton	No. 3

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2015.

Menurut *The Global Competitive Index*, peringkat daya saing Indonesia pada tahun 2016 menurun menjadi 41 dibandingkan tahun 2015 menduduki peringkat 37, walaupun tidak mengalami perubahan nilaiapapun selama periode tersebut. Dalam klasifikasi tahapan pembangunan, Indonesia berada pada tahap kedua dari tiga tahapan,dimana Indonesia bersama dengan 29 negara lainnya termasuk Thailand dinilai masih memerlukan dorongan efisiensi (*efficiency-driven*) untuk meningkatkan daya saingnya. Sementara Malaysia sudah berada selangkah lebih maju dengan berada pada tahap transisi menuju inovasi (*innovation-driven*). Bahkan Singapura satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang telah berhasil berada di tahap ketiga.

Tabel 2. Peringkat dan Nilai GCI Indeks Pada Negara di Asia Tenggara Tahun 2015-2016 dan 2016-2017.

Negara	2015-2016		2016-2017	
	Peringkat (dari 140 negara)	Nilai	Peringkat (dari 138 negara)	Nilai
Singapura	2	5,68	2	5,72
Malaysia	18	5,23	25	5,16
Thailand	32	4,64	34	4,64
Indonesia	37	4,52	41	4,52
Filipina	47	4,39	57	4,36
Brunei Darussalam	n.a	n.a	58	4,35
Vietnam	56	4,30	60	4,31
Laos	83	4,00	93	3,93

Keterangan: n.a = *not available* (data tidak tersedia)

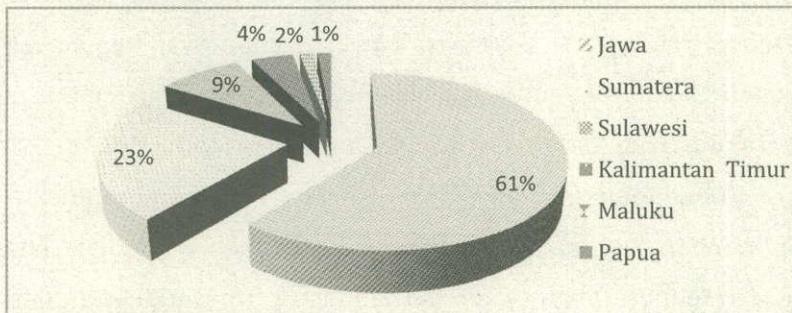
Sumber: *The Global Competitiveness Index 2016-2017*, hal.7

Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya mendukung keberhasilan pembangunan sektor industri agro, pemerintah membangun dan mengembangkan kawasan industri Sei Mengke di Sumatera Utara dan Maloy di Kalimantan Timur. Kawasan industri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 merupakan kawasan tempat pemasaran kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Selain untuk meningkatkan daya saing, pemasaran industri dalam suatu kawasan industri bertujuan untuk (a) mengendalikan pemanfaatan ruang; (b) meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, (c) mempercepat pertumbuhan industri di daerah, (d) meningkatkan daya saing investasi, dan (e) memberikan kepastian

lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait.²

Pendekatan klaster industri dalam suatu kawasan industri menurut Drajad Irianto³ didefinisikan sebagai pengelompokan perusahaan dalam suatu wilayah geografis yang ditujukan untuk menciptakan keunggulan, yang sependapat dengan pengagas konsep klaster industri Porter. Sayangnya, pengelompokan perusahaan menurut wilayah geografis di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan antara wilayah Indonesia timur dan wilayah Indonesia barat. Kondisi ini terlihat dari kawasan industri masih terpusat di wilayah Indonesia barat, yaitu sebesar 84% dari total jumlah kawasan industri, dan terbanyak ada di Pulau Jawa. Gambar 2 menunjukkan bahwa hanya 16% dari total jumlah kawasan industri berada di wilayah Indonesia timur.

Gambar 2. Persentasi Jumlah Kawasan Industri di Indonesia



Sumber: Kementerian Perindustrian.

² Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

³ Drajad Irianto. "Daya Saing Industri Dalam Konteks Perwilayah Industri", *Majalah Kawasan*, Kementerian Perindustrian, Edisi VII, 2014, hal. 17.

Berdasarkan paparan di atas, maka tulisan ini akan mengemukakan: (a) kondisi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri di dengan mengambil contoh kasus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mengke dan Maloy dalam meningkatkan peningkatan daya saing industri agro di Indonesia dan (b) manfaat ekonomi dari pengembangan kawasan industri. Kedua kawasan ini dipilih karena merupakan pusat kegiatan perindustrian hilirisasi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) yang menggunakan kelapa sawit sebagai bahan produksi yang bersifat sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selain itu, pemilihan kedua kawasan ini didasarkan bahwa Sei Mengke di Sumatera Utara mewakili kawasan industri di wilayah Indonesia barat) dan Maloy di Kalimantan Timur mewakili kawasan industri di wilayah Indonesia timur).

Untuk melihat implementasi kebijakan pengembangan kedua kawasan tersebut maka digunakan pendekatan kualitatif berdasar pada teori penentuan lokasi industri. Selanjutnya, digunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab manfaat pengembangan kawasan industri di kedua daerah dengan melihat indikator tingkat kepadatan penduduk, pengangguran, dan jumlah penduduk miskin. Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder meliputi data kawasan industri di Indonesia dari Kementerian Perindustrian, dan data statistik sawit (luas areal dan produksi CPO), data jumlah penduduk, tingkat pengangguran, penduduk miskin, serta laju PDRB dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, informasi juga bersumber dari hasil wawancara dengan akademisi, pimpinan asosiasi sawit, dan narasumber terkait, serta

literatur dan jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan industri di Indonesia.

II. PENGEMBANGANKAWASAN INDUSTRI

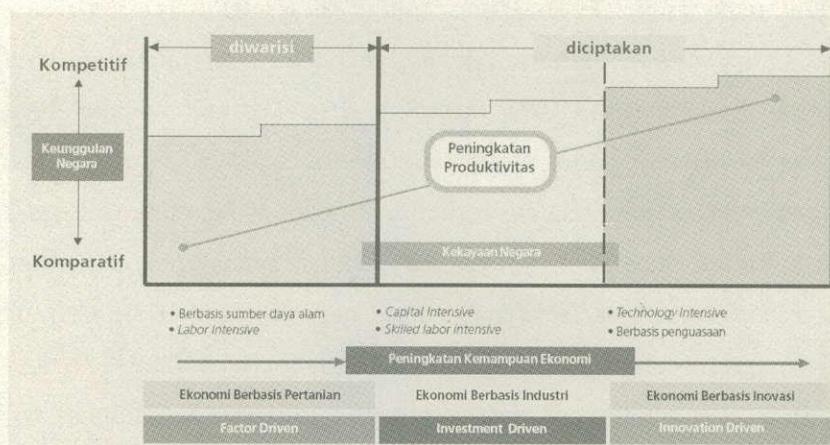
2.1 Penentuan Lokasi Industri

Dari tiga strategi dalam peningkatan kemampuan ekonomi yang dituangkan dalam konsep *The Global Competitiveness*, perekonomian berbasis industri merupakan salah satu upaya peningkatan produktivitas yang “ diciptakan” (*investment-driven*). Munculnya kawasan industri di beberapa daerah di Indonesia merupakan implementasi kebijakan pemerintah yang selaras dengan *Big Push Model* yang dikemukakan oleh Paul Narcyz Rosenstein-Rodan⁴ pada tahun 1943. Dalam model tersebut, upaya distribusi pendapatan yang lebih merata dengan mengejar ketertinggalan skala ekonomi pada wilayah yang kurang maju dilakukan melalui daya dorong (*push*) yang paling efektif, yaitu industrialisasi. Industrialisasi dengan investasi berskala besar dilakukan pada wilayah kurang maju yang memiliki kelebihan tenaga kerja yang menganggur di sektor pertanian. Adapun karakteristik umum negara-negara Eropa Timur dan Tenggara yang kurang maju adalah sektor pertanian. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses industrialisasi adalah (a) mempersiapkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan serta mengubah kebiasaan dan cara pandang sumber daya manusia semula sektor pertanian menjadi sektor industri, dan (b) pemberian upah pada sektor industri lebih tinggi daripada pendapatan yang dihasilkan dari sektor pertanian.

⁴ P.N. Rosenstein-Rodan. "Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe". *The Economic Journal*, 53 (210/211), 1943.

Namun demikian, upaya distribusi pendapatan melalui investasi industrialisasi yang besar tidak semata dikonsentrasi kan pada suatu sektor tertentu. Yang tidak kalah menarik, Hirschman pada tahun 1958 dalam Teori Pertumbuhan Tidak Berimbang (*unbalance growth*), mengemukakan bahwa dibutuhkan pula kaitan-kaitan antarindustri (*linkages*).⁵ Kebutuhan keterkaitan antarindustri dalam suatu lokasi industri juga dikemukakan oleh Teguh⁶ (2010), selain akses sumber daya alam dan energi, sumber daya manusia, modal, pasar dan harga, dan kebijakan pemerintah yang dibutuhkan dalam aglomerasi industri.

Gambar 3. The Global Competitiveness



Sumber: Didik Hadiyanto, Balikpapan, 2015.

⁵ Albert O. Hirschman. "The Strategy of Economic Development". *Studies in Economics*, 10, New Haven, Conn: Yale University Press, 1958.

⁶ Muhammad Teguh. *Ekonomi Industri*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Selain aglomerasi, Dirdjojuwono (2004) menyebutkan bahwa beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi industri, antara lain: (a) bentuk permukaan tanah rata, karena untuk memudahkan pembangunan pabrik; (b) sumber bahan mentah; pasar; (c) ketersediaan tenaga kerja; modal; (d) mempunyai aksesibilitas/ kemudahan pencapaian cukup baik, baik terhadap akses bahan baku, bahan jadi atau hasil produksi dan pusat-pusat transportasi seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara dan stasiun kereta api; (e) memiliki prasarana (infrastruktur) yang lengkap; (f) peranan pemerintah; bebas dari bencana; (g) berdekatan dengan kota; harga tanah yang murah; ketersediaan listrik dan air. Dalam penelitian terhadap 31 industri rotan di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Nino Sutrisno, dkk⁷ (2013), bahwa beberapa variabel yang menentukan pemilihan lokasi industri adalah kedekatan dengan infrastruktur seperti ketersediaan listrik, air, akses jalan, lahan parkir, dan keamanan. Dari kelima variabel ini, ketersediaan listrik yang memiliki indeks tertinggi, karena merupakan kebutuhan utama usaha industri dalam mendukung kegiatan usaha.

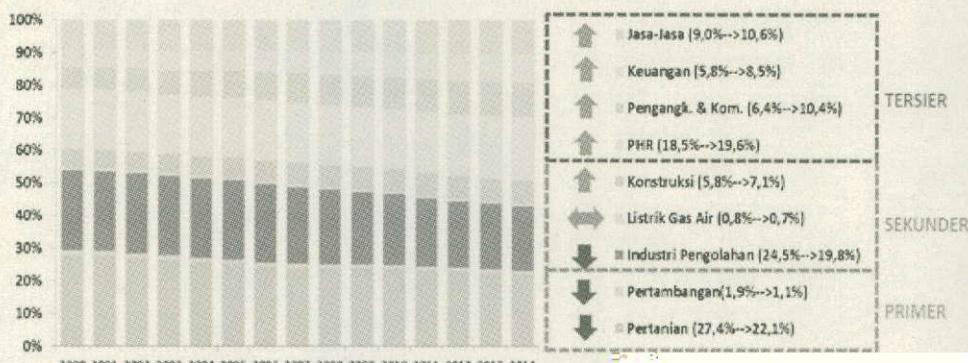
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kawasan industri yang dibangun oleh pemerintah dengan dana yang sangat besar pada suatu daerah juga memerlukan investasi yang simultan pada berbagai sektor ekonomi yang berkaitan dan memerlukan ketersediaan prasarana pendukung yang memadai serta *capital intensive*.

⁷ Nino Sutrisno, Azwar Harahap, dan Rahmat Richard. "Analisis Faktor-Faktor Penentu Lokasi Industri Rotan di Kota Pekanbaru". *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 2013, Tahun IV (10), hal. 72-100.

2.2 Struktur Perekonomian Daerah dan Inisiasi Kebijakan Kawasan

Dalam empat dekade terakhir, struktur perekonomian regional Provinsi Sumatera Utara menunjukkan gejala deindustrialisasi. Sektor industri pengolahan mengalami penurunan seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, Wahyu⁸ (2015) menyatakan bahwa terjadi pergeseran struktur ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dari sektor primer dan sekunder ke sektor tersier. Selama periode tahun 2000-2014, sumbangan sektor primer dan sektor sekunder mengalami penurunan. Kedua sektor primer baik sektor pertambangan maupun pertanian mengalami penurunan. Sedangkan pada kelompok sektor sekunder, sektor industri pengolahan yang mengalami penurunan, yaitu dari 24,5% pada tahun 2000 menjadi 19,8% pada tahun 2014.

Gambar 4. Persentasi PDB Provinsi Sumut Menurut Sektor
Tahun 2000-2014.



Sumber: BPS.

⁸ Wahyu Ario Pratomo. "Perkembangan Industri di Indonesia dan Sumut dalam Menghadapi MEA 2015". *Makalah FGD*, Medan, Maret 2015.

Pengembangan KEK Sei Mangke seluas 2.002 hektar menjadi suatu solusi menekan gejala deindustralisasi yang terjadi dan bertujuan untuk merangsang kembali peningkatan sektor industri di Sumatera Utara. Adapun alasan penetapan kawasan ini di Sumatera Utara karena perkembangan kawasan industri Batam yang juga berada di Pulau Sumatera mengalami stagnasi pasca terbentuk (*Free Trade Zone*) FTZ Batam. Berdasarkan paparan Plt. Gubernur Kepulauan Riau⁹(2016) diketahui bahwa penyebab stagnasi FTZ Batam karena terdapat aturan dan kebijakan yang tumpang tindih antarkementerian yang dinilai menghambat pergerakan dunia usaha di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Menurut koordinasi pimpinan daerah, se Indonesia, saat ini terdapat 21.000 undang-undang dan 3.000 peraturan daerah yang tidak “pro” terhadap dunia investasi. Dinamika regulasi dianggap bias terhadap Kepulauan Riau dan menyebabkan polemik bagi dunia usaha terkait kewajiban/tugas ataupun tanggungjawabnya.

Stagnasi FTZ Batam ini mendorong pemerintah untuk menumbuhkan suatu kawasan lain di Sumatera Utara. Kawasan Sei Mangke, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke, berlokasi di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara, yang berjarak 40 kilometer dari Pelabuhan Kuala Tanjung. Dorongan pembangunan sebagai satelit program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bagian barat ini menganut *Big Push Model* yang tentunya

⁹ Paparan Plt. Gubernur Riau pada Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016, 9-13 Mei 2016.

membutuhkan investasi yang sangat besar dengan nilai mencapai Rp5,7 triliun, yang berkonsentrasi pada sektor klaster industri hilir kelapa sawit.

Namun demikian, menariknya, ide pembangunan kawasan ini jauh lebih dulu diinisiasi oleh PT. Perkebunan Nusantara III, yang kala itu merupakan salah satu dari Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan, dan memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang mengolah sawit menjadi CPO dengan kapasitas 30 ton perjam TBS. Kemudian PKS diperluas menjadi kawasan industri, dan selanjutnya dikembangkan menjadi KEK dengan lokasi di areal milik PT. Perkebunan Nusantara III. Melihat sumber inisiasi pembangunan, kebijakan pembangunan KEK Sei Mangke dapat dikatakan sebagai kebijakan yang bersifat "*bottom up*".

Sementara itu, melihat potret daerah, Kalimantan Timur dimana KEK Maloy berlokasi merupakan provinsi yang memiliki PDRB tertinggi kedua di luar Pulau Jawa setelah Riau, dengan nilai PDRB sebesar Rp579 triliun pada tahun 2014. Dari Gambar 5 terlihat bahwa Kalimantan Timur termasuk daerah makmur yang mengandalkan sektor primer dimana pertambangan sebagai sektor perekonomian daerah yang utama, dan diikuti dengan sektor sekunder yang dikontribusikan oleh industri pengolahan yang juga didominasi sektor migas. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena sumber daya alam yang bersifat *unrenewable* pada titik tertentu akan habis terkuras dan tentunya akan berhenti menopang perekonomian daerah. Penurunan ini terlihat dari kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kalimantan Timur telah menurun secara perlahan-lahan selama periode tahun 2010-2014. Oleh karena itu, pertanian memiliki potensi yang penting untuk menggantikan

posisi sektor pertambangan pada masa depan. Begitu pula dengan industri pengolahan di bidang non migas, sangat diharapkan mampu berperan untuk menggantikan industri pengolahan migas yang akan mengalami stagnasi akibat kekurangan bahan baku yang berasal dari migas.

Gambar 5. Persentasi PDB Provinsi Kaltim Menurut Sektor
Tahun 2010-2014.



Sumber: Badan Pusat Statistik.

Berbeda dengan KEK Sei Mangke, keberadaan KEK Maloy termasuk kebijakan pemerintah yang bersifat *"top down"*, didasarkan pada rencana percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada Koridor Ekonomi Kalimantan. Satu dari empat simpul yang dikembangkan pada koridor ini adalah simpul kelapa sawit. Mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 2010, kawasan industri yang terletak di Kecamatan Kaliurang dan Sangkulirang pada Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur semula dikenal dengan nama Kawasan

Industri Maloy. Kemudian, kawasan seluas 5.305 hektar dinaikkan statusnya menjadi KEK Maloy melalui PP No. 85 Tahun 2014. Pembangunan KEK Maloy diharapkan dapat menyaingi kluster sawit Lahad Datu di Malaysia.

III. KONDISI DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Proses industrialisasi melalui pengembangan kawasan industri pada suatu daerah memberikan eksternalitas secara ekonomi terhadap wilayah sekitarnya. Dalam penelitian oleh Djakaria¹⁰, diketahui bahwa pembangunan kawasan industri di Bekasi menimbulkan alih fungsi lahan sawah dan lahan kering di daerah kawasan industri dan pergeseran mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan, dan jasa. Rayi dan Wilmar¹¹ berpendapat bahwa dua aspek yang dapat dilihat akibat peran pengembangan suatu sektor ekonomi terhadap perekonomian wilayah, yaitu dampak langsung dari sisi permintaan agregat dan dampak lanjutan yang timbulkan dalam menggerakkan perekonomian lokal. Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat dampak langsung adalah besarnya kontribusi setiap sektor terhadap perekonomian wilayah, tingkat konsentrasi aktivitas ekonomi suatu wilayah; kinerja dan tingkat daya saing aktivitas

¹⁰ Djakaria M. Nur. "Dampak Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi Terhadap Alih Fungsi Lahan dan Mata Pencaharian Penduduk." *FPIPD Universitas Pendidikan Indonesia*, (http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/194902051978031-DJAKARIA_M_NUR /ARTIKEL.pdf, diakses 25 Juni 2016).

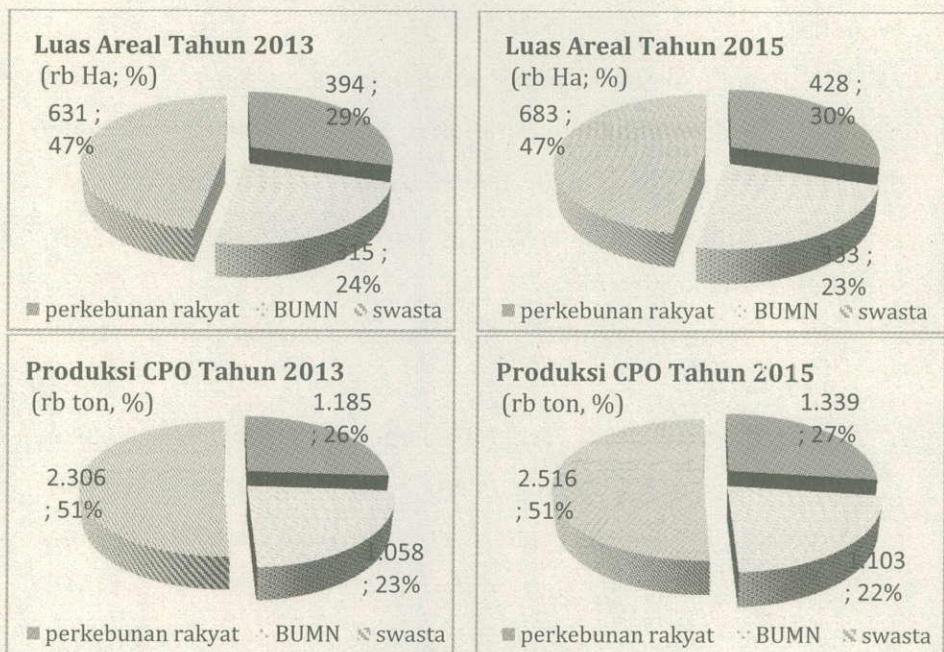
¹¹ Rayi Paramita dan Wilmar Salim. "Peran Pengembangan Sektor Industri Terhadap Perekonomian di Kawasan Metropolitan Bandung Raya". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK*, 4(2), hal. 361-372.

ekonomi. Sedangkan ukuran yang digunakan dampak tidak langsung adalah keterkaitan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dalam penyediaan input produksi dan pendistribusian output produksi.

Di bawah ini dipaparkan kondisi kawasan Sei Mangke dan Maloy dilihat dari faktor penentu lokasi berikut permasalahan yang dihadapi, antara lain sumber bahan baku, sumber daya manusia, pasokan energi, aksesibilitas dari/ke kawasan, dan *linkage* industri yang tersedia di kawasan.

3.1. Ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku utama

Gambar 6. Luas Areal dan Produksi CPO Menurut Status Pengusahaan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 dan 2015.



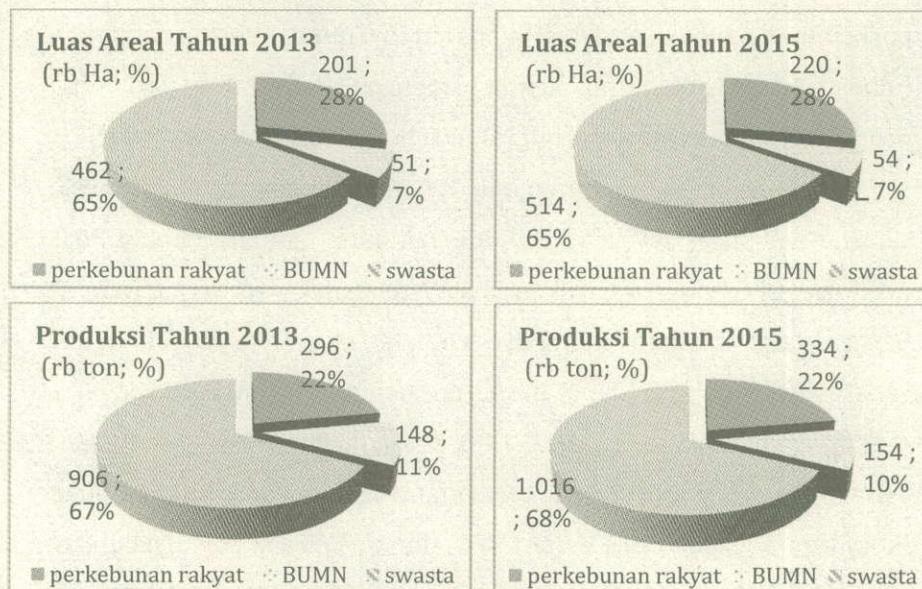
Sumber: BPS, Statistik Kelapa Sawit 2014, diolah.

Di Provinsi Kalimantan Timur, areal perkebunan sawit Provinsi Kalimantan Timur tercatat telah mencapai 1 juta hektar pada tahun 2015.¹² Areal di provinsi tersebut menduduki tempat keenam terluas di Indonesia, dan ketiga terluas di Pulau Kalimantan, setelah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Dari 1 juta hektar areal sawit, menghasilkan 10,8 juta ton produk CPO pada tahun 2015. Sama halnya dengan Provinsi Sumatera Utara, sebagian besar areal sawit Provinsi Kalimantan Timur dikelola oleh perkebunan besar

¹² BPS. *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2016*. BPS Prov. Kaltim, hal. 145-146.

swasta (65% dari total areal sawit daerah) sementara BUMN hanya memiliki 7% dari total areal sawit di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 7. Luas Areal dan Produksi CPO Menurut Status Pengusahaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dan 2015.



Sumber: BPS, Statistik Kelapa Sawit 2014, diolah.

Keunikan kedua kawasan (Sei Mangke dan Maloy) yang berada di sentra bahan baku berbasis agro (dalam hal ini sawit), tidak dimiliki oleh kawasan industri lainnya di Indonesia. Pemilihan lokasi kedua kawasan ini tentunya karena mendekatkan pada lokasi sumber bahan baku untuk memastikan pasokan sumber bahan baku tersedia. KEK Sei Mangke berada di Kecamatan Bosar Maligas yang memiliki kontribusi sektor pertanian sawit kedua terbanyak dari 31 kecamatan di Kabupaten Simalungun, dengan produksi sawit sebesar

57,7 ribu ton¹³, setelah Kecamatan Hatonduhan (246,6 ribu ton produksi sawit). Sementara Kabupaten Kutai Timur di mana KEK Maloy berlokasi, memiliki areal perkebunan sawit terbesar di antara 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan menghasilkan produksi CPO terbesar pula. Dari total areal perkebunan sawit di Provinsi Kalimantan Timur, 39% di antaranya (atau seluas 424,3 ribu hektar) menghasilkan 53% dari total produksi CPO provinsi tersebut (atau sebesar 5,69 juta ton).¹⁴

Walaupun CPO saat ini menjadi komoditas unggulan Indonesia sebagai penghasil devisa setelah minyak bumi dan gas, namun 80% produksi CPO yang dihasilkan masih diekspor secara mentah ke negara lain. Dengan dominasi volume ekspor CPO di dunia, seharusnya Indonesia dapat berperan menjadi penentu harga (*price setter*) CPO dunia. Ironisnya, CPO yang diekspor ke luar negeri dengan jumlah besar justru telah menyebabkan ketidakmampuan Indonesia sebagai *price setter* CPO dunia. Kondisi ini disebabkan karena perilaku harga CPO Indonesia lebih banyak tergantung pada faktor kebutuhan (*demand*) dunia dibandingkan dengan faktor kebutuhan (*demand*) domestik.¹⁵

Sensitivitas harga CPO menentukan keberlangsungan petani sawit selain faktor perubahan iklim. Kecenderungan yang terjadi menurut Serikat Petani Indonesia¹⁶ bahwa petani sering dirugikan

¹³ BPS. *Statistik Daerah Kecamatan Bosar Maligas 2014*. BPS Kabupaten Simalungun, 2014.

¹⁴ *Op. Cit.*, Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2016, hal.145-146.

¹⁵ Rafika Sari. "Rencana Kebijakan Crude Palm Oil Supporting Fund". *Info Singkat Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol.VIII(7), 2015, hal.14.

¹⁶ Serikat Petani Indonesia. "Kerasukan Neoliberal Penyebab Turunnya Harga Sawit", 30 Oktober 2008, (<http://www.spi.or.id/penyebab-turunnya-harga-sawit/>, diakses 2 Agustus 2016).

pada saat harga CPO turun, sementara tidak sebaliknya, di mana petani sawit tidak memperoleh keuntungan maksimal ketika harga CPO meningkat. Kestabilan harga memberikan motivasi bagi petani untuk tetap menanam sawit dalam jangka yang cukup panjang dan dengan harapan menerima keuntungan di masa mendatang dari produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, keberadaan Sei Mangke dan Maloy sebagai pusat hilirisasi sawit diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan industri domestik terhadap CPO dengan menyerap produksi CPO yang dihasilkan oleh petani sawit lokal sehingga kelak Indonesia mampu berperan sebagai *price setter* CPO dunia dan tetap mengutamakan kesejahteraan petani sawit.

Selain faktor harga, dari hasil wawancara dengan Azmal Ridwan¹⁷, Ketua Gabungan Pengusaha Sawit (Gapki) Kaltim diketahui bahwa banyak petani sawit di Kalimantan Timur tidak lagi memiliki keinginan (*fighting spirit*) untuk meningkatkan produksi sawit karena tidak adanya arahan dan bimbingan dari pemerintah daerah kepada petani sawit. Memang diakui bahwa petani menerima benih sawit yang diberikan secara gratis dari pemerintah daerah namun sayangnya tidak diajarkan cara bertanam dan cara meningkatkan produksi sawit.

Sementara itu bagi pengusaha sawit, tidak adanya *one stop service* dalam perizinan budi daya sawit menjadi kendala yang serius dalam proses pembukaan lahan. Dalam beberapa kasus, pengusaha sawit sering dihadapkan pada tuduhan perambahan hutan, padahal sebelumnya telah memiliki izin kawasan budi daya nonkehutanan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Sdr. Azmal Ridwan pada FGD Penelitian tentang Kesiapan Industri Agro Indonesia dalam Menghadapi MEA 2015, Universitas Balikpapan, 2015.

yang dikeluarkan oleh instansi terkaitnya. Ketidaksinkronan perizinan antarinstansi disebabkan karena mengacu pada peta yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi. Padahal, dilihat dari biaya yang dikeluarkan, pengusaha sawit telah mengeluarkan sejumlah biaya yang tidak sedikit jumlahnya pada pengajuan izin pembukaan lahan. Pada tahap awal, izin pemanfaatan lokasi diberikan kepada pengusaha sawit selama 1 tahun. Namun demikian pengusaha belum dapat mulai bekerja karena belum tersedianya peralatan. Kemudian, permohonan izin pendaratan alat berat dari instansi lain diajukan pada tahap selanjutnya. Lagi-lagi, dalam proses menunggu alat berat didatangkan ke lokasi perkebunan, pengusaha sawit tidak dapat melakukan apapun, sehingga masa waktu izin 1 tahun yang diberikan berakhir tanpa melakukan kegiatan apapun.

3.2. Pasokan sumber daya manusia

Setelah selesai dibangun, KEK Sei Mangke dan KEK Maloy diperkirakan menyerap banyak tenaga kerja. Sei Mangke dengan investasi sebesar 123,3 triliun hingga tahun 2015, dan mampu menyerap 83.304 tenaga kerja. Kemudian, Maloy dengan investasi sebesar 21,5 triliun selama periode tahun 2012-2015¹⁸. Melihat investasi kawasan yang sangat besar, sungguh ideal apabila penyerapan tenaga kerja pada kawasan diprioritaskan dari putera daerah seperti dari Kecamatan Bosar Maligas yang berada di wilayah KEK Mangke dan kecamatan lainnya di Kabupaten Simalungun, dan

¹⁸ Alfino Rinaldi Arief. "Prediksi Dampak Pengembangan Kawasan Industri Maloy Terhadap Perekonomian Kaltim". *Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik UI*, 19 Januari 2015, (<http://mpkp.feb.ui.ac.id/prediksi-dampak-pengembangan-kawasan-industri-maloy-terhadap-perekonomian-kaltim/>, diakses 25 Juli 2016).

dari Kecamatan Kaliurang dan Kecamatan Sangkulirang yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur di mana KEK Maloy berlokasi.

Berdasarkan potensi angkatan kerja, jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Bosar Maligas yang berusia diatas 15 tahun hanya mencapai 27.753 orang dari total penduduk Kecamatan Bosar Maligas sejumlah 40.136 orang pada tahun 2014¹⁹. *Supply* angkatan kerja dari wilayah Kecamatan Bosar Maligas hanya sebesar 33% dari kebutuhan tenaga kerja. Dilihat dari mata pencaharian, sebagian besar masyarakat di sekitar KEK Sei Mangke bekerja sebagai buruh di perkebunan pada PT. Perkebunan Nusantara III. Sebagian kecil penduduk yang memiliki area perkebunan sawit rakyat dengan luas yang relatif kecil antara 1 hingga 2 hektar, yaitu sebanyak 2.071 petani²⁰ atau 5,2% dari penduduk di Kecamatan Bosar Maligas pada tahun 2014.

Begitu pula apabila dilihat pada tingkat kabupaten, mata pencaharian penduduk di Kabupaten Simalungun tidak jauh berbeda dengan penduduk di Kecamatan Bosar Maligas. Sebagian besar penduduk pada Kabupaten Simalungun bekerja di sektor pertanian, yaitu 54% dari total penduduk Kabupaten Simalungun pada tahun 2015 atau sebanyak 208.481 orang. Hanya 11% dari total penduduk Kabupaten Simalungun yang bekerja pada sektor industri pengolahan atau sebanyak 42.934 orang.

Karakteristik mata pencaharian penduduk di Kabupaten Kutai di mana Maloy berlokasi tidak jauh berbeda dengan penduduk di sekitar kawasan Sei Mangke. Dari 129.058 penduduk yang bekerja di

¹⁹ *Op. Cit.*, Kecamatan Bosar Maligas Dalam Angka 2015.

²⁰ *Ibid.*

Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2015²¹, 58% diantaranya bekerja di sektor pertanian dan pertambangan. Hanya 1,4% dari 129.058 penduduk yang bekerja di Kabupaten Kutai Timur pada sektor industri. Berdasarkan tingkat pendidikan, hanya 25% pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2015 yang mengecap bangku pendidikan tinggi. Sebagian besar masih berada di bangku pendidikan menengah atas.

Dari paparan di atas pada kedua kawasan tersebut, terlihat bahwa kapasitas sumber daya manusia di wilayah kawasan tidak memadai dalam memenuhi permintaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei dan KEK Maloy, baik dilihat dari jumlah maupun kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan tidak memiliki kemampuan/ketrampilan bekerja di sektor industri. Permasalahan yang akan timbul kemudian adalah standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu industri diyakini lebih tinggi dari standar pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja setempat. Polemik terjadi ketika kawasan ini beroperasi, apakah akan memberdayakan putra daerah dengan kualifikasi yang dibawah standar ataukah mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah. Tentunya ini berpotensi menimbulkan kerawanan/kecemburuan sosial.

Padahal, untuk mengurangi kesenjangan kualitas kebutuhan tenaga kerja, Kementerian Perindustrian telah membuat tempat pelatihan (BLK) bagi masyarakat di sekitar KEK Sei Mangke untuk mempersiapkan tenaga kerja pada industri yang akan berinvestasi. Sangat disayangkan berdasarkan wawancara diketahui bahwa 70

²¹ *Op. Cit.*, Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2016, hal. 45.

penyuluhan tani lapangan (PTL) yang ditugaskan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara memberikan penyuluhan mengenai industri pengolahan sawit tidak berjalan efektif, dan terkendala karena tuntutan akan kenaikan status pegawai dan insentif yang dipotong.

Upaya untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai sebenarnya pernah dirintis oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui pelatihan bagi sejumlah sarjana pertanian untuk bekerja di areal perkebunan sawit. Namun, mengalami kegagalan. Sebagian besar sarjana tersebut kembali dengan alasan antara lain kondisi perkebunan yang sepi dan jauh dari perkotaan sehingga memilih bekerja di perkotaan dibandingkan bekerja di wilayah hutan/perkebunan yang sebenarnya relevan dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Sebagian lagi merasa solider dengan teman yang pulang kampung, sehingga mereka kembali ke kampung juga. Sebaliknya, tidak demikian dengan tenaga kerja lulusan SMA yang justru lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan perkebunan/hutan. Dari pengalaman tersebut disimpulkan bahwa jenjang pendidikan tinggi di bidang terkait yang dimiliki seseorang tidaklah menjamin keunggulan seseorang di bidangnya, sebaliknya yang diperlukan adalah ketrampilan tertentu dan kemauan bekerja keras. Pendapat senada dikemukakan oleh Didik Hadiyanto²², Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan, bahwa tidak hanya *capital intensive* dalam membangun suatu kawasan industri yang diperlukan dalam peningkatan ekonomi berbasis industri, namun juga memerlukan *skilled labor intensive*. Oleh karena itu, untuk memenuhi

²² Didik Hadiyanto, "Kesiapan Sektor Industri Agro Dalam Menghadapi MEA 2015". *Makalah FGD*, Universitas Balikpapan, 2015.

kebutuhan sumber daya manusia, sebaiknya pemerintah perlu memfokuskan juga pada pembenahan sumber daya manusia yang "siap pakai" melalui pembangunan sekolah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berkualitas di daerah kawasan industri baik Sei Mangke maupun Maloy.

3.3. Pasokan Energi

KEK Sei Mangke hingga saat ini masih menghadapi masalah kekurangan pasokan listrik. Penambahan pasokan listrik yang ditargetkan sebesar 10 MW oleh PT. PLN belum terwujud. Target ini mundur dari ketetapan bersama antara Dewan Kawasan KEK Sumut dengan PT. Perkebunan Nusantara III, PT. PLN dan PT. Harkat Sejahtera sebelum peresmian operasional KEK Sei Mangke. Pasalnya, pembangunan jaringan SUTM sepanjang 17,5 km oleh PT. Harkat Sejahtera yang ditargetkan paling lambat pada minggu ke-2 bulan Februari 2015, mengalami kemunduran menjadi tanggal 11 Maret 2015. Dan saat ini, progres pekerjaannya masih tersisa sepanjang 0,6 km yang belum terbangun. Karena itu, diperlukan alternatif sumber listrik lainnya, sebagai antisipasi apabila pembangunan jaringan masih terkendala.²³

Penetapan tarif listrik dari Pemerintah Kabupaten Simalungun yang ditargetkan paling lambat 26 Februari 2015, juga mundur menjadi April 2015. Keterlambatan ini disebabkan karena PT. Perkebunan Nusantara III belum menyampaikan permohonan penetapan tarif listrik ke Pemerintah Kabupaten

²³ Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. "Kebutuhan Listrik: KEK Sei Mangkei PTPN 3 Pastikan Akhir Maret Terpenuhi". 27 Maret 2015, (<http://kek.ekon.go.id/kebutuhan-listrik-kek-sei-mangkei-ptpn-3-pastikan-akhir-maret-terpenuhi/>, diakses 27 Mei 2015).

Simalungun. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa belum adanya Peraturan Kabupaten Simalungun tentang penetapan tarif listrik mengakibatkan PT. Harkat Sejahtera, sebagai penerima tugas, belum dapat memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Kawasan Sei Mangke. Pemenuhan pasokan listrik di kawasan ini terhambat regulasi pemerintah daerah. Listrik merupakan sarana dasar yang diperlukan dalam pembangunan suatu kawasan. Ketidaktersediaan listrik di KEK Sei Mangke menyebabkan minimnya investor yang menanamkan modalnya di kawasan hingga saat ini.

Sementara itu, KEK Maloy baru saja diresmikan oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung pada akhir tahun 2014, yang terdiri dari Kawasan KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) Maloy, Kawasan Batuta Chemical Industry Project (BCIP), dan Trans Kalimantan Economic Zone (TKEZ). Namun melihat rasio elektrifikasi di Kabupaten Kutai Timur yang rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, maka pasokan listrik di Kutai Timur dinilai belum cukup memenuhi konsumsi rumah tangga. Apalagi, untuk kebutuhan listrik investasi. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, dukungan listrik masih dipenuhi dari perusahaan swasta, PT Daya Lestari yang merupakan anak perusahaan dari Teladan Prima Group (TPG) dengan membangun IPP (*Independent Power Producer*), pembangkit biogas dari limbah POME (*Palm Oil Mill Effluent*) kelapa sawit dan biomassa dari janjang kosong dan cangkang. Pasokan listrik sebesar 10 MW akan diimplementasikan di Kabupaten Kutai Timur dan sisanya di Berau

sebesar 6 MW.²⁴ Selain biomassa sawit PT. Daya Lestari, pembangkit listrik yang juga diresmikan pada peresmian KEK Maloy adalah pembangkit listrik tenaga biogas PT. Prima Mitra Jaya Mandiri, serta pembangkit listrik tenaga biomassa sawit dan perdana biogas PT. Rea Kaltim Plantation.²⁵

3.4. Aksesibilitas Ke/Dari Kawasan

Konsep pengembangan Kuala Tanjung sebagai Kota Pelabuhan Modern Baru, dengan kapasitas lebih besar sehingga mampu menarik cargo yang melewati Selat Malaka yang terintegrasi dengan Kawasan Sei Mangkei merupakan upaya pemerintah guna meningkatkan daya saing produk industri agro Indonesia. Berikut adalah kondisi dan aksesibilitas ke/dari KEK Sei Mangke yang berlokasi dekat dengan Pelabuhan Kuala Tanjung, di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara berikut kendala yang dihadapi.

Pertama, pembangunan jalur kereta api sepanjang 21,5 km dari KEK Sei Mangke ke Pelabuhan Kuala Tanjung masih tertunda karena terkendala pembebasan lahan. Dari total 21,5 km jalur kereta api, lahan yang sudah bisa digunakan membangun rel kereta api baru sepanjang 14,2 km yang diberikan Otorita Asahan, sedangkan lahan

²⁴ Kabupaten Kutai Timur. "TPG Bangun IPP 16 MW Untuk Distribusikan Listrik Bagi Masyarakat Kutim", 29 September 2015, (<http://humas.kutaitimurkab.go.id/index.php/home/detail/1309/tpg-bangun-ipp-16-mw-untuk-distribusikan-listrik-bagi-masyarakat-kutim>, diakses 20 Agustus 2016).

²⁵ "CT Resmikan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan".*Bisnis Indonesia*, 16 September 2014, (<http://kabar24.bisnis.com/read/20140916/78/257700/ct-resmikan-kek-maloy-batuta-trans-kalimantan>, diakses 20 Agustus 2016.)

warga sepanjang 4 hingga 7 km yang terkena jalur kereta api di Kecamatan Medang Deras sama sekali belum bisa dibebaskan.²⁶

Kedua, infrastruktur jalan belum memadai karena (a) proses pelelangan proyek pembangunan jalan rigid beton sepanjang 6 km baru dilaksanakan pada bulan April 2015 padahal jadwal konstruksi jalan rigid beton ditargetkan semula pada awal bulan Maret 2015²⁷ dan (b) kendala anggaran infrastruktur yang dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terpotong pada tahun 2014, sehingga pembangunan jalan menuju kawasan KEK Sei Mangke menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Simalungan dan belum bisa diselesaikan. Adapun jalan menuju KEK Sei Mangke merupakan jalan kabupaten yang masih berukuran kecil.

Gambar 8. Konsep Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung



Sumber: PT. Pelindo I (Persero), Maret 2015.

²⁶ "Pembangunan Rel Kereta Api KEK Sei Mangke Terhambat". *Starberita.com*, 8 Januari 2015, (http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=158059&catid=37&Itemid=457, diakses 1 Oktober 2015).

²⁷ *Op. Cit.*, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

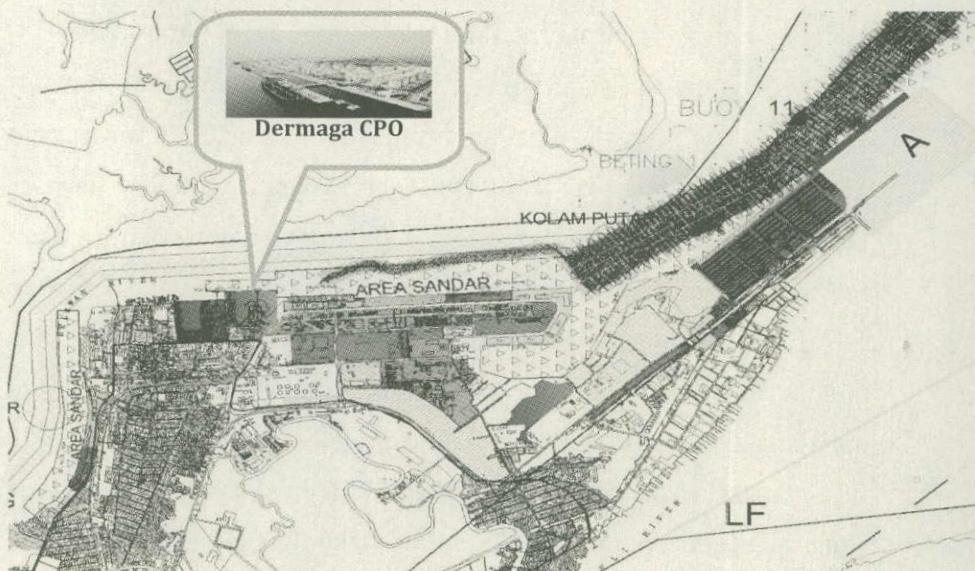
Ketiga, wilayah Pelabuhan Kuala Tanjung yang diintegrasikan dengan KEK Sei Mangke sebagai sarana distribusi produk industri khususnya industri agro mengalami masalah sedikit pembebasan lahan. Negosiasi pembebasan sedikit lahan di wilayah ini terkendala oleh ego masyarakat setempat. Belum selesainya pembebasan lahan menyebabkan pembangunan jalur listrik belum dapat dilakukan secara menyeluruh di Kuala Tanjung. Pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan menjadi pelabuhan terbesar yang ada di Indonesia bagian Barat dengan target kapasitas pelabuhan ini sebesar 60 juta Teus per tahun, sementara Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta hanya mampu mencapai kurang lebih 15 juta Teus per tahun. Selain kendala pembebasan lahan, status Pelabuhan Kuala Tanjung yang menjadi *Free Trade Zone* telah menyebabkan nasib KEK Sei Mangke semakin tidak jelas.

Jauh sebelum Pelabuhan Kuala Tanjung dibangun oleh pemerintah, swasta lebih dahulu membangun tiga pelabuhan berupa terminal curah di wilayah Kuala Tanjung untuk operasional internal perusahaan. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT. Domba Mas, The Bakrie Sumatera Plantations, Tbk, dan PT. Wilmar, yang menyelenggarakan usaha di bidang perkebunan karet dan kelapa sawit serta pabrik pengolahan karet dan kelapa sawit. PT. Inalum pun memiliki pelabuhan sendiri untuk kepentingan internal. Ketidakjelasan saran ~~peralihan~~ dari pemerintah tidak menghalangi swasta untuk bergerak dengan kualitas minim.

Bahkan untuk mendukung kesiapan industri khususnya CPO di Sumatera Utara, maka pemerintah melalui PT. Pelindo I (Persero) juga akan mengembangkan dermaga khusus CPO pada

Pelabuhan Belawan. Dari hasil wawancara dengan PT. Pelindo I (Persero) diketahui bahwa pengembangan alur pada Pelabuhan Belawan diproyeksikan mampu menurunkan 10% dari biaya logistik di Pelabuhan Belawan, yang tentunya akan meningkatkan daya saing dengan tujuh kriteria kunci jasa kepelabuhanan, seperti (a) *road/rail connectivity*, (b) *waiting time*, (c) *productivity*, (d) *tariff & pricing*, (e) *draft & infrastructure*, (f) *liner connectivity*, dan (g) *management*.

Gambar 9. Pengembangan Dermaga CPO di Pelabuhan Belawan



Sumber: PT. Pelindo I (Persero), Maret 2015.

Secara geografis, lokasi Maloy sangat strategis karena terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional dan masuk jalur interkoneksi Kalimantan dan Sulawesi. Sebagai akses menuju/dari KEK Maloy, telah dikembangkan Pelabuhan Maloy dan jalan kereta api. Pertama, keberadaan pelabuhan/terminal khusus CPO di Pelabuhan Maloy diarahkan sebagai pintu gerbang distribusi dan

koleksi seluruh hasil industri dan pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Kutai Timur. *Kedua*, jalur kereta api dengan dua rute yaitu rute Muara Wahau–Lubuk Tutung dengan panjang 135 km dan rute Tabang–Lubuk Tutung dengan panjang 185 km.

3.5. *Linkage Industri*

Melihat potensi bahan baku, industri pengolahan sawit merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan KEK Sei Mangke. Keberadaan pabrik yang telah ada saat ini antara lain:^{28(a)} (a) pabrik pengolahan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara dari semula 30 ton perjam TBS telah ditingkatkan menjadi 75 ton perjam TBS, (b) pabrik *palm kernel oil* (PKO) berkapasitas 400 liter perhari, dan (c) pabrik biodiesel, *betacaroten*, *fatty acid*, dan oleokimia, akan merangsang masuknya industri lain yang berintegrasi ke kawasan tersebut. Tentunya, keberadaan industri hilirisasi ini akan memberikan nilai tambah sawit Indonesia dibandingkan hanya melakukan ekspor CPO semata ke negara lain.

Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa salah satu investor yang sudah beroperasi di KEK Sei Mangke hingga sekarang adalah PT. Unilever Oleochemical Indonesia (UOI). Perusahaan ini memiliki pabrik untuk mengolah bahan baku berbahan dasar kelapa sawit atau *crude palm kernel oil* (CPKO) menjadi *fatty acid*, *glicerine* dan *soap noodle* untuk nantinya digunakan dalam pembuatan produk-produk konsumen terutama sabun, shampo dan detergen.

Jauh sebelumnya, pada tahun 2011, PT. Ferrostaal Indonesia (mewakili Ferrostaal AG, Jerman) telah melakukan penandatanganan

²⁸ Kementerian Perindustrian. "Kebijakan Sei Mangke Tak Kalah Beradu dengan Malaysia". *Majalah Media Industri*, 2012, No.01, hal.16-17.

Joint Venture and Shareholders Agreement dengan PT Perkebunan Nusantara III sebagai langkah percepatan pembangunan KEK Sei Mangkei. Adapun PT. Ferrostaal Indonesia merupakan industri biodiesel yang terintegrasi dengan industri *Ä-Y-carotene, surfactant, fatty alcohol dan refinery*. Calon investor lainnya adalah (a) PT. Aozora Bioresource (mewakili Gianazza Engineering, Italia), (b) MEC-Minerals, Energy, Commodities (Uni Emirat Arab), (c) PT. Multi Agro Gemilang Plantation, (d) PT. Golden Westindo Artaja, (e) PT. Eco Palm Industrial, (f) PT. Danareksa, (g) PT. Hasil Abadi Perdana, dan (h) PT. MedcoDownstream.

Namun yang terjadi bahwa sebagian besar calon investor mengurungkan niat untuk segera masuk ke kawasan dan bahkan mencari lokasi lain yang lebih strategis, seperti Dumai di Sumatera dan dekat dengan Selat Malaka. Padahal, efek dari gejala desentralisasi di Provinsi Sumatera Utara juga telah menyebabkan banyak eksportir hengkang, khususnya eksportir hasil produksi perkebunan Indonesia. Kalau dibiarkan berlarut, kondisi kawasan akan semakin terpuruk. Oleh karena itu, perlu peran pemerintah untuk merangsang investor dengan memberikan perlakuan khusus berupa insentif bagi investor yang menanamkan modal pada kawasan industri di Indonesia, secara khusus kawasan industri di luar Pulau Jawa.

Tiga jalur hilirisasi minyak sawit diproyeksikan di Maloy.²⁹ Pertama, jalur hilirisasi oleopangan, yang diolah menjadi produk minyak goreng, margarin, *specialty-fat*, dan produk turunan oleopangan lainnya. Jalur hilirisasi oleopangan ini diasumsikan

²⁹ GAPKI. *Transformasi Perekonomian Kalimantan Timur ke Masa Depan*. Kalimantan Timur: GAPKI, 2016.

menyerap 30% dari produksi CPO Kalimantan Timur. *Kedua*, jalur hilirisasi oleokimia dan turunannya, yang diolah menjadi sabun, detergen, bio-surfactan lainnya, pelumas, dan produk turunan oleokimia lainnya. Jalur kedua ini diasumsikan menyerap 40% dari produk CPO Kalimantan Timur. Terakhir, jalur hilirisasi biodiesel, yang diasumsikan menyerap 30% produk CPO Kalimantan Timur. Untuk menghadirkan ketiga jenis hilirisasi ini, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk menghasilkan kebijakan daerah dalam percepatan hilirisasi industri sawit tersebut. Berdasarkan data dari BPPMD Kaltim, sudah terdapat 19 pabrik kelapa sawit pada Kabupaten Kutai Timur dari 271 perusahaan perkebunan besar swasta yang ada. Keberadaan pabrik minyak sawit umumnya berlokasi di sekitar wilayah perkebunan, sehingga pabrik dapat mengolah bahan baku menjadi lebih mudah.

Dari paparan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa dengan melihat beberapa faktor penentu lokasi kawasan, KEK Sei Mangke dan Maloy dinilai sangat potensial karena memiliki unggulan sumber daya alam (*factor-driven*), dekat dengan lokasi sumber bahan baku dengan jumlah yang memadai dan ketersediaan pabrik pengolahan kelapa sawit. Namun untuk mencapai daya saing yang tinggi, tidak semata berasal dari keunggulan sumber daya alam, namun juga memerlukan peningkatan efisiensi (*efficiency-driven*) berupa ketersediaan sarana pendukung seperti jalur lintas kereta api dan pelabuhan dan *linkage* antar industri serta peningkatan inovasi (*innovation-driven*) berupa inovasi hilirisasi produk industri agro melalui *research and development*.

Sayangnya sarana pendukung KEK Sei Mangke dan Maloy masih berada pada level *underquality*, antara lain pada pasokan

listrik dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengejar ketertinggalan ini pemerintah perlu mengandeng Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang penyediaan listrik (PT. PLN). Sinergi BUMN diperlukan untuk mempercepat pengembangan kedua kawasan tersebut. Selain itu, belajar dari pengelolaan BP Batam pada kawasan FTZ Batam. Pemerintah daerah juga perlu berkomitmen untuk mempercepat proses perizinan melalui *e-lisence* yang bertujuan mengurangi pertemuan dengan manusia.³⁰Tentunya, dibutuhkan keputusan yang berani yang melibatkan kepala daerah dan para penegak hukum untuk memutus mata rantai birokrasi yang kaku.

IV. MANFAAT EKONOMI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

4.1. Sebagai Sarana Pendistribusian Penduduk

Pengembangan kawasan industri berpotensi menjadi penarik bagi daerah-daerah di sekitar kawasan. Tabel 3 menunjukkan bahwa tujuh kabupaten/kota di Sumatera Utara telah berada pada tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dengan nilai tertinggi adalah Kota Medan. Kawasan KEK Sei Mangke di Sumatera Utara berada di Kabupaten Simalungun dengan luas wilayah terbesar ke-4 dari 33 kabupaten/kota seluas 4.369 km², dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 195 orang/km². Dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah, KEK Sei Mangke akan menjadi satelit baru yang memberikan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk Sumatera Utara sehingga tidak lagi terpusat pada tujuh kabupaten/kota besar di Provinsi Sumatera Utara. Pengembangan

³⁰ *Op.Cit.*, Paparan Plt. Gubernur Riau.

KEK Sei Mangke di Sumatera Utara diharapkan dapat mendorong distribusi penduduk yang lebih merata.

Tabel 3. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.

Kabupaten/Kota	Kepadatan penduduk
Medan	8342
Tebing Tinggi	5059
Binjai	4472
Pematangsiantar	4445
Sibolga	2094
Padang	162
Taanuli Tengah	160
Dairi	145
Nias Utara	111
Labuhanbatu Utara	98

Dari Tabel 4 diketahui bahwa Maloy berada pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah di antara 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu tepatnya di Kabupaten Kutai Timur sebesar 10,3. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah, KEK Maloy yang berlokasi pada kabupaten yang paling luas dapat menjadi satelit baru bagi daerah lainnya. Sehingga penduduk di Kalimantan Timur dapat tersebar merata dan tidak lagi terpusat pada tiga kabupaten/kota besar di Kalimantan Timur di masa mendatang untuk mencari nafkah/bekerja. Ketiga kabupaten/kota tersebut memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

Tabel 4. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (orang)	Luas Wilayah (km2)	Kepadatan penduduk
Balikpapan	615.574	512	1.201,7
Samarinda	812.597	717	1.134,1
Bontang	163.326	163	1.001,1
Penajam Paser Utara	154.235	2.924	52,8
Kutai Kartanegara	717.789	25.988	27,6
Paser	262.301	11.097	23,6
Kutai Barat	145.838	13.710	10,6
Kutai Timur	320.115	31.052	10,3
Berau	208.893	21.735	9,6
Mahakam Ulu	25.970	19.449	1,3

Keterangan: Kepadatan Penduduk = Jumlah Penduduk/Luas Wilayah (orang/km2).

Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2016.

4.2. Upaya Menekan Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 sebesar 7,5%, yang artinya bahwa dari 1.539.491

angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 115.534 orang yang menganggur. Dari total pengangguran, 65% di antaranya berjenis kelamin laki-laki. Adapun tiga kabupaten/kota dengan tingkat pengangguran tertinggi ditunjukkan dalam Tabel 5 antara lain Bontang (12,1%), Kutai Barat (11,7%) dan Kutai Kartanegara (10,2%). Sementara berdasarkan data tahun 2015³¹, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kalimantan Timur sebanyak 29.549 didominasi 67,2% diantaranya tamatan dari SMA. Hanya 18,2% dari jumlah pencari kerja mengecap pendidikan tinggi baik diploma maupun sarjana.

Tabel 5. Pengangguran, Penduduk Miskin, dan Laju PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	TPT2015 (%)	PM 2014 (rb orang)	Laju PDRB2014 (%)
Balikpapan	6,0	15,02	4,67
Samarinda	5,6	36,65	4,59
Bontang	12,1	8,21	-3,41
Penajam Paser Utara	7,3	11,58	2,14
Kutai Kartanegara	10,2	52,53	-1,35
Paser	9,1	20,34	4,49
Kutai Barat	11,7	12,92	1,24
Kutai Timur	5,1	28,30	3,55
Berau	5,7	9,7	7,92
Mahakam Ulu	4,7	n.a	6,38
Kalimantan Timur	7,5	195,32	2,4

Keterangan: TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka, PM: Penduduk Miskin

Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka.

Demikian halnya dengan Sumatera Utara, walaupun tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Utara hanya sebesar 6,71% dari total angkatan kerja di Sumatera Utara mencapai 6,4 juta orang,

³¹ *Op. Cit.*, Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2016, hal. 58.

namun yang menarik bahwa kota-kota besar di provinsi ini justru memiliki tingkat pengangguran yang paling tinggi dibandingkan wilayah kabupaten. Kondisi ini terlihat pada Tabel 6 dimana 6 dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat pengangguran lebih dari 10% merupakan kota, antara lain Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, dan Kota Gunung Sitoli. Hanya Labuhanbatu yang merupakan wilayah kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran tinggi lebih dari 10%.

Tabel 6. Tingkat Pengangguran dan Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	TPT 2015 (%)	PM 2014 (rb orang)	Kabupaten/Kota	TPT 2015 (%)	PM 2014 (rb orang)
Medan	11,00	200,32	Langkat	8,02	100,63
Tebing Tinggi	10,46	17,20	Tapanuli Tengah	4,98	49,86
Binjai	10,00	16,72	Dairi	1,26	23,35
Pematangsiantar	9,47	25,43	Nias Utara	4,02	38,95
Sibolga	10,25	10,57	Labuhanbatu Utara	8,75	37,30
Padangsidimpuan	6,96	17,65	Labuhanbatu Selatan	4,15	35,65
Tanjung Balai	10,06	23,17	Humbang Hasundutan	1,22	17,14
Gunung Sitoli	10,00	37,20	Tapanuli Utara	2,56	32,23
Deli Serdang	6,38	90,92	Toba Samosir	3,47	16,51
Batubara	6,32	44,72	Nias	0,92	22,21
Serdang Bedagai	7,18	54,48	Mandailing Natal	5,78	39,68
Labuhanbatu	11,39	37,35	Padang Lawas	5,95	20,34
Simalungun	5,75	86,25	Padang Lawas Utara	5,01	23,86
Asahan	5,82	76,97	Samosir	1,28	16,27
Karo	2,23	35,36	Tapanuli Selatan	5,91	29,38
Nias Barat	2,96	23,76	Pakpak Bharat	2,88	4,72
Nias Selatan	0,40	54,46	SUMUT	6,71	1.508,14*

Keterangan: TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka; PM: Penduduk Miskin; *per Sept 2015
 Sumber: BPS. Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2016.

Dari paparan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa kota besar yang bercirikan sebagai pusat perdagangan umumnya menjadi faktor penarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari pekerjaan

di sana sehingga mendorong munculnya tingkat pengangguran ketika lapangan pekerjaan sudah tidak tersedia. Sehingga sasaran dengan pengembangan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan dapat berperan baik sebagai fungsi distribusi penduduk maupun menekan tingkat pengangguran pada kota-kota besar.

Namun demikian, walaupun Menteri Saleh Husin secara eksplisit telah menyampaikan dukungan terhadap penyerapan tenaga kerja saat peresmian kawasan bahwa putra-putra terbaik yang akan bekerja di kawasan, sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri adalah SDM "siap pakai" yang memiliki ketrampilan tertentu di bidangnya. Sehingga pemerintah daerah perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan ketrampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.

4.3. Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Dengan adanya perusahaan yang berdomisili pada kawasan industri, tentunya sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, perusahaan akan memberikan alokasi tanggung jawab sosial (CSR) baik melalui program bina lingkungan dan program kemitraan. Kontribusi bina lingkungan yang diberikan oleh perusahaan antara lain pengadaan air bersih, pengadaan parit, perbaikan jalan, sumbangan untuk pendidikan/guru, dan sumbangan untuk hari raya. Sedangkan kontribusi melalui program kemitraan dapat dilakukan dengan memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat sekitar. Pinjaman modal usaha ini dapat membantu masyarakat untuk berusaha sehingga dapat menekan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur yang jumlahnya mencapai lebih dari 28 ribu orang pada tahun 2014. Namun demikian, kontribusi terhadap

lingkungan bukanlah merupakan mutlak tanggungjawab perusahaan. Peran peningkatan taraf hidup masyarakat seharusnya diambilalih oleh pemerintah daerah.

Melihat eksternalitas yang ditimbulkan dan dampak multiplier yang dihasilkan akibat pengembangan sektor industri di suatu kawasan, Rayi dan Wilmar³² mengemukakan perlu upaya melalui (a) penguatan keterkaitan hulu pada industri prioritas dan yang memiliki keterkaitan dengan industri utama di dalam klaster untuk menciptakan *supply chain cluster*, (b) pengembangan industri substitusi impor, (c) diversifikasi produk, dan (d) peningkatan kemitraan usaha hulu hilir secara terintegrasi. Tentunya untuk meningkat daya saing, pemasaran kegiatan industri dalam kawasan industri dapat terlaksana secara optimal apabila dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang mampu menekan biaya operasional. Selain itu, keberadaan kawasan industri dekat sumber bahan baku yang memadai seyogyanya didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung hilirisasi produk sawit dengan mengalokasi anggaran tertentu untuk penelitian dan pengembangan produk, sehingga mampu menciptakan nilai tambah dan menciptakan kesempatan kerja baru.

³² *Op. Cit.*, Rayi Paramita dan Wilmar Salim.

V. PENUTUP

Walaupun hingga saat ini KEK Sei Mangke dan KEK Maloy belum beroperasi secara optimal, namun keberadaan kedua kawasan ini memberikan peluang bagi daerahnya untuk mengembangkan perekonomian. Hadirnya kawasan industri sebagai sentra pertumbuhan ekonomi baru untuk meningkatkan daya saing dapat menciptakan keterkaitan ekonomi kebelakang (*backward linkages*) antara KEK Sei Mangke dengan daerah-daerah lain di Provinsi Sumatera Utara, bahkan di kawasan Indonesia barat dan KEK Maloy dengan daerah-daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur, bahkan di kawasan Indonesia timur.

Selain manfaat bagi pemerintah pusat berupa pajak pertambahan nilai, penghematan devisa akibat pengurangan impor, dan nilai tambah, pengembangan kawasan industri memiliki berbagai manfaat ekonomi bagi pertumbuhan perekonomian daerah tempat kawasan industri berlokasi, antara lain melalui (a) sarana pendistribusian penduduk dari daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi ke daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah; b) upaya menekan tingkat pengangguran, dan (c) meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melihat dampak multiplier adanya kawasan industri, DPR RI, sebagai representatif rakyat, mendorong (a) pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana penelitian dan pengembangan bagi produk hilirisasi industri agro unggulan Indonesia, (b) pemerintah daerah untuk berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia guna mendukung pertumbuhan kinerja industri sehingga tercipta tenaga kerja yang siap pakai; (c) pengelola kawasan industri untuk

mampu bekerja sama dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan industri sehingga tidak terulang kembali kasus yang terjadi dalam pengelolaan Kawasan FTZ Batam; (d) pengelola kawasan meningkatkan hubungan sinergi dengan BUMN dalam penyediaan kualitas sarana dan prasarana di kawasan industri; serta (e) peningkatan hubungan kerjasama dengan negara lain dalam mengembangkan suatu kawasan industri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bappenas. *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2015*. Jakarta: Bappenas, 2015.
- BPS. *Kecamatan Bosar Maligas Dalam Angka 2015*. BPS Kabupaten Simalungun, 2014.
- BPS. *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2016*. BPS Prov. Kaltim, 2016.
- BPS. *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2016*. BPS Prov. Sumut, 2016.
- BPS. *Statistik Daerah Kecamatan Bosar Maligas 2015*. BPS Kabupaten Simalungun, 2014.
- BPS. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2014*. Jakarta: BPS, 2014.
- GAPKI. *Transformasi Perekonomian Kalimantan Timur ke Masa Depan*. Kalimantan Timur: GAPKI, 2016.
- Muhammad Teguh. *Ekonomi Industri*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- World Economic Forum. The Global Competitiveness Index 2016-2017*.

Artikel dalam jurnal

- Albert O. Hirschman. "The Strategy of Economic Development". *Studies in Economics*, 10, New Haven, Conn: Yale University Press, 1958.
- Alfino Rinaldi Arief. "Prediksi Dampak Pengembangan Kawasan Industri Maloy Terhadap Perekonomian Kaltim". *Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik UI*, 19 Januari 2015 (<http://mpkp.feb.ui.ac.id/prediksi-dampak-pengembangan-kawasan-industri-maloy-terhadap-perekonomian-kaltim/>, diakses 25 Juli 2016).
- Djakaria M. Nur. "Dampak Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi Terhadap Alih Fungsi Lahan dan Mata Pencaharian Penduduk". *FPIPD Universitas Pendidikan Indonesia*,

- (http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/194902051978031-DJAKARIA_M_N UR/ARTIKEL.pdf, diakses 25 Juni 2016).
- Doriana Lingga dan Wahyu Ario Pratomo. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke sebagai Klaster Industri". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Universitas Sumatera Utara, 2013, Vol. 1(2), hal.13-20.
- Heru Kustanto, Rina Cktaviani, Bonar M. Sinaga, dan M. Firdaus. "Reindustrialisasi dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Makro serta Kinerja Sektor Industri di Indonesia". *Jurnal Riset Industri*, Kementerian Perindustrian, 2012, Vol. 6(1), hal.97-115.
- Nino Sutrisno, Azwar Hasan, dan Rahmat Richard. "Analisis Faktor-Faktor Penentu Lokasi Industri Rotan di Kota Pekanbaru". *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Universitas Riau, 2013, Vol.4(10), hal.72-100.
- P.N. Rosenstein-Rodan. "Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe". *The Economic Journal*, 53 (210/211), 1943.
- Rayi Paramita dan Wilmar Salim. "Peran Pengembangan Sektor Industri Terhadap Perekonomian di Kawasan Metropolitan Bandung Raya". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota BSAPPK*, 4(2), hal. 361-372.

Artikel dalam majalah/seminar

- Drajad Irianto. "Daya Saing Industri Dalam Konteks Perwilayahan Industri". *Majalah Kawasan*, Kementerian Perindustrian, Edisi VII, 2014, hal. 17.
- Kementerian Perindustrian. "Kebijakan Sei Mangke Tak Kalah Beradu dengan Malaysia". *Majalah Media Industri*, 2012, No.01, hal.16-17.
- Rafika Sari. "Rencana Kebijakan Crude Palm Oil Supporting Func". *Info Singkat Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol.VIII(7), 2015.
- Wahyu Ario Pratomo. 'Ferkembangan Industri di Indonesia dan Sumut dalam Menghadapi MEA 2015". *Makalah FGD*, Medan, Maret 2015.

Didik Hadiyanto, "Kesiapan Sektor Industri Agro Dalam Menghadapi MEA 2015". *Makalah FGD*, Unversitas Balikpapan, 2015.

Tulisan dalam koran/internet

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. "Kebutuhan Listrik: KEK Sei Mangkei PTPN 3 Pastikan Akhir Maret Terpenuhi, 27 Maret 2015, (<http://kek.ekon.go.id/kebutuhan-listrik-kek-sei-mangkei-ptpn-3-pastikan-akhir-maret-terpenuhi/>, diakses 27 Mei 2015).

Kabupaten Kutai Timur. "TPG Bangun IPP 16 MW Untuk Distribusikan Listrik Bagi Masyarakat Kutim", 29 September 2015, (<http://humas.kutaitimurkab.go.id/index.php/home/detail/1309/tpg-bangun-ipp-16-mw-untuk-distribusikan-listrik-bagi-masyarakat-kutim>, diakses 20 Agustus 2016).

Serikat Petani Indonesia. "Kerasukan Neoliberal Penyebab Turunnya Harga Sawit", 30 Oktober 2008, (<http://www.spi.or.id/penyebab-turunnya-harga-sawit/>, diakses 2 Agustus 2016).

----. "CT Resmikan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan". *Bisnis Indonesia*, 16 September 2014, (<http://kabar24.bisnis.com/read/20140916/78/257700/ct-resmikan-kek-maloy-batuta-trans-kalimantan>, diakses 20 Agustus 2016.)

----. "Pembangunan Rel Kereta Api KEK Sei Mangkei Terhambat". *Starberita.com*, 8 Januari 2015, (http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=158059&catid=37&Itemid=457, diakses 1 Oktober 2015).

Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA **HOLDING BUMN** PERKEBUNAN

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi

I. PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2015 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, telah menetapkan pembentukan *holding BUMN* sektor perkebunan yang menggabungkan seluruh PT Perkebunan Nusantara I hingga XIV ke dalam satu badan usaha. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga ditetapkan bahwa PT Perkebunan Nusantara III bertindak selaku induk perusahaan yang membawahi seluruh PT Perkebunan Nusantara lainnya. Dengan kata lain status seluruh PT Perkebunan Nusantara lainnya berubah menjadi anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara III.

Penerbitan Peraturan Pemerintah di atas juga sejalan dengan arah kebijakan Kementerian BUMN yang tertuang dalam *Roadmap Kementerian BUMN Tahun 2015-2019*, yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang seluruh BUMN akan digabungkan dalam 15 (lima belas) *holding* sektoral. Tujuan utama dari pembentukan *holding BUMN* tersebut adalah memperkuat daya saing BUMN terutama dalam menghadapi persaingan global. Di sisi lain pembentukan *holding* diharapkan dapat menyederhanakan pengelolaan BUMN yang hingga tahun 2015 berjumlah 119 perusahaan.

Khusus untuk BUMN sektor perkebunan, penyatuan dalam satu *holding* akan memperkuat keberadaan aset berupa lahan. Sebagaimana diketahui, karakter unik dari usaha perkebunan adalah kebutuhan lahan sebagai pendukung utama bisnis.¹ Dengan kepemilikan lahan yang memadai, sebuah perusahaan mampu untuk menentukan kapasitas produksi dan tingkat harga yang bersaing dengan perusahaan perkebunan lainnya. Oleh karena itu dengan penyatuan seluruh PT Perkebunan Nusantara dalam satu *holding*, secara praktis memperbesar nilai kepemilikan aset berupa lahan.

Sementara itu produktivitas merupakan faktor lain yang harus memperoleh perhatian manajemen; mengingat dengan produktivitas tinggi, maka tingkat utilisasi lahan persatuan luas menjadi maksimal. Dampak positifnya tentu saja perusahaan perkebunan dengan aset lahan yang luasakan mampu mendorong tingkat produktivitas persatuan luas lahan. Apalagi tingkat luasan lahan tidak mudah untuk ditingkatkan di tengah tumpang tindih peraturan dan konflik atas kepemilikan lahan.

Isu lain yang harus memperoleh perhatian adalah masalah koordinasi dan komunikasi dalam operasional *holding* BUMN Perkebunan. Dengan status dan hubungan induk-anak perusahaan, maka proses pengambilan kebijakan harus melalui dua manajemen. Konsekuensinya adalah terdapat potensi perlambatan dalam proses pengambilan keputusan bila dibandingkan dengan proses pengambilan keputusan pada satu badan usaha. Oleh karena itu tulisan ini akan mengkaji pembentukan *holding* BUMN Perkebunan dalam kerangka *roadmap* Kementerian BUMN, strategi

¹ Rural Industry Research and Development Corporation, "Integrated Agriculture Systems", *Research Report*, 2003.

pengembangan bisnis, serta permasalahan potensial terkait operasional bisnis *holding* BUMN beserta langkah pemecahannya.

II. JENIS HOLDING DAN PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN

Pembentukan *holding* merupakan salah satu strategi yang biasa dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperbesar kekuatannya dengan tujuan utama adalah memperkuat posisinya di pasar dan memperbesar peluang untuk mengungguli pesaingnya.² Secara teori, pembentukan *holding* memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengintegrasikan fasilitas produksi sumberdaya, modal, dan pasar potensial. Dengan integrasi ini, maka perusahaan dapat menghemat biaya produksi yang berasal dari tingkat skala ekonomis yang lebih tinggi; sekaligus memperoleh peningkatan pemasukan. Dampak akhirnya adalah tingkat keuntungan bagi grup *holding* dan masing-masing perusahaan akan meningkat.³

Secara garis besar ada 2 (dua) jenis *holding*, yaitu *holding* operasional dan *holding* investasi. Perbedaan mendasar dari kedua jenis *holding* tersebut adalah jangkauan kewenangan dari induk dan anak perusahaan baik dalam hal investasi, operasional bisnis, penggunaan pendapatan, dan manajemen sumberdaya

² Olivier Furrer, Howard Thomas and Anna Goussevskaia, "The structure and evolution of the strategic management field 2007 The structure and evolution of the strategic management field: A content analysis of 26 years of strategic management research", *International journal of Management Reviews*, Vol. 10 (1), pp. 1-23.

³ Barney, J.B, "Resource-based theories of competitive advantage: a ten-year retrospective on the resource-based view. *Journal of Management*", Vol. 27, pp. 643-650.

manusia.⁴ Perbandingan antara *holding* operasional dan *holding* investasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan antara *holding* operasional dan *holding* Investasi

	<i>Holding</i> Operasional	<i>Holding</i> Investasi
Kewenangan Investasi	Kewenangan investasi ada di anak dan induk perusahaan	Kewenangan investasi ada di induk perusahaan
Operasional Bisnis	Anak perusahaan dan induk perusahaan menjalankan bisnis sesuai dengan tugas	Kewenangan menjalankan bisnis hanya ada di anak perusahaan
Pendapatan Perusahaan	Seluruh pendapatan perusahaan dimasukkan ke unit bisnis masing-masing baik yang dimiliki oleh anak maupun induk perusahaan	Pendapatan sebagian dimasukkan ke induk perusahaan untuk kemudian diinvestasikan ke bidang usaha baru
Manajemen SDM	Baik anak maupun induk perusahaan memiliki kewenangan untuk merekrut SDM dan memberikan pelatihan	Kewenangan merekrut SDM ada di induk perusahaan dan pelatihan terpusat di induk perusahaan

Sumber : Knight (1999)

Pemilihan bentuk *holding* merupakan pilihan strategis; apabila pihak pemegang saham sudah memutuskan bentuk *holding*, maka pilihan tersebut membawa implikasi pada operasional bisnis anak dan induk perusahaan secara keseluruhan. Keputusan pemilihan bentuk *holding* juga berdampak kepada bagaimana anak perusahaan menjalankan bisnisnya dan bagaimana strategi anak

⁴ Don Knight, Craig L. Pearce, and Ken G. Smith, " Top Management Diversity, Group Process, and Strategic Consensus", *Strategic Management Journal*, Vol. 20, 1999, pp. 445-465.

perusahaan untuk memperoleh dan menggunakan pendapatan dari aktifitas bisnis. Keberlanjutan bisnis dan keuntungan yang diperoleh perusahaan pasca pembentukan *holding* harus menjadi tujuan utama dari pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena itu pemegang saham harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam memutuskan bentuk *holding*:⁵

1. Proses bisnis dari masing-masing perusahaan, dalam hal ini manajemen harus memberikan perhatian pada bagaimana bisnis tersebut dijalankan, bagaimana hubungan kerja antar bagian dalam perusahaan, dan bagaimana proses koordinasi dan pengambilan keputusan dilaksanakan. Terdapat perubahan drastis diikuti oleh berbagai penyesuaian dalam praktek bisnis perusahaan, baik di induk maupun anak perusahaan pasca pembentukan *holding*. Untuk *holding* operasional, seringkali pasca pembentukan *holding* terdapat pembagian wilayah dan segmen pasar, baik antara anak perusahaan ataupun antara anak perusahaan dan induk perusahaan dimana hal ini tentu merubah operasional bisnis secara keseluruhan. Sementara itu dalam bentuk *holding* investasi, kewenangan investasi anak perusahaan diambilalih oleh induk perusahaan. Dampaknya adalah ada pengurangan operasional bisnis anak perusahaan terutama pada aktifitas yang terkait dengan investasi. Dampak ikutannya yaitu potensi pengurangan tenaga kerja dan aset pada departemen yang terkait dengan investasi.

⁵ Arto Kuuluvainen, "How to Concretize Dynamic Capabilities : Theory and Examples", *Journal of Strategy and Management*, Vol. 5 Issue 4, 2012, pp. 381-392.

2. Kondisi lingkungan eksternal dari bisnis perusahaan, terutama terkait dengan keberadaan pesaing. Manajemen harus memberikan perhatian terhadap posisi perusahaan saat ini terutama terhadap pangsa pasar yang dimiliki. Selain itu manajemen juga harus mengetahui karakter konsumen perusahaan dan kekuatan dari pesaing pada pasar yang sejenis. Posisi perusahaan dan pesaing merupakan dimensi strategis yang mendasari setiap pengambilan keputusan perusahaan. Dengan pembentukan *holding*, maka dimensi strategis ini tentu berubah seiring perubahan struktur dan orientasi perusahaan terhadap pasar. Dalam struktur *holding* operasional, perubahan strategi cenderung lebih dominan, mengingat secara tidak langsung terdapat penambahan satu entitas bisnis di dalam keseluruhan organisasi perusahaan (yaitu induk perusahaan yang terlibat dalam operasional bisnis *holding*). Sementara dalam struktur *holding* investasi, dimensi strategis cenderung tidak banyak berubah karena keberadaan induk perusahaan sedikit memberikan pengaruh pada operasional *holding* secara keseluruhan.
3. Rencana jangka panjang perusahaan, terutama terkait dengan rencana pengembangan bisnis dan bidang usaha baru yang dimasuki. Walaupun sebelum pembentukan *holding* pihak manajemen sudah memperhitungkan aspek kesamaan dalam bidang usaha perusahaan, namun perusahaan-perusahaan tersebut sudah memiliki rencana strategis masing-masing termasuk rencana pengembangan usaha dalam kerangka badan usaha individu. Dengan pembentukan *holding* maka butuh penyesuaian dalam rangka menjaga sinergi organisasi

holding secara keseluruhan. Dengan penyesuaian ini maka perusahaan secara individu sering harus mengorbankan rencana bisnis jangka panjangnya demi pencapaian visi dan misi organisasi *holding*. Namun manajemen hendaknya juga harus mempertimbangkan rencana bisnis perusahaan individu tersebut, dalam arti jangan sampai rencana bisnis yang memiliki prospek cerah harus dikorbankan demi kepentingan *holding*. Dalam satu ekstrem, penggabungan perusahaan individu dalam organisasi *holding* seringkali membawa kerugian yang lebih besar daripada melanjutkan bisnis perusahaan secara individu.

4. Budaya perusahaan yang telah terbangun, apakah bersifat vertikal atau horisontal. Budaya perusahaan yang bersifat vertikal adalah budaya yang ditandai dengan struktur organisasi perusahaan bertingkat dan memiliki banyak pejabat manajemen level menengah. Sedangkan perusahaan yang bersifat horisontal adalah perusahaan dengan struktur organisasi ramping, tanpa banyak pejabat manajemen level menengah, dan cenderung memiliki jumlah karyawan sedikit. Proses penggabungan perusahaan individu dalam satu organisasi *holding* juga menuntut penggabungan budaya perusahaan. Dalam proses penggabungan budaya perusahaan, pasti terdapat konflik yang bila tidak tertangani dengan baik akan berdampak pada kinerja perusahaan *holding* dalam jangka panjang. Secara umum konflik akan lebih intensif terjadi pada bentuk *holding* operasional daripada bentuk *holding* investasi karena bentuk *holding*

operasional lebih mengharuskan karyawan yang belum saling mengenal untuk saling berinteraksi dan bekerjasama.⁶

Dari pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, keputusan pembentukan *holding* selain bersifat strategis, juga membutuhkan komitmen kuat dari manajemen dan karyawan, baik dari induk maupun anak perusahaan. Pembentukan *holding* akan membawa banyak perubahan baik dari aspek budaya, proses bisnis, dan keuangan perusahaan. Apabila keputusan sudah diambil, maka banyak aspek yang menyertai keputusan tersebut, seperti keuangan, sumber daya manusia, dan fasilitas produksi. Pengambilan keputusan yang salah mengakibatkan kinerja *holding* akan menurun; bahkan tingkat keuntungan yang diperoleh *holding* dapat lebih rendah bila dibandingkan tingkat keuntungan pada perusahaan individu. Oleh karena itu pemegang saham, jajaran direksi, dan manajemen harus saling bekerjasama dan berkomitmen dalam rangka menyukseskan proses pembentukan *holding*.

III. ROADMAP PENGEMBANGAN BUMN

Pada dasarnya, pembentukan *holding* BUMN merupakan rencana besar yang tercantum pada *roadmap* Kementerian BUMN. Tujuan utama dari pembentukan *holding* adalah "penyederhanaan" BUMN, baik dari aspek jumlah maupun bidang kerjanya. Sebagaimana diketahui pada tahun 2015, keseluruhan BUMN berjumlah 119 yang terbagi ke dalam 23 sektor industri dengan total nilai aset sebesar Rp 5.029 triliun. Namun pada

⁶ Stephen Robbins, *Organizational Behaviour 14th ed.*, US : Prentice Hall, 2010.

kenyataannya hanya 10 BUMN yang mampu memberikan keuntungan signifikan bagi pendapatan negara sekaligus mengembangkan jumlah aset. Sepuluh BUMN tersebut adalah Bank BRI, Telkom, Pertamina, Bank Mandiri, Bank BNI, Perusahaan Gas Negara, Semen Indonesia, Pupuk Indonesia, Jasa Raharja, dan Pelindo II.⁷ Sementara itu jumlah BUMN yang mengalami kerugian pada Tahun 2015 sebanyak 18 perusahaan dengan jumlah kerugian sebesar Rp 5,8 triliun.⁸

Roadmap BUMN sendiri disusun berdasarkan pemikiran bahwa BUMN harus menjadi agen pembangunan dan penciptaan nilai secara nasional. Kerangka penyusunan *roadmap* BUMN melandaskan pembangunan nasional dengan dasar : peraturan dan kebijakan yang mendukung, tata kelola perusahaan yang baik, kapasitas dan produktivitas sumberdaya manusia (SDM), dan keberadaan infrastruktur yang berkualitas dan mendukung konektivitas nasional. Keempat dasar tersebut ditopang dengan 4 (empat) strategi, yaitu: sinergi BUMN (output kemandirian BUMN), hilirasi, dan penguatan kandungan lokal (output kesejahteraan masyarakat), pembangunan ekonomi daerah terpadu (output keberlanjutan), dan kemandirian keuangan dan penciptaan nilai (output pemerataan dan kesetaraan). Hasil akhir dari keempat strategi tersebut adalah BUMN sebagai agen pembangunan nasional dan penciptaan nilai.⁹ Gambaran utuh *roadmap* BUMN dapat dilihat pada Gambar 1.

⁷ Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Roadmap Kementerian BUMN*, 2015.

⁸ <http://finance.detik.com/read/2016/01/19/192639/3122212/4/jumlah-bumn-rugi-berkurang-di-2015>, diakses 25 Agustus 2016.

⁹ Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *op. cit*.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan 4 (empat) strategi tersebut, pembentukan *holding* merupakan operasionalisasi bisnis BUMN. Melalui pembentukan *holding*, keempat strategi tersebut akan lebih mudah diimplementasikan karena batasan hukum yang melekat pada badan usaha akan diminimalisir. Dalam jangka panjang Kementerian BUMN akan membentuk 15 (lima belas) *holding* yang dibagi sesuai dengan *roadmap* sektoral, dengan dasar kesamaan *bidang usaha* dan *kemungkinan sinergi* antar BUMN yang berada dalam sektor tersebut. Kelimabelas sektor tersebut disertai dengan yang bergerak di dalamnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa secara ideal hanya terdapat 15 BUMN yang bergerak dalam 15 sektor usaha. Kelima belas BUMN tersebut pada dasarnya adalah induk perusahaan yang membawahi sejumlah anak perusahaan. Kementerian BUMN merencanakan ada 2 (dua) mekanisme yang digunakan untuk membentuk formasi induk dan anak perusahaan tersebut, yaitu : (1) Penambahan modal negara melalui BUMN yang direncanakan menjadi induk perusahaan untuk kemudian modal diteruskan kepada BUMN yang direncanakan menjadi anak perusahaan, dan (2) Pemindahan modal negara dari BUMN yang direncanakan menjadi anak perusahaan kepada BUMN yang direncanakan menjadi induk perusahaan.

Untuk melaksanakan mekanisme pertama, negara harus mengedarkan modal dari APBN untuk diberikan kepada calon induk perusahaan. Modal ini kemudian diteruskan kepada calon anak perusahaan setelah sebelumnya dikonversi menjadi saham dengan persentase tertentu yang mencerminkan besaran kepemilikan induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Sedangkan pada mekanisme kedua, negara harus menarik modal dari calon anak perusahaan untuk kemudian diberikan kepada calon induk perusahaan. Modal ini kemudian juga dikonversi menjadi saham dengan persentase yang mencerminkan besaran kepemilikan induk perusahaan terhadap anak perusahaan.¹¹

Dengan demikian kepemilikan negara yang bersifat langsung hanyalah pada BUMN yang menjadi induk perusahaan. Status BUMN yang telah berubah menjadi anak perusahaan berubah menjadi perusahaan milik swasta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No 19

¹¹ Kementerian BUMN, *op. cit.*

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi:"Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan".

Tabel 2. Lima Belas Sektor dalam *Roadmap* Sektoral BUMN

No	Sektor	BUMN
1	Ketahanan Energi	PLN, Pertamina, PGN, Bukit Asam
2	Logistik dan Perdagangan	Sarinah, Pos Indonesia, Perusahaan Perdagangan Indonesia
3	Pariwisata dan Kebudayaan	Balai Pustaka, PT Pengembangan Candi Prambanan Borobudur dan Ratu Boko, Hotel Indonesia Natour
4	Ketahanan Pangan dan Perkebunan	Bulog, Pupuk Indonesia, Pertani, Sang Hyang Seri, Berdikari, RNI, Perhutani, PTPN
5	Pelayanan Kesehatan	Kimia Farma, Bio Farma
6	Ekonomi Maritim	Pelindo I-IV, Pelni, JIEP, Djakarta Lloyd, PAL, ASDP
7	Konektivitas	Angkasa Pura I-II, Garuda Indonesia, KAI, Perum Damri
8	Konstruksi dan Infrastruktur	Jasa Marga, Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan, Adhi Karya, Waskita Karya, Hutama Karya, Istaka Karya, Sucofindo
9	Pertambangan	Antam, Timah, Bukit Asam, Semen Indonesia
10	Manufaktur	Inalum, Krakatau Steel
11	Pertahanan Strategis	Pindad, Dahana, Inti
12	Industri Berat dan Perkapalan	PAL
13	Telekomunikasi dan Digital	Telkom, Antara, Balai Pustaka, LEN
14	Jasa Keuangan dan Perbankan	Mandiri, BNI, BRI, BTN, Dana Reksa, Bahana, Aksrindo, Jamkrindo
15	Ekonomi Kerakyatan	Pemodal Nasional Madani, Pegadaian

Sumber :Kementerian Badan Usaha Milik Negara (2015)

Dengan hasil akhir pembentukan *holding* berupa 15 (lima belas) BUMN tentunya akan ada beberapa keuntungan sebagai berikut:

1. Kemudahan pengawasan dari Kementerian BUMN selaku instansi pembina dan pengawas BUMN, terutama terkait dengan kinerja perusahaan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kekuatan aset yang lebih besar yang berasal dari penyatuan aset anak-anak perusahaan yang tergabung dalam satu induk perusahaan.
3. Kemudahan sinergi antar BUMN yang tergabung dalam satu *holding*.

Oleh karena itu rencana untuk menyederhanakan BUMN menjadi lima belas badan usaha berdasarkan sektor merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan daya saing dan kinerja BUMN sekaligus memudahkan dalam pengawasan kinerja.

IV. STRATEGI HOLDING BUMN PERKEBUNAN

Pembentukan *holding* perkebunan telah memenuhi keempat strategi dalam *roadmap* BUMN. Strategi pertama, yaitu sinergi antar BUMN tentu adalah dasar dari pembentukan *holding* BUMN. Sinergi BUMN sendiri tidak mewajibkan adanya peleburan beberapa perusahaan di bawah koordinasi satu induk perusahaan. Namun seiring penguatan dan intensitas sinergi, maka secara teori jauh lebih menguntungkan apabila perusahaan-perusahaan yang saling bersinergi dilebur dalam satu badan hukum sehingga terdapat

konsolidasi bersama dalam berbagai indikator kinerjanya.¹² Sebuah penelitian juga menyatakan bahwa kemungkinan keuntungan dari sinergi berbanding lurus dengan kesamaan jenis industri;¹³ dan hal ini sesuai dengan kesamaan jenis industri dari BUMN Perkebunan.

Sementara itu, strategi hilirisasi dan penguatan kandungan lokal dapat dipenuhi melalui penguatan sinergi internal yang bersifat vertikal di antara BUMN Perkebunan. Penyatuan BUMN Perkebunan dalam satu *holding* tentu saja memperkuat kesempatan sinergi vertikal yang menyatukan sektor *on farm*, *off farm*, dan pembentukan produk turunan dalam satu rangkaian rantai nilai. Bahkan kesempatan sinergi vertikal dapat dilakukan dengan biaya yang lebih efisien, mengingat dalam satu entitas *holding* maka banyak biaya transaksi yang biasa ditemui pada kerjasama antar perusahaan individu dapat dihilangkan.¹⁴ Biaya transaksi ini biasanya terkait dengan aspek legalitas yang harus dipenuhi dalam kerjasama antar perusahaan individu dengan badan hukum masing-masing.

Kandungan lokal pada produk BUMN Perkebunan merupakan hal yang sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh masing-masing BUMN. Sebagaimana diketahui, PT Perkebunan Nusantara I-XIV merupakan perusahaan hasil nasionalisasi dari perusahaan milik Belanda. Perusahaan perkebunan tersebut sejak awal berdiri bertujuan untuk mengolah sumberdaya perkebunan yang ada di bumi Indonesia. Oleh karena itu pembagian tugas PT Perkebunan

¹² Andrew Szamosszegi and Cole Kyle, *An Analysis of State-owned Enterprises and State Capitalism in China*, Research Report, 2011.

¹³ Tim Buckley, *An overview of Adani Enterprises' Corporate Restructuring*, Research Report presented in Briefing Notes, 2015.

¹⁴ Lukas Hardt, "The History of Transaction Cost Economics and Its Recent Developments", *Erasmus Journal of Philosophy and Economics*, Vol. 2 (1). 2009, pp. 29-51.

Nusantara I-XIV berdasarkan pada wilayah kerja dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Implikasinya adalah, perusahaan perkebunan ini harus menanam komoditas perkebunan yang memang dapat tumbuh subur di suatu wilayah tertentu. Untuk kebutuhan tenaga kerja, perusahaan juga memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal. Pembagian wilayah kerja dan komoditas pada PT Perkebunan Nusantara dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Wilayah Kerja dan Komoditas/Produk dari PT Perkebunan Nusantara I-XIV

Perusahaan	Wilayah Kerja	Komoditas/produk
PTPN I	Provinsi Aceh	Kelapa sawit dan karet
PTPN II	Sumatera Utara	Kelapa sawit, karet, kakao, tembakau, gula
PTPN III	Sumatera Utara	Kelapa sawit, karet, kakao, tembakau, gula
PTPN IV	Sumatera Utara, Jambi	Kelapa sawit, kakao, teh
PTPN V	Riau	Kelapa sawit, karet
PTPN VI	Jambi, Sumatera Barat	Kelapa sawit, karet
PTPN VII	Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung	Kelapa sawit, karet, tebu, teh
PTPN VIII	Banten, Jawa Barat	Teh
PTPN IX	Jawa Tengah	kopi, teh, tebu
PTPN X	Jawa Timur	tembakau, tebu
PTPN XI	Jawa Timur	Tebu
PTPN XII	Jawa Timur	karet, kopi, kakao, teh
PTPN XIII	Kalimantan	kelapa sawit, karet
PTPN XIV	Sulawesi	gula, kelapa sawit, kakao, karet

Sumber : dari berbagai sumber (diolah)

Strategi pembangunan ekonomi daerah yang dilaksanakan secara terpadu juga tidak lepas dari wilayah kerja BUMN Perkebunan yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Pulau Sulawesi. Bahkan beberapa PT Perkebunan Nusantara juga memiliki irisan pada wilayah kerjanya (lihat Tabel 3). Potensi peningkatan keterpaduan pembangunan ekonomi daerah semakin tinggi dengan keberadaan *holding* perkebunan. Beberapa strategi untuk memanfaatkan potensi tersebut adalah:

1. Menyatukan operasional perkebunan pada komoditas sejenis dengan wilayah operasional yang beririsan. Sebagai contoh adalah operasional perkebunan kelapa sawit di wilayah Sumatera Utara di mana PT Perkebunan Nusantara II, III, dan IV sama-sama mengusahakan komoditas tersebut. Keuntungan utama dari penyatuan operasional perusahaan pada umumnya adalah perolehan skala ekonomis yang lebih tinggi sehingga menghemat biaya perusahaan secara keseluruhan.¹⁵ Manajemen dapat mengevaluasi beberapa sumber pos penghematan potensial, diantaranya: (1) biaya tetap produksi, (2) biaya tetap distribusi, dan (3) biaya tenaga kerja.
2. Menyatukan tenaga kerja perusahaan baik pada sektor *on farm* maupun *off farm*. Dalam perusahaan yang tergabung dalam satu organisasi *holding*, sangat dimungkinkan untuk melakukan penyatuan tenaga kerja dan melakukan penataan

¹⁵ Roc Armenter & Miklos Koren, "Economies of Scale and The Size of Exporters", *Journal of European Economic Association* , Vol. 13 (3). 2015. pp 482-511.

kembali beban kerja pada masing-masing tenaga kerja.¹⁶ Salah satu karakter dari tenaga kerja di sektor perkebunan adalah kebutuhan akan tenaga kerja yang tidak merata sepanjang tahun. Pada masa tanam dan pemeliharaan,

jumlah tenaga kerja sektor off farm sangat sedikit

pemasukan dari biaya yang digunakan untuk mengoperasikan alat baik biaya tetap maupun biaya variabel.¹⁷ Dengan penyatuan mesin produksi antara PT Perkebunan Nusantara maka sangat dimungkinkan pengoperasian mesin produksi secara berkesinambungan sepanjang tahun melalui penjadwalan waktu tanam dan panen. Dampaknya tentu saja adalah penghematan biaya operasional pabrik pada PT Perkebunan Nusantara yang terlibat dalam penyatuan mesin produksi.

Potensi pembangunan daerah pada pembentukan *holding* BUMN Perkebunan juga tercermin pada potensi pemberdayaan masyarakat pekebun yang berlokasi di wilayah operasional perusahaan. Sebagaimana diketahui, kebun yang dioperasikan oleh PT Perkebunan Nusantara tidak seluruhnya dimiliki oleh perusahaan, melainkan sebagian dimiliki oleh masyarakat sekitar dengan skema kemitraan inti-plasma. Dengan sistem kemitraan ini, pekebun masyarakat sekitar memperoleh kepastian pembelian dari perusahaan dengan harga tertentu. Sementara keuntungan bagi perusahaan adalah kepastian memperoleh pasokan bahan baku komoditas untuk diolah lebih lanjut.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh PT Perkebunan Nusantara adalah kekurangan pasokan bahan baku, khususnya pada saat harga pembelian dari pabrik swasta lebih tinggi dibandingkan harga pembelian perusahaan. Dampaknya adalah pabrik tidak dapat berproduksi sehingga target penerimaan perusahaan tidak tercapai.

¹⁷ Baumol, W. J. and R. D. Willig, "Fixed costs, sunk costs, entry barriers, and sustainability of monopoly," *The Quarterly Journal of Economics*, 96, 1981, pp. 405-431.

Dengan sinergi antar perusahaan dalam grup *holding*, maka permasalahan ini dapat dipecahkan dengan strategi memberikan pasokan dari perusahaan yang memperoleh surplus kepada perusahaan yang mengalami kekurangan bahan baku. Sementara keuntungan bagi masyarakat adalah kemungkinan volume penjualan komoditas perkebunan yang lebih tinggi dikarenakan mekanisme pengalihan pasokan tersebut.

Strategi keempat, yaitu kemandirian keuangan dan penciptaan nilai dapat dicapai dengan memperkuat sinergi PT Perkebunan Nusantara yang tergabung dalam *holding* perkebunan. Penciptaan nilai tambah dari komoditas perkebunan sudah merupakan strategi yang diimplementasikan pada beberapa perusahaan dengan tujuan utama memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan menjual produk komoditas secara langsung. Beberapa contoh dari penciptaan nilai tambah ini adalah produksi etanol dari tebu dan pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan bakar pabrik atau untuk produksi listrik yang biasa disebut dengan *cogeneration*.¹⁸ Beberapa contoh usaha peningkatan nilai komoditas perkebunan oleh PT Perkebunan Nusantara dapat dilihat pada Tabel 4.

¹⁸ http://www.cogeneurope.eu/what-is-cogeneration_19.html, diakses 27 Agustus 2016.

Tabel 4. Peningkatan Nilai Tambah dari Produk PT Perkebunan Nusantara

Perusahaan	Produk Nilai Tambah
PT Perkebunan Nusantara X	Bio etanol dari tebu, cogeneration
PT Perkebunan Nusantara XI	bioetanol dari tebu
PT Perkebunan Nusantara XII	coklat dari kakao
PT Perkebunan Nusantara XIII	cogeneration
PT Perkebunan Nusantara XIV	cogeneration

Sumber : Website PT Perkebunan Nisantara X, XI, XII, XIII, XIV

Dengan skema *holding*, manajemen dapat mengalokasikan investasi kepada PT Perkebunan Nusantara lain yang memiliki potensi untuk ikut menciptakan nilai tambah dari produk perkebunannya. Selain itu, melalui skema pertukaran teknologi maka manajemen tidak perlu mengeluarkan biaya pembelian lisensi teknologi karena dapat menggunakan teknologi yang telah diimplementasikan di salah satu PT Perkebunan Nusantara. Secara keseluruhan kesempatan *holding* untuk memperoleh peningkatan keuntungan melalui penjualan produk bernilai tambah akan semakin besar.

Skema *holding* juga meningkatkan kesempatan untuk memperoleh kemandirian keuangan bagi perusahaan yang tergabung di bawahnya melalui skema pembiayaan yang melibatkan penjaminan aset yang lebih besar. Sebagai diketahui, dengan keberadaan *holding*, maka akan sangat dimungkinkan dilakukan pinjaman menggunakan jaminan aset yang dikonsolidasikan.

Sementara itu, lembaga pembiayaan memiliki kecenderungan untuk memberikan kredit kepada perusahaan dengan kinerja positif dan kepemilikan aset bernilai tinggi.¹⁹

Kesempatan pembiayaan bagi *holding* perkebunan juga tersedia melalui skema penjamin (*avalis*). Sesuai definisi, pembiayaan melalui skema penjamin adalah pemberian pinjaman melalui pihak yang bertanggungjawab terhadap pengembalian pinjaman tersebut.²⁰ Praktik pembiayaan menggunakan jaminan ini biasa dilakukan kepada perusahaan dengan aset bernilai kecil dan tidak cukup untuk menjamin besaran pinjaman. Permasalahan terbesar pada pembiayaan model *avalis* adalah kepercayaan dan tingkat kredibilitas dari peminjam di mata penjamin. Dengan pembentukan *holding* perkebunan, maka skema pembiayaan *avalis* dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan induk perusahaan, atau anak perusahaan yang beraset besar sebagai penjamin.

V. POTENSI PERMASALAHAN HOLDING BUMN PERKEBUNAN

Selain potensi *holding* melalui implementasi 4 (empat) strategi sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, ada beberapa permasalahan potensial yang dapat menghambat kinerja dari *holding*. Permasalahan potensial tersebut antara lain adalah:

1. Potensi adanya polaritas yang bersumber dari pluralitas anggota perusahaan dalam *holding company*. Secara teori, perusahaan berbadan hukum otonom secara inheren telah

¹⁹ Jason Fox, Dewey Gonsoulin, and Kevin Price, "Reserve Based Finance", *Oil and Gas Financial Journal*, April 2014, pp. 1-6.

²⁰ *ibid.*

membentuk budaya perusahaan sendiri yang bersifat unik. Budaya perusahaan tersebut terbentuk dari visi, misi, beserta nilai-nilai yang dianut oleh pendiri perusahaan dan diimplementasikan dalam aktifitas perusahaan melalui tata tertib dan etika organisasi.²¹ PT Perkebunan Nusantara sebagai sebuah perusahaan yang sudah lama berdiri (PT Perkebunan Nusantara merupakan hasil nasionalisasi dari perusahaan Belanda pada periode tahun 1950-1960 an) juga memiliki nilai-nilai budaya perusahaan yang unik. Nilai budaya yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara I hingga XIV tentu berbeda satu sama lain dan dapat menimbulkan permasalahan dalam aktifitas yang membutuhkan sinergi keseluruhan *holding*. Salah satu contoh permasalahan yang mungkin bersumber dari perbedaan nilai budaya perusahaan adalah gaya komunikasi antar atasan-bawahan atau antara rekan kerja yang dapat menimbulkan misinterpretasi sehingga menghambat eksekusi sesuai rencana perusahaan.²² Untuk mengatasi permasalahan ini manajemen harus mendorong kerjasama antar karyawan yang berasal dari PT Perkebunan Nusantara I-XIV dalam proyek yang bersifat lintas induk-anak perusahaan atau anak perusahaan. Dengan keterlibatan yang semakin intensif dalam proyek bersama, diharapkan permasalahan perbedaan budaya perusahaan dapat secara bertahap dapat dihilangkan.

²¹ Fred C. Lunenburg, "Understanding Organizational Culture: A Key Leadership Asset", National Forum of Educational Administration and Supervision Journal, Vol. 29 No. 4, 2001, pp. 1-12.

²² Schemerhorn, Hunt, & Osborn, *Organizational Behaviour 10thed*, New York: Wiley: 2008.

2. Komunikasi dan koordinasi antara induk-anak perusahaan maupun antara anak perusahaan. Keberadaan *holding* berimplikasi pada struktur organisasi baru dan berbeda dari struktur organisasi pada perusahaan individu. Keberadaan struktur organisasi yang baru ini tentunya berdampak pada proses komunikasi dan koordinasi, baik antara induk-anak perusahaan maupun antara anak perusahaan.²³ Dalam masa awal transisi dari perusahaan individu ke perusahaan *holding* ada fasa transisi dan adaptasi yang membuat kinerja perusahaan tidak optimal (karena karyawan masih butuh beradaptasi terhadap peraturan baru dan proses bisnis perusahaan *holding*). Manajemen harus memastikan bahwa fasa transisi dan adaptasi ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak memakan waktu terlalu lama sehingga kinerja *holding* dapat kembali optimal. Salah satu cara untuk memperpendek waktu adaptasi dan transisi ini adalah melakukan sosialisasi terkait proses komunikasi dan koordinasi saat sebelum perusahaan *holding* dibentuk serta meningkatkan intensitas keterlibatan karyawan lintas perusahaan melalui proyek bersama.

VI. PENUTUP

Pembentukan *holding* BUMN Perkebunan merupakan langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing BUMN Perkebunan di level internasional. Dengan

²³ Jones, *Organizational Theory, Design, and Change 5thed*, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2010.

pembentukan *holding*, maka BUMN Perkebunan yang selama ini terpisah sebagai perusahaan-perusahaan individu (PT Perkebunan Nusantara I-XIV) tergabung menjadi satu organisasi perusahaan dimana PT Perkebunan Nusantara III berperan sebagai induk perusahaan.

Pembentukan *holding* BUMN Perkebunan sesuai dengan *roadmap* Kementerian BUMN yang menargetkan penyederhanaan BUMN menjadi 15 (lima belas) perusahaan berbasis sektor usaha. Secara garis besar, visi jangka panjang pembangunan BUMN sesuai dengan *roadmap* tersebut berlandaskan 4 (empat) pilar strategis, yaitu : (1) Sinergi antar BUMN, (2) Hilirisasi dan kandungan lokal, (3) Pembangunan ekonomi daerah terpadu, dan (4) Kemandirian keuangan dan penciptaan nilai.

Holding BUMN Perkebunan sendiri telah memenuhi keempat strategi tersebut. Pengabungan PT Perkebunan Nusantara I-XIV dalam satu organisasi perusahaan memudahkan upaya sinergi antar BUMN. Pembentukan *holding* juga memperkuat hilirisasi dan pembangunan ekonomi daerah melalui aktifitas pertukaran sumberdaya dan kesempatan bersinergi antar PT Perkebunan Nusantara. Dampak akhir dari pelaksanaan strategi tersebut adalah penguatan kemandirian keuangan BUMN Perkebunan melalui kesempatan peningkatan pendapatan perusahaan.

Sementara itu permasalahan potensial yang ada dalam pembentukan *holding* adalah permasalahan perbedaan budaya yang dibawa dari perusahaan masing-masing. Selain itu ada permasalahan koordinasi dan komunikasi yang bersumber dari struktur baru dalam *holding*. Untuk mengatasi hal ini, manajemen harus melakukan

sosialisasi sebelum pembentukan *holding* dan peningkatan intensitas proyek bersama untuk memperpendek waktu transisi sekaligus mempercepat proses penyatuan budaya beserta sistem koordinasi perusahaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Jones, *Organizational Theory, Design, and Change 5thed*, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2010.
- Schemerhorn, Hunt, & Osborn, *Organizational Behaviour 10th ed*, New York: Wiley : 2008.

Jurnal

- J.B, Barney, "Resource-based theories of competitive advantage: a ten-year retrospective on the resource-based view. *Journal of Managementl*", Vol. 27, pp. 643-650.
- W. J. Baumol and R. D. Willig, "Fixed costs, sunk costs, entry barriers, and sustainability of monopoly," *The Quarterly Journal of Economics*, 96, 1981, pp. 405-431.
- Knight, Don, Craig L. Pearce, and Ken G. Smith, " Top Management Diversity, Group Process, and Strategic Consessus", *Strategic Management Journal*, Vol. 20, 1999, pp. 445-465.
- Lunenburg, C. Fred, "Understanding Organizational Culture: A Key Leadership Asset", *National Forum of Educational Administration and Supervision Journal*, Vol. 29 No. 4, 2001, pp. 1-12.
- Fox, Jason, Dewey Gonsoulin, and Kevin Price, "Reserve Based Finance", *Oil and Gas FinancialJournal*, April 2014, pp. 1-6.

Hardt, Lukas, "The History of Transaction Cost Economics and Its Recent Developments", *Erasmus Journal of Philosophy and Economics*, Vol. 2 (1). 2009, pp. 29-51.

Furrer, Olivier, Howard Thomas and Anna Goussevskaia, "The structure and evolution of the strategic management field 2007 The structure and evolution of the strategic management field: A content analysis of 26 years of strategic management research", *International Journal of Management Reviews*, Vol. 10 (1), pp. 1-23.

Armenter, Roc& Miklos Koren, "Economies of Scale and The Size of Exporters", *Journal of European Economic Association* , Vol. 13 (3). 2015. pp 482-511.

Bruma, Zehra, "Human Resource Management and Its Importance for Today's Organization", *International Journal of Education and Social Science*, Vol. 1 (2), 2014, pp. 85-94.

Dokumen Resmi

Szamosszegi, Andrew and Cole Kyle, *An Analysis of State-ownned Enterprises and State Capitalism in China*, Research Report, 2011.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara, *Roadmap Kementerian BUMN*, 2015.

Buckley, Tim, An overview of Adani Enterprises' Corporate Restructuring, Research Report presented in Briefing Notes, 2015.

Rural Industry Research and Development Corporation, "Integrated Agriculture Systems", *Research Report*, 2003.

Sumber Media Daring

http://www.cogeneurope.eu/what-is-cogeneration_19.html, diakses
27 Agustus 2016.

EPILOG

Seiring dengan menurunnya ekspor pertanian primer Indonesia, maka perlu didorong ekspor produk industri agro yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Indonesia memiliki sumberdaya alam yang berlimpah terutama di bidang pertanian, selama ini sumberdaya itu digunakan dan dijual tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu atau apabila dengan pengolahan masih minimal. Bahan mentah yang dijual terutama untuk pasar ekspor, kemudian diolah oleh negara lain menjadi produk-produk yang mempunyai nilai tambah yang jauh lebih tinggi sehingga negara tersebutlah yang mengambil mayoritas nilai tambah atas produk tersebut. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor biji coklat ke negara-negara Eropa dan diolah menjadi coklat yang bernilai tinggi. Ironisnya, coklat inilah yang diimpor oleh Indonesia dengan nilai yang sudah berlipat-lipat dibandingkan dengan pada saat bentuknya biji coklat.

Pada buku ini para penulis mencoba memotret bagaimana kondisi industri agro Indonesia saat ini dan bagaimana strategi untuk meningkatkan daya saing produk tertentu atau produk industri agro secara umum. Terdapat dua pendekatan dalam buku ini dalam membahas peningkatan dayasaing yaitu yang pertama adalah dengan pendekatan satu

komoditi atau kumpulan komoditi dan yang kedua adalah meningkatkan dayasaing industri agro dari sisi kelembagaan.

Pada pendekatan pertama, komoditi yang dibahas adalah minyak sawit (terutama CPO) dan industri agro secara keseluruhan. Pada kondisi saat ini CPO sebagai salah satu produk unggulan ekspor Indonesia memiliki tingkat dayasaing yang kuat di pasar internasional. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata indeks RCA CPO Indonesia memiliki nilai lebih dari 1. Kebijakan pemerintah juga sudah mengarah pada hilirisasi produk dengan salah satu kebijakannya adalah pengenaan bea keluar yang tinggi dengan semakin mentahnya produk minyak sawit tersebut.

Untuk meningkatkan daya saing produk minyak sawit Indonesia maka perlu diterapkan strategi meningkatkan investasi di subsektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk CPO maupun turunannya, meningkatkan volume ekspor CPO, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung industri CPO dan mengembangkan sumber daya manusia industri CPO.

Perlu juga adanya kebijakan pemerintah yang memihak untuk meningkatkan produksi dan penjualan minyak sawit baik di dalam maupun di luar negeri. Era perdagangan bebas perlu dimanfaatkan secara optimal agar Indonesia tidak hanya

menjadi pasar produk negra lain. Selain melalui kebijakan pemerintah perlu melakukan tindakan nyata dalam rangka meningkatkan volume dan nilai jual minyak kelapa sawit. Berbagai kendala dan hambatan yang ada selama ini perlu diminimalisir.

Selain minyak sawit, produk industri agro lainnya juga memiliki dayasaing yang ditunjukkan dengan nilai RCA yang bernilai lebih dari satu. Untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kondisi ini, maka perlu strategi yang berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah dengan strategi klaster. Strategi kluster industri ini dapat dilihat menjadi alternatif dalam memperbaiki daya saing agroindustri Indonesia yang masih masuk kategori sedang berkembang. Pendekatan kluster berupaya membangun keterkaitan antar industri yang bisa mengarah pada rangkaian proses produksi hingga distribusi ke konsumen, atau mengarahkannya untuk mendukung suatu produk manufaktur tertentu. Untuk memperkuat strategi industrialisasi dengan kluster, strategi ini juga menyarankan untuk mengembangkan kluster dengan cara menempatkan lembaga pemerintah, universitas hingga perusahaan terkait atau sebidang dalam satu kawasan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan setiap output produksi menjadi rangkaian yang efektif dan efisien.

Di dalam pendekatan klaster, terdapat beberapa variasi dalam penerapannya. Pertama konsep *Global value chain*, sebuah konsep pengembangan produk agro dengan pengembangan wilayah lintas pulau dan negara. Dalam konsep ini pengembangan dilakukan melalui sejumlah perusahaan yang bekerja lintas negara sehingga bersifat global. Kedua *Agribusiness complex* merujuk pada praktik interkoneksi antar kegiatan dari mulai memproduksi hasil pertanian hingga pemasaran, dan interkoneksi dan saling ketergantungan antar perusahaan di dalam suatu complex. Ketiga *agro-industrial park* atau sering disebut agro-food park merupakan upaya membangun fasilitas bersama (digunakan dan dimanfaatkan secara bersama seperti infrastruktur, transportasi, gudang dan pengemasan) dalam memproses lebih lanjut produk hasil pertanian menjadi pangan yang siap dipasarkan. Keempat *Agri-export zones* sebagai bentuk usaha mewujudkan kluster dapat menumbuhkan kegiatan ekspor produk pertanian. Sedangkan, produk lanjutan dari produk pertanian harus memiliki hubungan yang kuat dari produk pertanian setempat dan diarahkan berada dalam satu zona yang sama dengan produk pertaniannya walaupun berbeda distrik. Kelima, *One-village-one-product*. Suatu kawasan pedesaan atau kawasan tertentu didorong untuk berkonsentrasi atau focus pada satu produk, meningkatkan nilai tambah produk dan memperkenalkannya sebagai produk daerah tersebut secara terus menerus.

Pendekatan kedua adalah dengan pendekatan kelembagaan. Pada buku ini dijelaskan dua bentuk kelembagaan yaitu kawasan industri dan pembentukan *holding* BUMN. Pada pendekatan kawasan industri dijelaskan dengan kasus Sei Mangke dan Maloy yang dibentuk untuk mendukung dayasaing industri agro Indonesia. Dampak yang dirasakan dengan adanya kawasan industri tersebut bagi pemerintah adalah adanya penambahan pajak pertambahan nilai, penghematan devisa akibat pengurangan impor, dan nilai tambah. Selain itu kawasan industri tersebut memiliki manfaat ekonomi bagi pertumbuhan perekonomian daerah tempat kawasan industri berlokasi, antara lain melalui (a) sarana pendistribusian penduduk dari daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi ke daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah; b) upaya menekan tingkat pengangguran, dan (c) meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu pelaku industri agro adalah BUMN perkebunan yang sahamnya dimiliki pemerintah. Peran BUMN perkebunan terasa semakin menurun, baik dari sisi produksi maupun produktivitas. Salah satu penyebabnya adalah inefisiensi BUMN tersebut dan salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah dengan membentuk *holding* perkebunan sehingga dengan adanya *holding* tersebut, antar BUMN dapat saling bersinergi untuk meningkat dayasaing perusahaan.

Pembentukan *holding* juga memperkuat hilirisasi dan pembangunan ekonomi daerah melalui aktifitas pertukaran sumberdaya dan kesempatan bersinergi antar PT Perkebunan Nusantara. Dampak akhir dari pelaksanaan strategi tersebut adalah penguatan kemandirian keuangan BUMN Perkebunan melalui kesempatan peningkatan pendapatan perusahaan.

Dari buku ini dapat disimpulkan bahwa strategi meningkatkan dayasaing dapat dilakukan dengan meningkatkan dayasaing komoditi itu sendiri dengan berbagai upaya efisiensi dan dengan pendekatan kelembagaan yang menaungi komoditi tersebut. Kedua pendekatan ini dapat dilakukan bersama-sama untuk meningkatkan komoditi industri agro Indonesia.

Indeks

A

- agro industri, 61, 74, 81, 87
anakperusahaan, 170
aseanfree trade agreement, 170
aseanfree trade agreement, 170
avalis, 156, 170

B

- bisnis, 24, 45, 47, 48, 56, 57, 117, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 158, 170
bumn, 144, 170

C

- CPO, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 38, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 79, 92, 93, 96, 102, 106, 107, 108, 109, 120, 122, 123, 165, 170
cogeneration, 155, 163, 170
comparative advantage, 44, 50, 64,
competitive advantage, 53, 64, 138, 161, 170
cpo, 170
crudepal oil, 170

D

- daya saing, 2, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 33, 46, 49, 50, 53, 59, 60, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 96, 105, 117, 120, 124, 131, 136, 148, 159, 166, 171
Daya Saing, 4, 5, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 32, 56, 60, 76, 95, 134, 171

E

- efekpenciptaanperdagangan, 171
efekpengalihanperdagangan, 171
efisiensi, 27, 28, 35, 51, 60, 63, 64, 65, 68, 74, 75, 83, 86, 93, 124, 169, 171
ekspor, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 31, 33, 36, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 63, 65, 73, 76, 78, 79, 81, 109, 122, 164, 165, 167, 171

H

- hilirisasi, 50, 96, 110, 122, 123, 124, 131, 132, 149, 159, 165, 171
holding, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 168, 171

I

- indukperusahaan, 171
Indonesia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 119, 121, 122, 123, 126, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 144, 147, 148, 150, 164, 165, 166, 168, 169, 172, 175,

177, 178, 179
Industri, 3, 23, 25, 35, 38, 42, 44,
45, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 70,
85, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98,
99, 100, 104, 105, 110, 111,
114, 116, 122, 133, 134, 135,
148, 172, 179, 180

integrasiekonomi, 172

investasi, 2, 18, 29, 31, 33, 40, 45,
49, 52, 53, 72, 82, 83, 94, 97,
99, 101, 102, 111, 116, 138,
139, 140, 141, 143, 155, 165,
172

K

Kalimantan Timur, 43, 84, 94, 96,
102, 103, 107, 108, 109, 110,
112, 116, 123, 126, 127, 128,
132, 133, 172

karet, 23, 82, 120, 151, 172

Kawasan Ekonomi Khusus, 96,
101, 115, 118, 134, 135, 172,
178

Kawasan Industri

Kebijakan, 21, 35, 44, 55, 66, 68,
78, 100, 109, 111, 122, 133,
134, 165, 172, 177, 178, 179,
180

KEK, 96, 101, 102, 103, 108, 111,
112, 113, 115, 116, 117, 118,
119, 121, 122, 124, 125, 126,
131, 135, 172

kelapa sawit, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16,
17, 18, 23, 24, 33, 36, 38, 39,
42, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53,
81, 84, 102, 103, 116, 120, 122,
124, 151, 165, 166, 172

keuangan, 2, 21, 27, 143, 144,
154, 156, 159, 160, 172, 178

kluster, 71, 73, 74, 75, 82, 86, 87,
104, 166, 167, 172

komoditas, 4, 13, 14, 15, 17, 24,
36, 45, 47, 48, 56, 57, 73, 76,
83, 86, 109, 150, 151, 154, 173

L

liberalisasi, 18, 19, 31, 44, 58, 59,
61, 64, 66, 173

M

Maloy, 94, 96, 102, 103, 106, 108,
110, 111, 112, 113, 115, 116,
117, 121, 123, 124, 126, 131,
133, 135, 168, 173

manajemen, 137, 139, 140, 141,
142, 143, 155, 158, 160, 173

masyarakatekonomiasean, 173

mea, 2, 21, 173

minyakkelapasawit, 173

modal, 74, 98, 99, 130, 138, 146,
153, 17

N

negara, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38,
39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 86, 93, 97,
109, 122, 132, 144, 146, 147,
164, 167, 173, 178
noodle bowl effect, 29, 173

O

offfarm, 149, 152, 153, 173
on farm, 149, 152, 153, 173
operasional, 115, 120, 131, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 151,
153, 154, 174
organisasi, 58, 141, 142, 152,
157, 158, 159, 174

P

- palm kernel oil, 25, 122, 174
pendapatan, 4, 45, 46, 48, 65, 97, 139, 140, 144, 155, 160, 174
Pengembangan, 82, 101, 105, 111, 118, 120, 125, 133, 134, 147, 174
perdagangan, 2, 5, 13, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 51, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 74, 75, 80, 82, 85, 86, 87, 105, 121, 129, 165, 174, 176
perdaganganbebas, 174
perkebunan, 4, 5, 18, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 49, 50, 51, 52, 102, 106, 107, 109, 111, 112, 114, 120, 123, 124, 136, 137, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 165, 168, 174
Pertanian, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 36, 45, 49, 55, 56, 70, 174, 176, 177, 180
perusahaan, 24, 40, 42, 44, 52, 70, 71, 73, 83, 94, 95, 116, 120, 124, 130, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 168, 174
produksi, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 86, 96, 99, 105, 106, 108, 109, 110, 123, 137, 138, 143, 152, 153, 155, 165, 166, 168, 174
produktivitas, 8, 12, 25, 28, 38, 44, 51, 53, 62, 84, 97, 137, 144, 168, 174

R

- RCA, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 48, 49, 76, 77, 78, 165, 166, 175
roadmap, 175

S

- Sawit, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 55, 56, 83, 102, 107, 108, 109, 110, 133, 135, 175
saham, 139, 143, 146, 175
Sei Mangke, 83, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 124, 125, 131, 134, 168, 175
sektor, 2, 3, 5, 6, 23, 32, 33, 36, 61, 65, 67, 68, 70, 71, 76, 84, 86, 91, 94, 97, 99, 100, 101, 102, 105, 108, 112, 113, 130, 136, 137, 143, 145, 146, 148, 149, 152, 153, 159, 175
sinergi, 132, 142, 144, 145, 148, 149, 154, 157, 159, 175
strategi, 5, 18, 61, 63, 69, 70, 71, 74, 82, 97, 138, 140, 141, 144, 145, 149, 151, 152, 154, 157, 159, 164, 165, 166, 169, 175
substitusi impor, 131, 175
Sumatera Utara, 6, 7, 9, 24, 42, 43, 82, 83, 84, 94, 96, 100, 101, 106, 107, 113, 114, 118, 120, 123, 125, 126, 128, 129, 131, 133, 134, 151, 152, 175
- T**
- Tebu, 151, 175
- V**
- value network*, 72, 81, 86, 176

BIOGRAFI PENYUNTING



Dr Amzul Rifin, SP, MA adalah dosen di Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Lahir di Bogor pada tanggal 21 September 1975. Gelar Sarjana diperoleh di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB pada tahun 1998. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan S2 pada program International Development Program, International University of Japan, Jepang dan lulus pada tahun 2005. Gelar Ph.D diraih dari Department of Agricultural and Resource Economics, University of Tokyo, Jepang pada tahun 2011.

Bidang keahlian yang ditekuni adalah perdagangan khususnya untuk komoditi sawit dan coklat. Terdapat beberapa artikel yang telah dipublikasikan di jurnal internasional antara lain di jurnal ASEAN Economic Bulletin, Trends in Agricultural Economics, Oil Palm Industry Economic Journal, International Journal of Trade, Economics and Finance, Journal of Products Marketing serta International Trade Journal. Berbagai konferensi di dalam maupun di luar negeri pernah diikuti untuk menyajikan makalah antara lain konferensi International Association of Agricultural Economics (IAAE), Australian Agricultural and Resource Economics Society (AARES), Indonesian Regional Science Association (IRSA), East Asian Economic Association (EAEA) serta Perhimpunan Ekonomi Pertanian

Indonesia (Perhepi). Saat ini juga bertugas sebagai editor jurnal di Jurnal Agribisnis Indonesia, Forum Agribisnis.

Selain di bidang penelitian, editor juga memberikan pelatihan khususnya di bidang ekonometrika dan telah melakukan di beberapa instansi antara lain IPB, Universitas Teuku Umar, Universitas Bengkulu dan DPR. Alamat email yang dapat dihubungi adalah amzul_rifin@yahoo.com.

BIOGRAFI PENULIS

Eka Budiyanti, lahir di Jakarta, 22 Januari 1984. Menempuh studi S1 pada jurusan Matematika – Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran pada tahun 2001 dengan kekhususan matematika terapan. Kemudian melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006 dengan kekhususan kebijakan moneter dan perbankan. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik. Beberapa topik jurnal dan buku yang telah ditulis: *time inconsistency* dalam kebijakan moneter, *inflation targeting*, subsidi pajak, pinjaman luar negeri, stabilitas sistem keuangan, krisis Eropa, sektor keuangan, *green banking*, *twin deficit*, bank khusus industri, industri manufaktur, dan investasi. Penulis dapat dihubungi melalui email: eka.budiyanti@gmail.com atau eka.budiyanti@dpr.go.id.

Venti Eka Satya, menyelesaikan studi S1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi dan sejak tahun 2009 bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa topik penelitian yang telah dilakukan diantaranya, Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kesiapan Sektor Industri Agro Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, serta Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial. Karya tulis ilmiah

penulis juga telah dipublikasikan di beberapa jurnal dan dalam bentuk buku. Sebagai bagian dari *supporting system* Dewan, penulis juga terlibat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kedewanian. Penulis menjadi tim analis keuangan negara yang menganalisa hasil audit BPK di Badan Akuntabilitas Kuangan Negara (BAKN), mendampingi Tim Pengawas Kasus Bank Century, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Kepariwisataan, dan lain-lain sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui email:venti.eka@dpr.go.id.

Suhartono, adalah Peneliti Madya bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Kebijakan Publik. Lahir di Jakarta 6 Agustus 1973. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Gadahjah Mada tahun 1998. Pendidikan S2 dari *Graduate Program of Public Policy, Australian National University* tahun 2001. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak Tahun 1999 sebagai peneliti dan saat ini di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa tulisan, Respon IPU terhadap Masaah-Masalah Global Pasca Perang Dingin (2000), Analisis Kebijakan Luar Negeri Abdurahman Wahid (2001), Terorisme dan Tata Dunia Baru (2002), Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi (2003), Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial (2004), Konflik dan Perkembangan Kawasan Pasca Perang Dingin (2004), TKI dan Hubungan Indonesia-Malaysia (2005), Persiapan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (2008), Proses Pembuatan Kebijakan Publik Melalui Undang-Undang Bagi Kepentingan Publik (2009), Kajian Kebijakan Publik (2010), Isu

Perdagangan dan Industri sebagai Kebijakan strategis Daerah dalam menghadapi Globalisasi dan Liberalisasi (2011), Quo Vadis Perekonomian Indonesia (2013), Evaluasi Pelaksanaan Daerah Otonomi Baru (2014), Efektifitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya (2014), Arah Kebijakan Pembangunan Daerah: Peran Legislasi, Aspek Tematik dan Pemerataan (2015).

Rafika Sari, menyelesaikan studi S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro (1999) dan pendidikan Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (2006). Bekerja sebagai Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mulai tahun 2009 dengan kepakaran Kebijakan Publik. Tulisan yang sudah dipublikasikan: "Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Tertinggal di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 5(1) Tahun 2014; "Kondisi Ketahanan Pangan dan Sektor Pertanian Indonesia dalam Rangka Kerja Sama Regional Asia dan Eropa", bagian buku Isu-Isu Internasional Kontemporer dalam Diplomasi Parlementer (2015), dan "Sektor Transportasi Laut dan BUMN: Upaya Menekan Inefisiensi Melalui Integrasi Usaha", Bagian Buku Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia (2015). Penulis dapat dihubungi melalui email: rafika.sari@dpr.go.id.

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi adalah Peneliti Muda bidang kebijakan publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, lahir di Yogyakarta, 18 Mei 1981. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di

Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung pada Tahun 2004 dan menyelesaikan pendidikan S-2 di Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2009. Penulis menaruh minat pada permasalahan pengelolaan energi dan sumber daya alam, perindustrian, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Beberapa publikasi yang pernah diterbitkan antara lain : Pengendalian BUMN Sektor Telekomunikasi Pasca Privatisasi (2015), Kebijakan Peningkatan Kinerja Industri Manufaktur (2014), Kebijakan Menghadapi ASEAN Open Sky (2013), dan Kebijakan Sisi Hulu dan Hilir Industri Gas Bumi. Saat ini penulis juga tengah aktif dalam penelitian terkait Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan dan Pemodaluan dalam Usaha Koperasi. Penulis dapat dihubungi melalui email sahat.silalahi81@gmail.com.